



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

RANCANGAN TEKNOKRATIK

RPJMD

KOTA SINGKAWANG

2025-2029

BAPPEDA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3. Hubungan Antara Dokumen	2
1.4. Maksud dan Tujuan.....	3
1.5. Sistematis Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029	4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	6
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	6
2.1.1. Aspek Geografi.....	6
2.1.1.1. Geologi.....	8
2.1.1.2. Topografi	9
2.1.1.3. Klimatologi	10
2.1.1.4. Penggunaan Lahan.....	10
2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana.....	11
2.1.1.6. Peran Strategis Kota Singkawang.....	12
2.1.1.7. Potensi Daerah.....	16
2.1.1.8. Kondisi Lingkungan Hidup	17
2.1.1.8.1. Kualitas Air Sungai.....	17
2.1.1.8.2. Daya Tampung Sampah.....	17
2.1.1.8.3. Daya Dukung Air.....	18
2.1.1.8.4. Daya Dukung Pangan	18
2.1.2. Aspek Demografi.....	19
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	20
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	20
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	20
2.2.1.2. Laju Inflasi.....	21
2.2.1.3. Indeks Gini.....	23
2.2.1.4. Angka Kemiskinan	24
2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	26
2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	27
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.....	28
2.2.2.1. Indeks keluarga Sehat	28
2.2.3. Indeks Kualitas Keluarga	29
2.2.4. Indeks Perlindungan Anak.....	31
2.2.5. Indeks Gender.....	32
2.2.5.1. Indeks Pembangunan Manusia-Gender (IPG).....	32
2.2.5.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	33
2.2.5.3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG).....	34
2.2.6. Indeks Pembangunan Pemuda.....	35

2.2.7.	Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	36
2.3.	Aspek Daya Saing.....	37
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	37
2.3.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	37
2.3.1.2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan ...	39
2.3.1.3.	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita.....	42
2.3.1.4.	Indeks Ekonomi Inklusif.....	44
2.3.2.	Daya Saing SDM	46
2.3.2.1.	Indeks Pendidikan.....	46
2.3.3.	Angka Listerasi/Numerasi	48
2.3.4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	49
2.3.5.	Indeks Listerasi Digital.....	50
2.3.6.	Indeks Masyarakat Digital	51
2.3.7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	52
2.3.8.	Rasio Ketergantungan.....	54
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	55
2.3.3.1.	Indeks Infrastruktur Daerah (IID).....	55
2.3.3.1.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI).....	56
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi	56
2.3.4.1.	Indeks Demokrasi	56
2.3.4.2.	Indeks Toleransi.....	57
2.3.5.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban.....	59
2.3.6.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).....	59
2.3.7.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	60
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	61
2.4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	62
2.4.2.	Indeks Pelayanan Publik	62
2.4.3.	Indeks Inovasi daerah.....	63
2.4.4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	63
2.4.5.	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	64
2.4.6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunkasi Publik	64
2.4.7.	Survey Penilaian Integritas	65
2.4.8.	Angka Partisipasi Murni	65
2.4.9.	Angka Partisipasi Kasar	66
2.4.10.	Angka Putus Sekolah	68
2.4.11.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH.....	69
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	70
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	71
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	72
3.1.2.	Pendapatan Daerah	72
3.1.3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	86
3.1.4.	Pendapatan Transfer	87
3.1.5.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	88
3.1.6.	Belanja Daerah.....	88
3.1.7.	Pembiayaan Daerah	92
3.1.8.	Neraca Daerah.....	94

	3.1.9.	Rasio Likuiditas	100
	3.1.10.	Rasio Lancar (Current Ratio).....	100
	3.1.11.	Rasio Cepat (Quick Ratio).....	101
	3.1.12.	Rasio Solvabilitas	103
	3.1.13.	Rasio Total Kewajiban/Total Hutang Terhadap Total Aset	103
	3.1.14.	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas	104
	3.1.15.	Rasio Aktivitas.....	105
	3.1.16.	Rasio Rata-Rata Umur Piutang.....	105
	3.1.17.	Rasio Rata-Rata Umur Persediaan.....	106
	3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	106
	3.2.1.	Analisis Kesehatan Keuangan Daerah.....	107
	3.2.2.	Kemandirian Keuangan daerah.....	107
	3.2.3.	Tax Ratio.....	108
	3.2.4.	Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja APBD.....	109
	3.2.5.	Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD.....	110
	3.2.6.	Analisis Belanja Daerah.....	112
	3.2.7.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	112
	3.2.8.	Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	118
	3.2.9.	Analisis Pembiayaan Daerah	130
	3.2.10.	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil.....	131
	3.3.	Kerangka Pendanaan	136
	3.3.1.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang	136
	3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	146
	3.3.3.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat	147
	3.3.4.	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah	155
	3.3.5.	Kebijakan Alokasi Anggaran	157
BAB IV		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	160
	4.1.	Permasalahan	160
	4.1.1.	Permasalahan Pembangunan.....	160
	4.2.	Isu Strategis.....	178
	4.2.1.	Isu Strategis Internasional.....	178
	4.2.2.	Isu Kebijakan Nasional.....	187
	4.2.3.	Isu Straregis Kalimantan Barat	188
	4.2.4.	Isu Strategis Kota Singkawang	188
BAB V		REKOMENDASI.....	192
	5.1.	VISI DAN MISI DAERAH	192
	5.1.1.	Visi Daerah Tahun 2025-2045.....	192
	5.1.2.	Misi Daerah Tahun 2025-2045	192
	5.2.	RANGKAIAN KINERJA	200
	5.3.	RANGKAIAN KERJA DAN PROGRAM PRIORITAS	217
	5.4.	PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS/UNGGULAN.....	225
BAB VI		Penutup.....	228

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Tahun 2024	II-4
Tabel 2.2.	Rata-rata Curah Hujan Kota Singkawang	II-5
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan Kota Singkawang	II-6
Tabel 2.4.	Luas Wilayah Kota Singkawang menurut Tergenang dan Tidak Tergenang	II-6
Tabel 2.5.	Jumlah Kejadian Bencana Longsor di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-7
Tabel 2.6.	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-7
Tabel 2.7.	Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah, Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2024	II-14
Tabel 2.8.	Banyaknya RT dan RW Menurut Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2024	II-15
Tabel 2.9.	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang (dalam %) Tahun 2019-2023	II-15
Tabel 2.10.	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (COICOP) (Persen) Kota Singkawang Tahun 2020-2023	II-17
Tabel 2.11.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-35
Tabel 2.12.	Indeks Infrastruktur Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-50
Tabel 2.13.	Kota dengan Skor Tertinggi Indeks Kota Toleran Tahun 2023	II-53
Tabel 2.14.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-57
Tabel 2.15.	Indeks Pelayanan Publik Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-57
Tabel 2.16.	Indeks Inovasi Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2.17.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2.18.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2.19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2.20.	Survey Penilaian Integritas Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-60
Tabel 2.21.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-61
Tabel 2.22.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-62

Tabel 2.23.	Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-63
Tabel 2.24.	Angka Kematian Ibu Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-64
Tabel 3.1.	Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019–2020	III-5
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019–2023	III-12
Tabel 3.3.	Realisasi Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-17
Tabel 3.4.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-20
Tabel 3.5.	Neraca Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-23
Tabel 3.6.	Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kota Singkawang	III-28
Tabel 3.7.	Rasio Cepat Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	III-29
Tabel 3.8.	Rasio Hutang Terhadap Total Aset Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-30
Tabel 3.9.	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	III-31
Tabel 3.10.	Rasio Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (Hari)	III-32
Tabel 3.11.	Rasio Rata-Rata Umur Persediaan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-32
Tabel 3.12.	Tax Ratio Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-35
Tabel 3.13.	Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja dan Proporsi Rata-rata Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	III-39
Tabel 3.14.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-42
Tabel 3.15.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-49
Tabel 3.16.	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-51
Tabel 3.17	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-53
Tabel 3.18	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2029	III-56
Tabel 3.19	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kota Singkawang Tahun 2022-2029	III-62
Tabel 3.20.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2029	III-67
Tabel 3.21.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2029	III-69
Tabel 5.1	Perumusan Visi	V-2
Tabel 5.2.	Rekomendasi Rangkaian Kerja	V-9

Tabel 5.3.	Rekomendasi Rangkaian Kerja	V-16
------------	-----------------------------	------

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pemangunan dan Sektoral Lainnya	I-3
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Singkawang	II-2

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1.	Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam KM ²)	II-3
Grafik 2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	II-16
Grafik 2.3.	Indeks Gini Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	II-19
Grafik 2.4.	Persentase Penduduk Miskin Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	II-20
Grafik 2.5.		II-20

	Persentase Penduduk Miskin Kota Singkawang, tahun 2019-2023 (Jiwa)	
Grafik 2.6.	Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (Poin)	II-21
Grafik 2.7.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	II-22
Grafik 2.8.	Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-23
Grafik 2.9.	Indeks Keluarga Sejaht (IKS) kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2023 (%)	II-24
Grafik 2.10.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)	II-26
Grafik 2.11.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2022 (%)	II-27
Grafik 2.12.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)	II-28
Grafik 2.13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)	II-29
Grafik 2.14.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)	II-30
Grafik 2.15.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)	II-31
Grafik 2.16.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2022	II-32
Grafik 2.17.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-36
Grafik 2.18.	PDRB Perkapita Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-38
Grafik 2.19.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Singkawang Tahun 2011-2021	II-40
Grafik 2.20.	Nilai Pilar Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Singkawang Tahun 2021	II-40
Grafik 2.21.	Indeks Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2010-2023	II-42
Grafik 2.22.	Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	II-42
Grafik 2.23.	Angka Literasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023	II-43

Grafik 2.24.	Angka Numerasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023	II-44
Grafik 2.25.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kalimantan Barat Tahun 2022-2023	II-45
Grafik 2.26.	Indeks Literasi Digital Nasional dan Kalimantan Barat Tahun 2021-2023	II-46
Grafik 2.27.	Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital Kota Singkawang Tahun 2023	II-47
Grafik 2.28.	Tingkat Partisipasi Angkatan KERJA Kota Singkawang (%) Tahun 2019-2023	II-48
Grafik 2.29.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	II-48
Grafik 2.30.	Rasio Ketergantungan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	II-49
Grafik 2.31.	Rasio Ketergantungan se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	II-50
Grafik 2.32.	Indeks Demokrasi Provinsi Terhadap Nasional Tahun 2021-2022	II-52
Grafik 2.33.	Indeks Toleransi Kota Singkawang Tahun 2015-2023	II-53
Grafik 2.34.	Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional Tahun 2015-2021	II-54
Grafik 2.35.	10 Provinsi Terbaik dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021	II-55
Grafik 2.36.	Indeks Daya Saing Daerah Kota Singkawang Tahun 2022	II-56
Grafik 3.1.	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-3
Grafik 3.2.	Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)	III-14
Grafik 3.3.	Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III-15
Grafik 3.4.	Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-34
Grafik 3.5.	Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-36
Grafik 3.6	Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD Kota Singkawang Tahun 2019-2023	III-37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Pasal 41 huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa persiapan penyusunan RPJMD meliputi penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2024 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk periode masa jabatan Tahun 2025-2030, untuk itu diperlukan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2029 selanjutnya disingkat Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 yang merupakan rancangan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahunan dengan menggunakan pendekatan teknokratik dan kerangka berpikir ilmiah sebelum terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas agar sesuai dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang sesuai dengan kondisi empiris daerah.

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

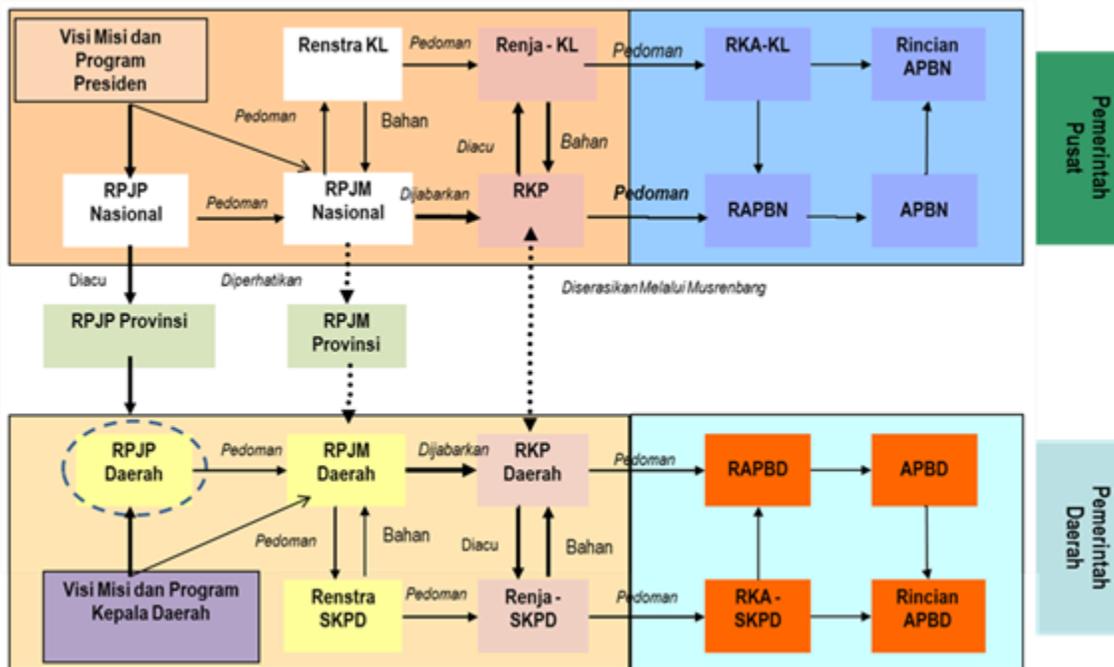
Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan

yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Keterkaitan Rancangan teknokratik RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar diatas, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD berpedoman kepada Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045 dan juga RTRW Kota Singkawang Tahun 2022-2042. Selain itu, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 harus memperhatikan isu dan permasalahan nasional yang memiliki dampak langsung dalam pembangunan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Disusunnya Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Singkawang sesuai dengan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
2. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Singkawang dalam menyusun Visi, Misi dan program prioritas sehingga tetap terjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Sebagai pedoman dan bahan penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.

1.5 Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

RPJMD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjelaskan secara umum agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan dan menjelaskan gambaran umum kondisi daerah dari 4 aspek pembangunan, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran singkat kondisi keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan tentang berbagai permasalahan pembangunan serta menjelaskan isu-isu strategis pembangunan di Kota Singkawang.

Bab V Rekomendasi

Bab ini menjelaskan terkait rekomendasi kebijakan

Bab VI Penutup

Bab ini berisikan penutup Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dan penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

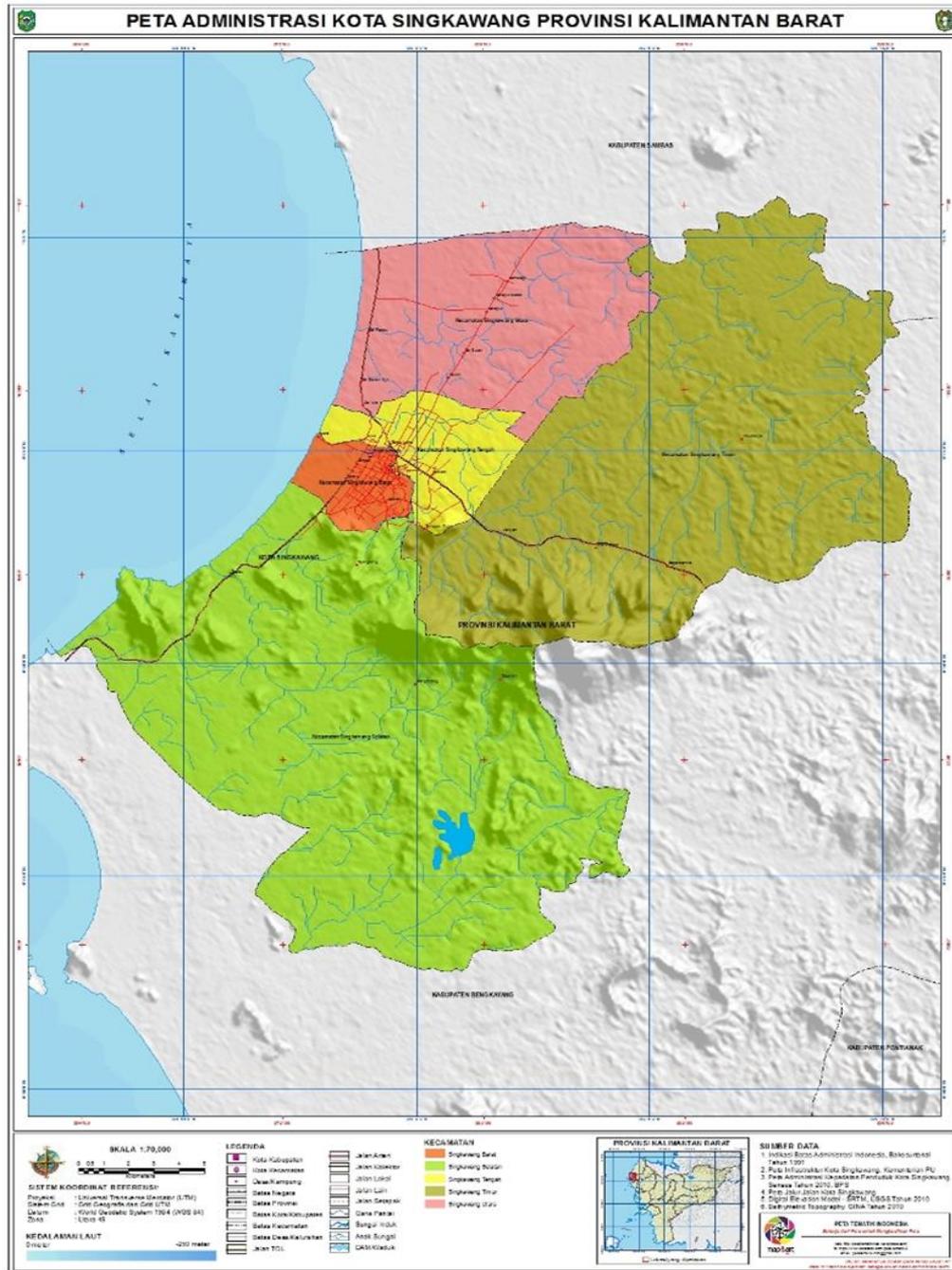
2.1.1. Aspek Geografi

Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan Ibu Kota Singkawang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang. Kota Singkawang terletak pada $0^{\circ}44'55,85''-01^{\circ}01'21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ}51'47,6''-109^{\circ}10'19''$ Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Luas wilayah Kota Singkawang 504 Km^2 (50.400 Ha) atau sekitar 0,34 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kota Singkawang adalah:

- Utara : berbatasan dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas
- Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang
- Timur : berbatasan dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
- Barat : berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Laut Natuna

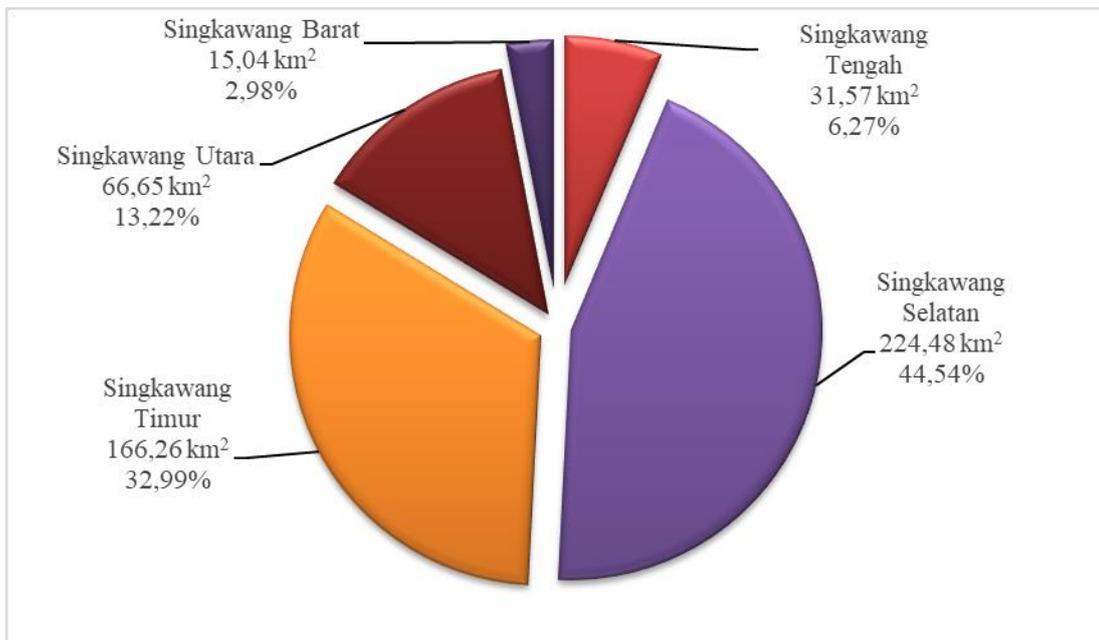
Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Singkawang



Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 224,48 km² atau 44,54 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Singkawang Barat dengan luas sebesar 15,04 km² atau 2,98 persen dari luas wilayah Kota Singkawang.

Grafik 2.1.

Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam KM²)



2.1.1.1. Geologi

Dari Lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha) sedangkan yang terkecil adalah tanah Latasol (2.988 Ha). Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- ✓ **Organosol** yaitu tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman. Umumnya, tanah ini banyak ditemukan di daerah rawa-rawa ataupun tempat yang selalu tergenang air. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Alluvial** yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau. Terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Podsol** yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta termasuk miskin unsur hara. Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Latasol** yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130-200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian.

Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.

- ✓ **PMK (Podsolid Merah Kuning)** yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah 2024

No.	Kecamatan	Luas Area		Jenis Tanah				
		(Ha)	(%)	Organosol	Alluvial	Podsol	Latasol	PMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Singkawang Selatan	22.448	44,54	1.052	11.784	2.880	2.988	3.744
2.	Singkawang Timur	16.626	32,99	2.200	3.926	10.500	-	-
3.	Singkawang Utara	6.665	13,22	500	6.165	-	-	-
4.	Singkawang Barat	1.504	2,98	-	904	600	-	-
5.	Singkawang Tengah	3.157	6,27	-	2.559	296	-	302
Jumlah		50.400	100,00	3.752	25.338	14.276	2.988	4.046
Persentase (%)		100,00		7,44	50,27	28,33	5,93	8,03

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2024

2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedang bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Luas wilayah tergenang mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) tersebar di seluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen

jenis porous dan sisanya 91,68 persen bukan porous.

Dilihat dari tekstur tanah, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar (48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar (7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 (0,60 persen). Jika berdasarkan kelas lereng, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen). Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen).

2.1.1.3.Klimatologi

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 370 milimeter dan hari hujan terbanyak tahun 2022 sebanyak 24 hari. Data rata-rata jumlah curah hujan dan hari hujan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.

Rata-rata Curah Hujan Kota Singkawang

Tahun	Rata-rata Curah Hujan	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
2018	232,42	11
2019	211	9
2020	370	15
2021	234,9	14
2022	253,4	24

Sumber : Laporan Induk KLSH RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.4.Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan dari tahun 2019-2023, lahan sawah mengalami penurunan. Untuk lahan pertanian bukan sawah mengalami peningkatan. Sama halnya lahan bukan pertanian juga mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan Kota Singkawang

No.	Tahun	Lahan Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
1.	2019	2.702	30.691	17.007
2.	2020	4.494	30.869	17.037
3.	2021	2.362	30.981	17.057
4.	2022	2.333	30.971	17.096
5.	2023	2.322	30.936	17.142

Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana

Luas wilayah tergenang di Kota Singkawang mencapai 14.147 hektar (28,07% dari total luas wilayah) tersebar diseluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen jenis menyerap dan sisanya 91,68 persen tidak menyerap. Adapun khusus Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Singkawang meliputi:

1. Kawasan rawan bencana banjir;
2. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah; dan
3. Kawasan rawan bencana gempa bumi.

Tabel 2.4.**Luas Wilayah Kota Singkawang menurut Tergenang dan Tidak Tergenang**

No.	Kecamatan	Tergenang (Ha)	Tidak Tergenang (Ha)		Luas Wilayah (Ha)
			Menyerap	Tidak Menyerap	
1.	Singkawang Selatan	1.308	3.016	18.124	22.448
2.	Singkawang Timur	6.126	0	10.500	16.626
3.	Singkawang Utara	2.948	0	3.717	6.665
4.	Singkawang Barat	1.206	0	298	1.504
5.	Singkawang Tengah	2.559	0	598	3.157
Total		14.147	3.016	33.237	50.400

Sumber : Laporan Induk KLSH RPJPD Tahun 2025-2045

Tabel 2.5.**Jumlah Kejadian Bencana Longsor di Kota Singkawang Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Singkawang Selatan	6	6	-	-	1
2.	Singkawang Timur	1	1	-	-	-
3.	Singkawang Utara	-	-	-	-	-
4.	Singkawang Barat	-	-	-	-	-
5.	Singkawang Tengah	-	-	-	-	-
Total		7	7	0	0	1

Sumber : Laporan Induk KLSH RPJPD Tahun 2025-2045

Tabel 2.6.**Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Singkawang Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Singkawang Selatan	4	24	4	1	8
2.	Singkawang Timur	3	7	3	1	-
3.	Singkawang Utara	6	40	-	1	1
4.	Singkawang Barat	-	2	-	1	3
5.	Singkawang Tengah	1	19	6	-	7
Total		14	92	13	4	19

Sumber : Laporan Induk KLSH RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.6. Peran Strategis Kota Singkawang

Kota Singkawang sebagai kota kedua terbesar di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak memiliki sejumlah peran penting bagi Kalimantan Barat, yang meliputi berbagai aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Berikut adalah beberapa peran utama Kota Singkawang bagi provinsi Kalimantan Barat:

a. Pusat Ekonomi dan Perdagangan Regional

Singkawang adalah salah satu pusat ekonomi yang penting di Kalimantan Barat. Kota ini menjadi pusat perdagangan bagi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari daerah sekitarnya. Keberadaan pasar tradisional, toko-toko, dan pusat perbelanjaan modern di Singkawang membantu mendukung perekonomian regional.

b. Destinasi Wisata Utama

Singkawang dikenal sebagai tujuan wisata budaya dan religi di Kalimantan Barat. Banyaknya kelenteng dan acara budaya seperti Festival Cap Go Meh menarik wisatawan domestik dan internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Barat ke dunia luar.

c. Keragaman Budaya

Singkawang adalah contoh kota dengan keragaman etnis dan budaya yang harmonis, dengan populasi yang terdiri dari Tionghoa, Melayu, Dayak, dan lainnya. Kota ini menjadi simbol toleransi dan kerukunan di Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa berbagai kelompok etnis dapat hidup bersama secara damai.

d. Pusat Pendidikan dan Kesehatan

Singkawang menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang penting bagi wilayah sekitarnya. Sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit di Singkawang melayani kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, meningkatkan kualitas hidup mereka.

e. Infrastruktur dan Transportasi

Letak geografis Singkawang yang strategis menjadikannya sebagai penghubung transportasi antara berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Infrastruktur jalan yang baik dan akses ke jalur transportasi laut membantu menghubungkan kota-kota lain di provinsi ini, mempermudah distribusi barang dan mobilitas penduduk.

f. Kontribusi Sosial dan Budaya

Singkawang sering menjadi tuan rumah berbagai acara sosial dan budaya yang penting, yang membantu memperkuat identitas budaya Kalimantan Barat. Acara-acara ini juga mempromosikan solidaritas dan kebanggaan regional.

Pengembangan kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042, pengembangan kawasan lindung di Kota Singkawang yang direncanakan adalah :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan lindung gambut yang memiliki luas kurang lebih 287 ha terletak di Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sedau.
- b. Kawasan perlindungan setempat yang memiliki luas kurang lebih 397 ha terletak di sekitar Sungai Acoi, Sungai Garam, Sungai Merah, Sungai Pasi, Sungai Sedau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Transad, Sungai Wie, Sungai Singkawang, Danau Serantangan, Danau Biru dan kawasan pantai di Kecamatan Singkawang Selatan.
- c. Ruang terbuka Hijau memiliki luas 7.749 ha terdiri atas rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan dan pemakaman.
- d. Rimba Kota memiliki luas kurang lebih 7.355 ha terletak di Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sedau, dan Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor Kecamatan Singkawang Timur, Kelurahan Naram, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam Hilir, dan Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara.
- e. Taman Kota yang memiliki luas kurang lebih 221 ha terletak di Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Besar, dan Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara, Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat,

Kelurahan Roban, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah

Pengembangan kawasan konservasi yang direncanakan adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) cagar alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 2.479 ha dan pengembangan kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 137 ha di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Setapak Besar, dan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara dan kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Strategi yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 6 adalah :

- a. menyelenggarakan upaya terpadu;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
- g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

Sebagai salah satu implementasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota, Pemerintah Kota Singkawang menaruh perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan budidaya yang diarahkan pada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang

telah ditetapkan dalam RTRW Kota Singkawang Tahun 2022-2042, dimana kawasan budidaya tersebut terdiri dari kawasan Pemeliharaan dan pengembangan badan jalan, Pengembangan kawasan hutan produksi, Pertanian, Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Pariwisata, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, Transportasi, Pertahanan dan Keamanan,

2.1.1.7.Potensi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Air: Kota Singkawang memiliki beberapa sungai, seperti Sungai Singkawang, Sungai Kaliasin, dan Sungai Seluang, yang mengalirkan air yang segar dan dapat digunakan untuk irigasi, pertanian, dan industri.

Hutan: Kota Singkawang memiliki beberapa hutan yang memiliki potensi besar sebagai sumber daya alam. Hutan-hutan ini dapat digunakan sebagai sumber kayu, bambu, dan lain-lain.

Galian: Kota Singkawang memiliki beberapa galian, seperti batu, pasir, dan kerikil, yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan, industri, dan lain-lain.

Bahan Bakar: Kota Singkawang memiliki beberapa sumber daya bahan bakar, seperti Breaket dan kayu, yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk industri, rumah tangga, dan lain-lain.

Ikan: Sungai-sungai di Kota Singkawang memiliki beberapa spesies ikan yang dapat dipancing dan dikonsumsi.

Bunga-Bunga: Kota Singkawang memiliki beberapa jenis bunga yang unik dan langka, seperti bunga rafflesia dan bunga padma, yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan atau hibah.

Pasir Tambang: Kota Singkawang memiliki beberapa tambang pasir yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan industri.

Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mempertahankan keberlangsungan sumber daya alam tersebut.

Dalam mengelola sumber daya alam, Pemerintah Kota Singkawang telah mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab.

Pembukaan Tempat-Tempat Wisata Alam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam.

Pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, Kota Singkawang berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab untuk mempertahankan keberlangsungan sumber daya alam tersebut.

2.1.1.8. Kondisi Lingkungan Hidup

2.1.1.8.1. Kualitas Air Sungai

Penurunan kualitas air di Kota Singkawang disebabkan oleh sejumlah faktor pendorong, termasuk peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan industri. Sementara itu, berbagai aktivitas yang memiliki potensi untuk memengaruhi kualitas dan kuantitas air mencakup sanitasi dan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS), pertumbuhan sektor industri, dan kegiatan pertanian. Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang pada tahun 2022, sebanyak 820 kepala keluarga masih menggunakan fasilitas pembuangan air besar yang turut berkontribusi pada penurunan kualitas sungai. Selain itu, catatan menunjukkan adanya banyak keluhan dari masyarakat terkait pencemaran sungai yang berasal dari sektor industri, seperti limbah peternakan ayam, limbah industri mal, dan limbah dari restoran atau rumah makan.

2.1.1.8.2. Daya Tampung Sampah

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk yang mendorong aktivitas masyarakat perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. Perlu diberikan perhatian ekstra terhadap pengembangan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan limbah padat, karena hal ini dapat berdampak pada kondisi kesehatan lingkungan. Laju timbulan sampah di Kota Singkawang mencapai 0,395 kg/orang/hari. Oleh karena itu, dapat diestimasikan bahwa jumlah timbulan sampah pada tahun 2022 mencapai sekitar 94.553,92 kg/hari atau sekitar 95 ton/hari. Dari total rata-rata timbulan sampah sebesar 95 Ton/hari, sekitar 79,32% diantaranya telah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wonosari, mencapai ±75 Ton/hari. Sampah yang tiba di TPA Wonosari hanya mengalami pengolahan sebagian kecil,

menggunakan metode pengomposan untuk sampah organik dan pyrolysis untuk sampah non-organik. Jumlah sampah yang berhasil diolah setiap hari hanya sekitar 0,32%, setara dengan 300 kg per hari.

2.1.2. Aspek Demografi

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis, dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Data demografi Kota Singkawang tahun 2024 berdasarkan BPS Kota Singkawang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.7.

Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah, Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Rasio Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Singkawang Selatan	4	224,48	58.294	259,68	109	2,20
2	Singkawang Timur	5	166,26	24.177	145,42	111	1,25
3	Singkawang Utara	7	66,65	33.503	502,67	103	2,87
4	Singkawang Barat	4	15,04	56.987	3.789,03	102	0,98
5	Singkawang Tengah	6	31,57	73.151	2.317,10	102	1,45
Jumlah/ Total		26	504,00	246.112	488,32	105	1,68

Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

Tabel 2.8.**Banyaknya RT dan RW Menurut Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2024**

No	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
1	Singkawang Selatan	4	124	25
2	Singkawang Timur	5	62	20
3	Singkawang Utara	7	89	38
4	Singkawang Barat	4	140	36
5	Singkawang Tengah	6	174	42
Jumlah/ Total		26	587	161

Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

Tabel 2.9.

**Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang (dalam %)
Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Tenaga Kerja (15 Thn+) (Jiwa)	159.726	167.844	171.213	174.565	180.183
2	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	21.646	60.692	61.099	n/a	60.177
3	Angkatan Kerja (Jiwa)	106.963	107.152	110.114	120.202	120.006
	TPAK (%)	66,97	63,84	64,31	68,86	66,60
4	Bekerja (Jiwa)	106.963	107.152	110.114	120.202	109.789
5	Menganggur (Jiwa)	8.523	9.411	10.082	10.369	10.217
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,44	8,78	9,16	8,63	8,51

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

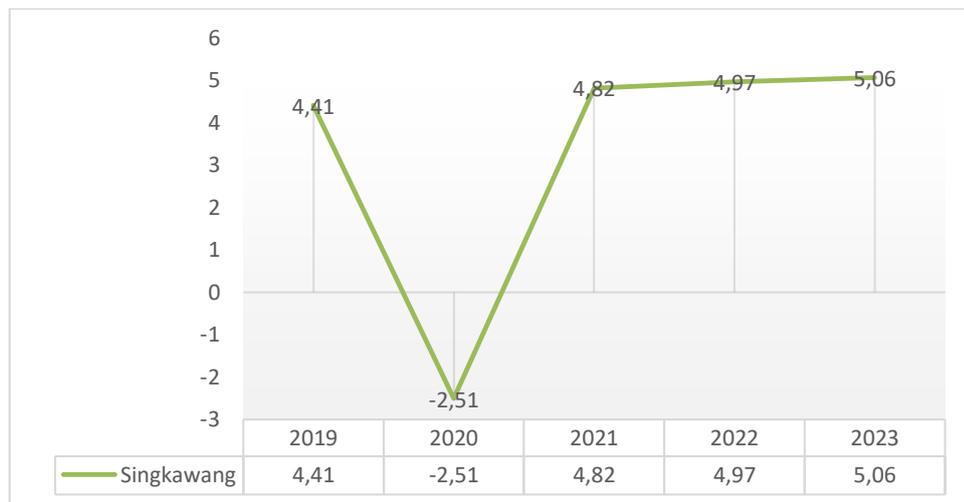
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tren umum menunjukkan adanya pola pemulihan yang jelas setelah kontraksi ekonomi yang tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID19. Setelah penurunan tersebut, laju pertumbuhan ekonomi kembali pulih dengan tren pertumbuhan positif dari tahun 2021 hingga 2023. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa di Kota Singkawang. Hal ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah pemulihan yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan besar pada tahun 2020, ekonomi Kota Singkawang menunjukkan pemulihan mengesankan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2019-2023 berdasarkan data BPS dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.1.2. Indeks Gini

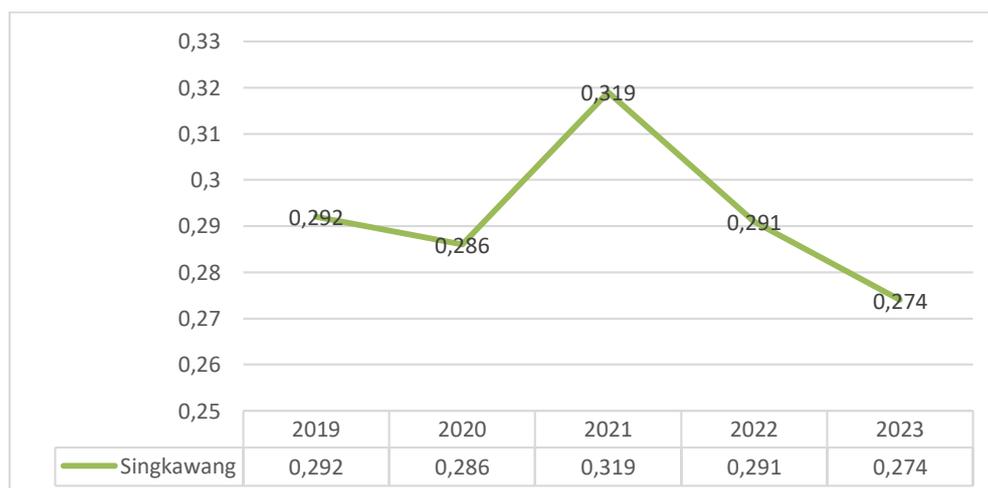
Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk adalah rasio gini atau indeks gini. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan

tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Data menunjukkan adanya fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan selama periode 2019-2023, dengan peningkatan ketimpangan pada 2021 dan perbaikan signifikan setelahnya. Peningkatan dan penurunan ketimpangan, Lonjakan ketimpangan pada 2021 kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pemulihan ekonomi yang tidak merata setelah pandemi. Namun, langkah-langkah kebijakan yang efektif telah berhasil menurunkan ketimpangan secara signifikan pada 2022 dan 2023. Kesetaraan pendapatan, Penurunan Indeks Gini pada 2022 dan 2023 mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kesetaraan pendapatan di Kota Singkawang. Ini bisa disebabkan oleh program-program yang mendukung inklusivitas ekonomi, seperti peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang ditargetkan. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam bentuk peningkatan ketimpangan pada 2021, data menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dimana indeks gini Kota Singkawang masuk dalam kategori rendah. Hal ini mencerminkan peningkatan kesetaraan dan keadilan ekonomi di wilayah tersebut.

Data Indeks Gini Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 berdasarkan data BPS ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 2.4.
Indeks Gini Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.1.3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin di Kota Singkawang tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatannya menjadi berkurang. Namun dalam kurun 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023, angka kemiskinan Kota Singkawang mengalami penurunan yakni 4,67% di tahun 2022 walaupun kemudian meningkat sedikit menjadi 4,70 % pada tahun 2023.

Data persentase penduduk miskin Kota Singkawang dari tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.5.

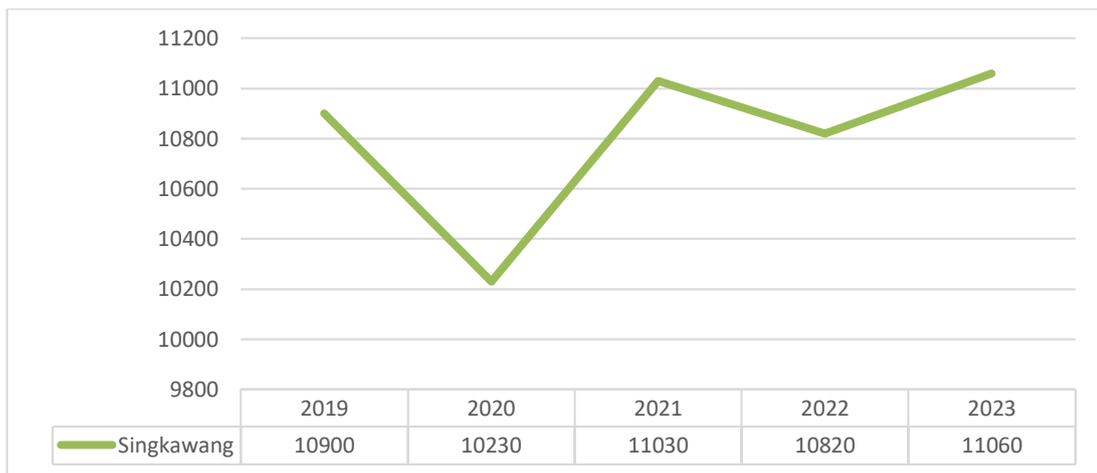
**Persentase Penduduk Miskin Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sedangkan data jumlah penduduk miskin Kota Singkawang dari tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

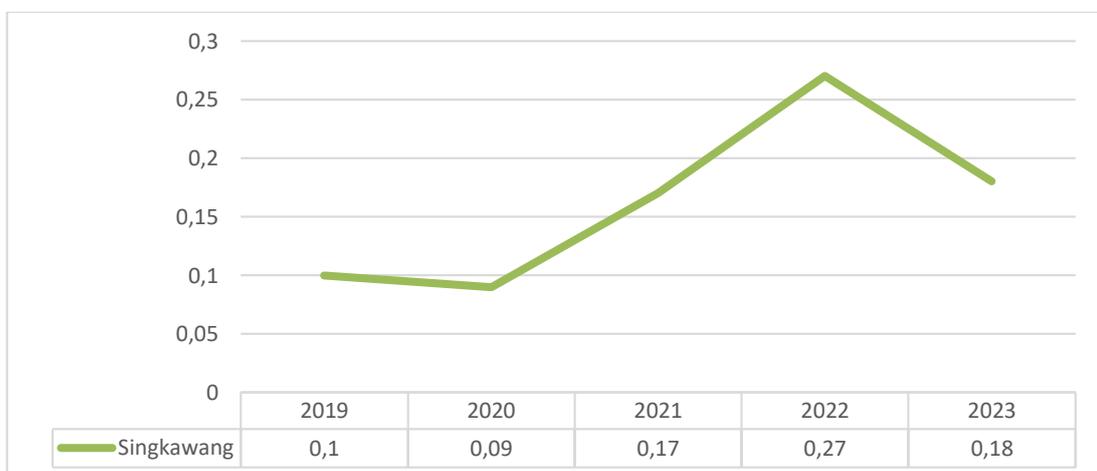
Grafik 2.6.
Jumlah Penduduk Miskin Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Data Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Singkawang dari tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.7.
Indeks Keparahan Kemiskin Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (Poin)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

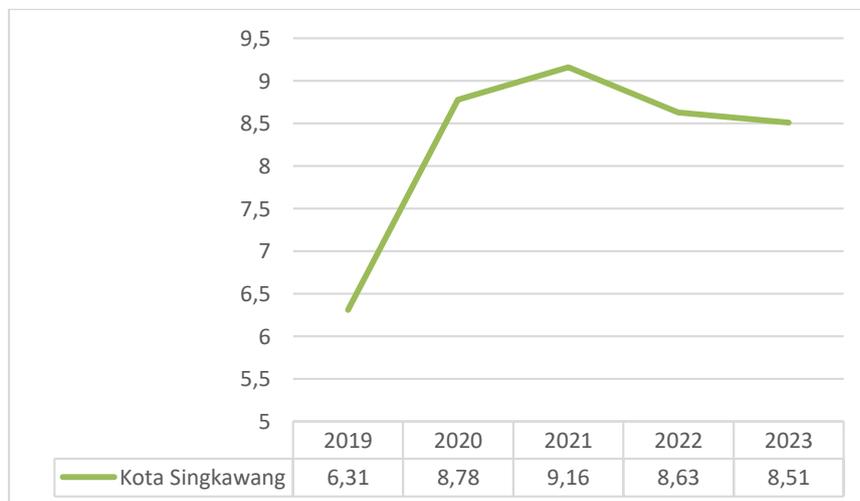
2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja – 15 tahun ke atas). Menurut BPS, pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Dari 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 lebih besar dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,16%. Hal ini disebabkan tahun 2021 adanya pandemi Covid-19 dan banyak karyawan perusahaan yang dirumahkan atau diberhentikan. Tetapi berangsur membaik pada tahap pemulihan ekonomi tahun 2022 dan 2023.

Persentase Tingkat Pengangguran (TPT) Kota Singkawang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.8.
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

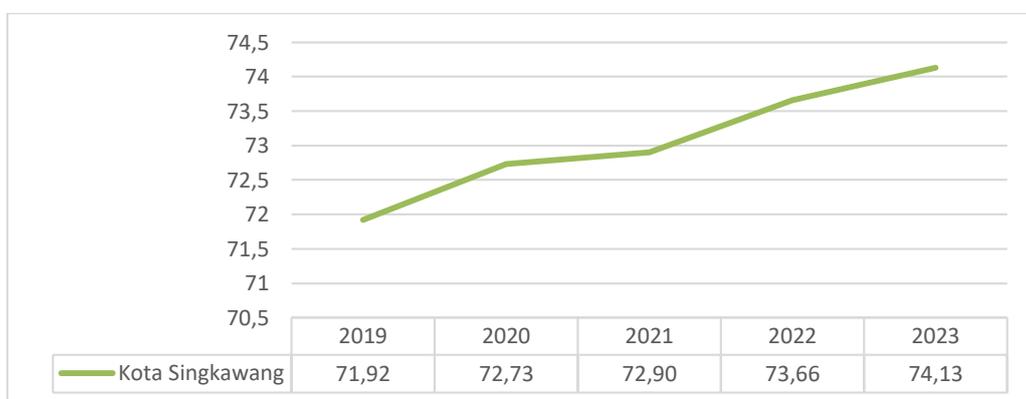
2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/ keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Serta dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengetahuan per kapita. BPS mengelompokkan capaian IPM menjadi empat kategori yaitu Rendah ($IPM < 60$); Sedang ($60 \leq IPM \leq 70$); Tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), dan Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Singkawang terus meningkat dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 nilai IPM Kota Singkawang sebesar 71,72, mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1,01 menjadi 72,73. Selanjutnya terjadi peningkatan lagi sebesar 0,17 pada tahun 2021 menjadi 72,90. Mengalami peningkatan sebesar 0,76 di tahun 2022 menjadi 73,66. Dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 0,47 menjadi 74,13.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.9.
Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

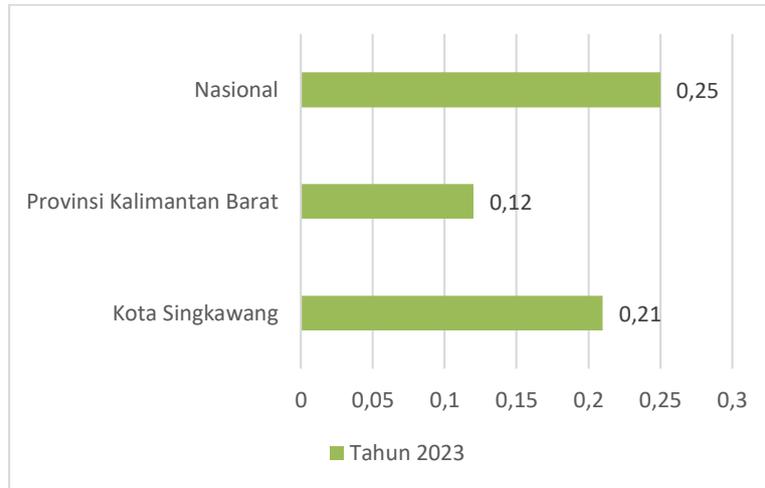
2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual yang optimal. IKS merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, pra sehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat $> 0,80$, IKS Prasehat $0,50-0,80$, dan IKS Tidak Sehat $< 0,5$.

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menerapkan 12 indikator keluarga sehat. 12 Indikator yang menyusun IKS, yaitu: Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap; Bayi mendapat ASI eksklusif; Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar; Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan; Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan; Anggota keluarga tidak ada yang merokok; Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih; dan Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih.

Data Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Singkawang yang tersedia hanya pada tahun 2023 sebesar 0,21. Sedangkan nilai IKS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 sebesar 0,12, dan Nasional sebesar 0,25. Data IKS Kota Singkawang lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Barat, namun lebih rendah dibanding Nasional. Secara keseluruhan IKS Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2023 masuk dalam IKS Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.10.
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
dan Nasional Tahun 2023 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2023

2.2.3. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga. IKK diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50-75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak).

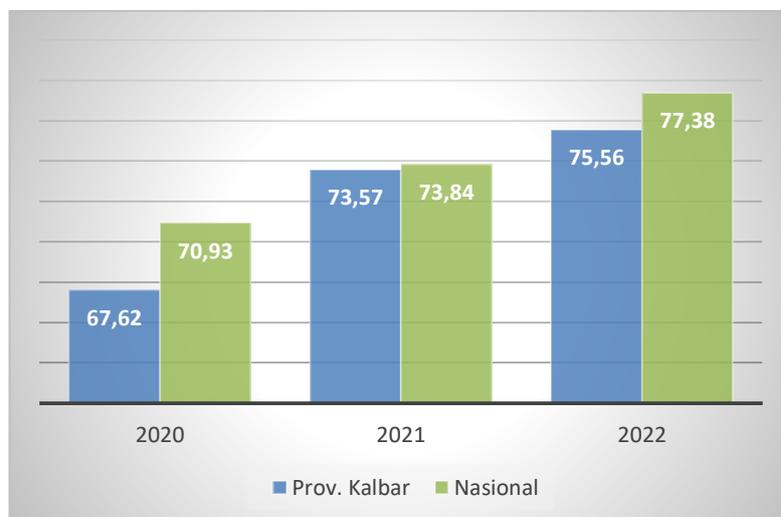
Terdapat 25 indikator dan 5 (lima) dimensi pembentukan IKK, antara lain: (1) Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) terdiri dari 2 indikator yaitu akta kelahiran anak dan keluarga tinggal bersama; (2) Dimensi Kualitas Keluarga Fisik (KKF) terdiri atas 6 indikator yaitu makan makanan sehat bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, tempat tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu; (3) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas 6 indikator yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi kesehatan, anak putus

sekolah, dan perempuan bekerja; (4) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas 5 indikator yaitu kekerasan terhadap anak, menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orang tua (indikator dobel); dan (5) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) terdiri atas 6 indikator yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, tinggal bersama lansia, melakukan kegiatan keagamaan, dan adanya akses internet.

Data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kota Singkawang tidak tersedia. Hanya IKK Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional yang tersedia. Untuk IKK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai IKK Provinsi Kalimantan Barat sebesar 67,62 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen menjadi 73,57. Dan meningkat lagi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,99 persen menjadi 75,56. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 2,91 dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,84 pada tahun 2021. Dan meningkat lagi pada tahun 2022 sebesar 3,54 persen menjadi 77,38. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11.

**Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
Tahun 2020-2022 (%)**



**Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024
(Diolah) (<https://www.kemennpppa.go.id/page/view/NTAyMO==>)**

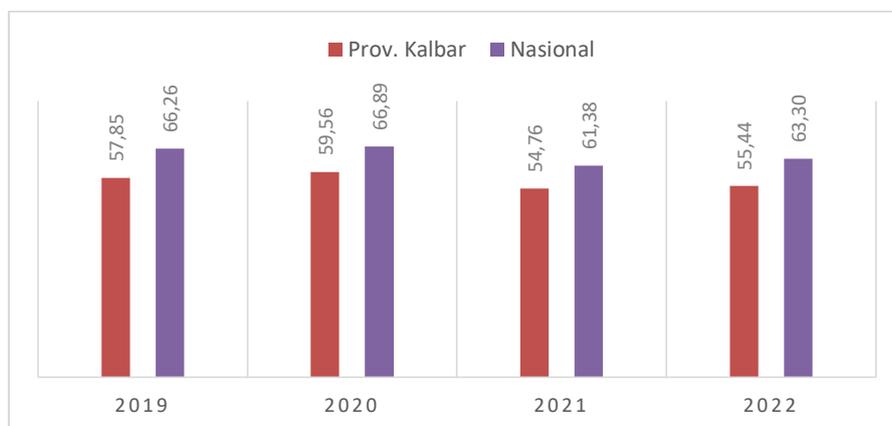
2.2.4. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Selanjutnya IPKA merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar.

Data IPA untuk Kota Singkawang tidak tersedia. Nilai IPA Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2019-2022 nilai IPA Provinsi Kalimantan Barat mengalami perkembangan positif namun pada tahun 2021 terjadi penurunan IPA. Nilai IPA tertinggi Provinsi Kalimantan Barat terjadi pada tahun 2020 sebesar 59,56, yang kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 54,76, kemudian naik lagi di tahun 2022 menjadi 55,44. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai IPA Nasional. Nilai IPA Nasional mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2020 sebesar 66,89, dan turun pada tahun 2021 menjadi 61,38, dan kemudian naik lagi di tahun 2022 menjadi 63,30. Namun secara keseluruhan IPA Provinsi Kalimantan Barat dibawah nilai IPA Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12.

**Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
Tahun 2019-2022 (%)**



*Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019-2022
(<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mzg=>)*

2.2.5. Indeks Gender

Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

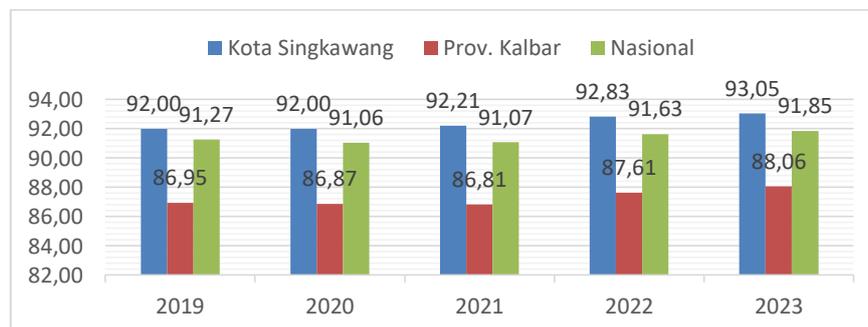
2.2.5.1. Indeks Pembangunan Manusia-Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia-Gender biasa disingkat IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG yaitu perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Adapun hasil indeks ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 menjadi patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah ($IPG < 90,00$) dan tinggi ($IPG > 90,00$).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 menunjukkan kenaikan dan masuk dalam kategori tinggi. Begitu juga dengan IPG Nasional menunjukkan kenaikan namun di tahun 2020 mengalami penurunan, namun masih masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan IPG Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.13.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Diolah) (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>)

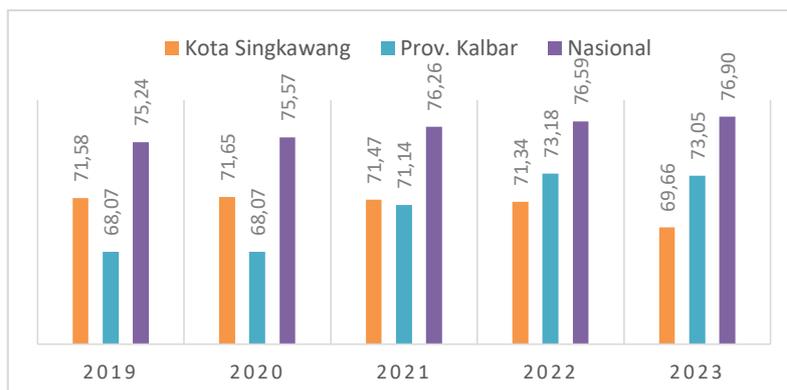
2.2.5.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG dihitung melalui rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Badan Pusat Statistik merumuskan hasil analisis ke dalam skor 0-100 poin, dengan kategori pilihan Rendah ($IDG < 50$); Sedang ($50 \leq IDG < 60$); Tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$); dan Sangat Tinggi ($IDG > 80$).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang cenderung menurun dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2019-2023 yang selalu naik. Tahun 2019-2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang mengalami kenaikan dari 71,58 menjadi 71,65. Kemudian di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dari 71,47 menjadi 69,66. Sedangkan IDG Provinsi dan Nasional pada tahun 2019-2022 cenderung naik setiap tahunnya dan menurun di tahun 2023. Namun secara garis besar nilai IDG Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional masuk kedalam kategori tinggi, keterlibatan perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi masuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html>)

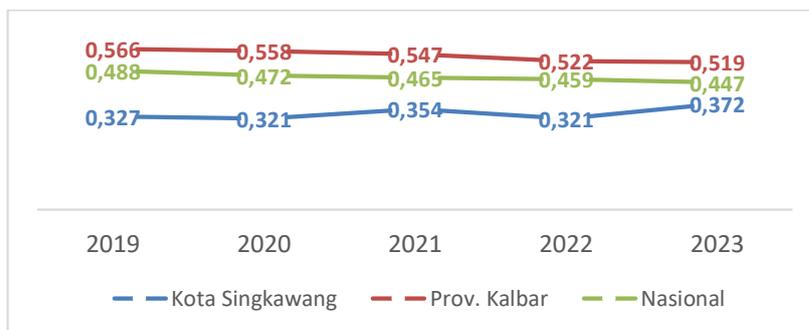
2.2.5.3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender, dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai IKG Kota Singkawang tahun 2019 sebesar 0,327, tahun 2020 turun menjadi 0,321, tahun 2021 naik menjadi 0,354, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,321, dan tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,372. Dan Nilai IKG Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional cenderung menurun dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 nilai IKG Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,566, sempat naik di tahun 2020 menjadi 0,558 dan turun kembali di tahun 2021-2023 menjadi 0,519. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan semakin membaik. Nilai IKG Kota Singkawang lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKG Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.15.

**Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

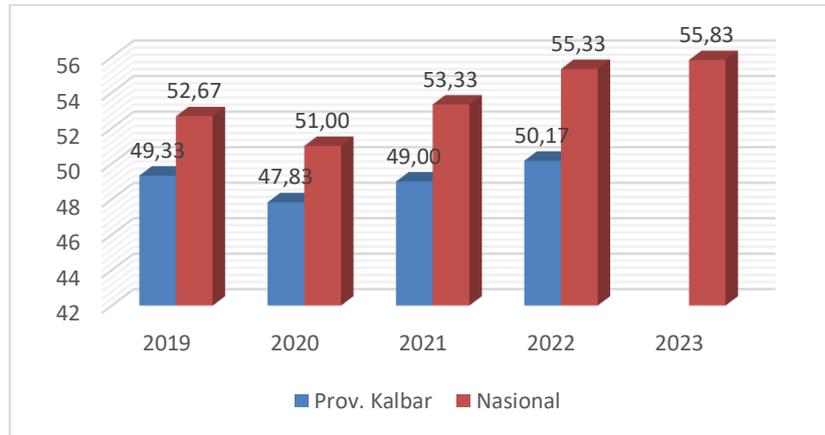
(<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender--ikg--2022.html>)

2.2.6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan yang dipetakan dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunan. 5 (lima) domain tersebut antara lain: Pendidikan (dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah; APK Sekolah Menengah; APK Perguruan Tinggi), Kesehatan dan Kesejahteraan (dengan indikator Angka Kesakitan Pemuda; Persentase Korban Kejahatan; Persentase Pemuda yang Merokok; Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil); Lapangan dan Kesempatan Kerja (dengan indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih; Tingkat Pengangguran Terbuka), Partisipasi dan Kepemimpinan (dengan indikator Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan; Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi; Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat), Gender dan Diskriminasi (dengan indikator Angka perkawinan usia anak; Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan Tingkat SMA ke atas; dan Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

Kondisi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Singkawang tidak tersedia. Nilai IPP Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, hanya di tahun 2020 yang mengalami penurunan. Namun Nilai IPP Provinsi Kalimantan Barat masih dibawah nilai nasional, dan nilai IPP Kalimantan Barat tahun 2023 belum dapat diketahui. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.16.
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga,
[https://ipp.sarikata.com/#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Pemuda%20\(IPP\)%20adalah,kemajkem%20pembangunan%20pemuda%20di%20Indonesia](https://ipp.sarikata.com/#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Pemuda%20(IPP)%20adalah,kemajkem%20pembangunan%20pemuda%20di%20Indonesia)

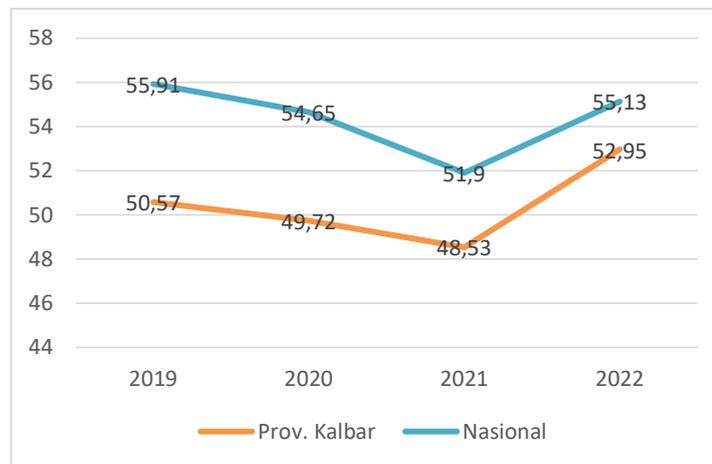
2.2.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Kriteria capaian IPK adalah $IPK \leq 20$ (Kurang), $20 < IPK \leq 40$ (Sedang), $40 < IPK \leq 60$ (Cukup), $60 < IPK \leq 80$ (Baik), $80 < IPK \leq 100$ (Amat Baik).

Data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk Kota Singkawang tidak tersedia. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2019-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020-2021, dan meningkat kembali di tahun 2022 seiring dengan berakhirnya pandemi covid-19. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional masuk kategori Cukup ($40 < IPK \leq 60$). Dan Nilai

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Barat masih di bawah Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.17.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2022 (%)



Sumber : Kementerian Pendidikan, Kementerian PPN/ Bappenas, Badan Pusat Statistik, 2024 (<https://ipk.kemdikbud.go.id/>)

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau PDRB nominal disusun menggunakan harga pada tahun berjalan sehingga mampu menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada periode tersebut. Pada umumnya PDRB ADHB digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB ADHB merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). PDRB ADHB

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun berjalan. Persentase distribusi PDRB ADHB menunjukkan struktur perekonomian di suatu wilayah.

Metode perhitungan PDRB yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain:

a. Pendekatan Produksi

Komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi lapangan usaha. Pendekatan ini sering dikenal dengan PDRB menurut lapangan usaha;

b. Pendekatan Pengeluaran

Komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut komponen penggunaannya. Pendekatan ini sering dikenal dengan PDRB menurut pengeluaran.

Metode pendekatan perhitungan PDRB, antara lain:

a. Pendekatan produksi;

b. Pendekatan pendapatan;

c. Pendekatan pengeluaran

Struktur perekonomian Kota Singkawang dapat ditinjau dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada PDRB ADHB. Nilai distribusi tersebut dapat menunjukkan besaran kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kota Singkawang. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor lapangan usaha dalam suatu wilayah. Sektor lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Selama tahun 2019-2023, distribusi PDRB Kota Singkawang terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri; Pengolahan; Pertanian Kehutanan dan Perikanan.

Pada tahun 2023, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Singkawang didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan persentase sebesar 20,30%. Sumbangan terbesar berikutnya pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 17,11%; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 13,25%; dan lapangan usaha pertanian, kehutanan,

dan perikanan sebesar 11,32%. Sedangkan lapangan usaha dengan nilai kontribusi paling kecil terhadap PDRB tahun 2023 adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dengan nilai kontribusi sebesar 0,17%.

Nilai kontribusi di atas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Singkawang sudah tidak bergantung pada sektor primer, melainkan sudah bergeser pada sektor sekunder. Selama tahun 2020-2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor utama yang membentuk struktur perekonomian dan menjadi sektor unggulan di Kota Singkawang.

2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) atau PDRB riil disusun menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

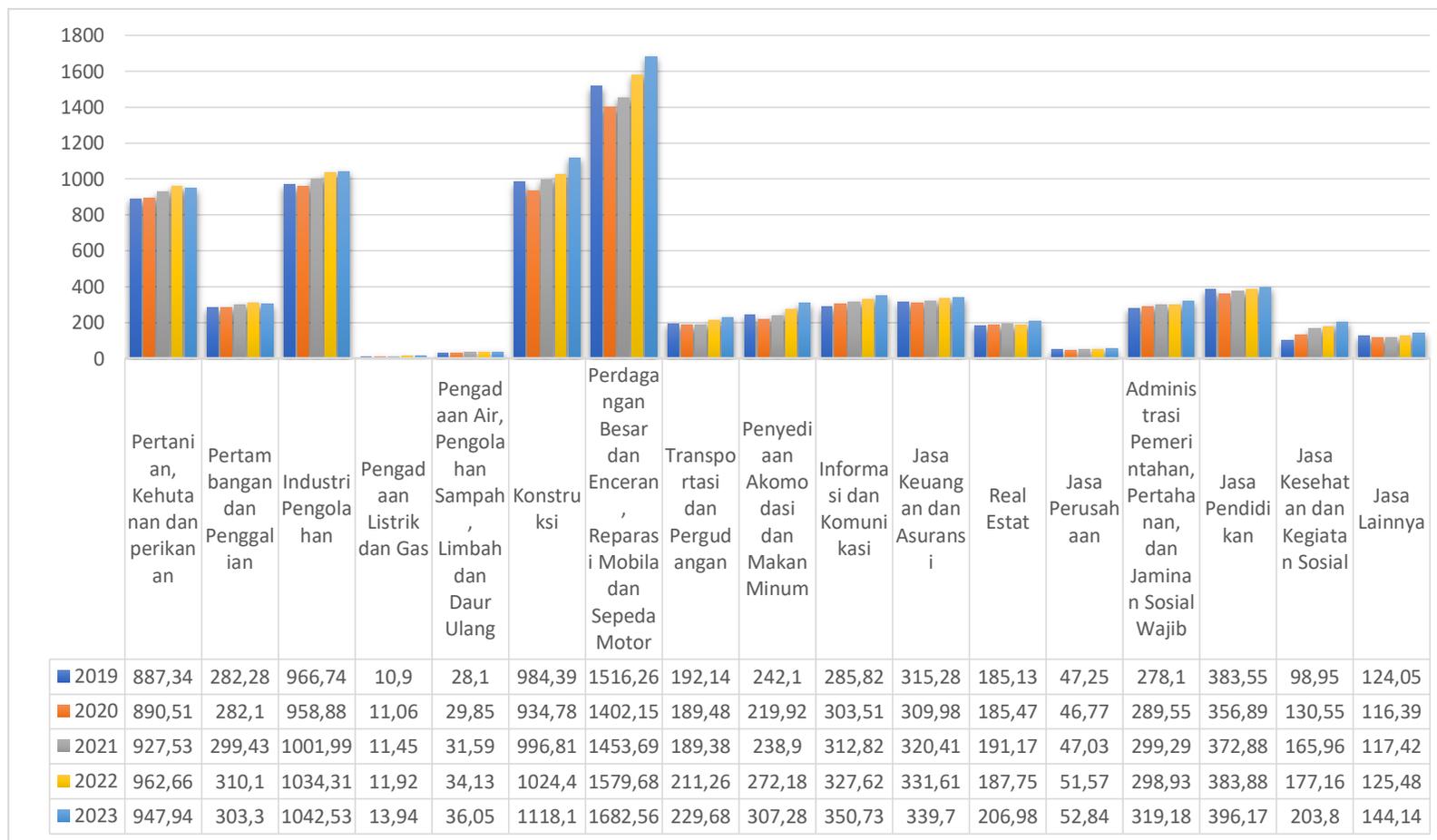
Tabel 2.10.

PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	887,34	3,89	890.51	0.36	927.53	4.16	962,66	3,79	947,94	-1,53
2	Pertambangan dan Penggalian	282,28	3,35	282.1	-0.06	299.43	6.14	310,10	3,56	303,30	-2,19
3	Industri Pengolahan	966,74	5,58	958.88	-0.9	1001.99	4.58	1.034,31	3,22	1.042,53	0,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,90	2,61	11.06	1.46	11.45	3.46	11,92	4,18	13,94	16,90
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,10	7,00	29.85	6.21	31.59	5.85	34,13	8,03	36,05	5,62
6	Konstruksi	984,39	2,46	934.78	-5.04	996.81	6.64	1.024,40	2,77	1.118,10	9,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.516,26	6,78	1402.15	-7.53	1453.69	3.68	1.579,68	8,67	1.682,56	6,51
8	Transportasi dan Pergudangan	192,14	5,53	189.48	-1.39	189.38	-0.05	211,26	11,55	229,68	8,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	242,10	6,53	219.92	-9.16	238.9	8.63	272,18	13,93	307,28	12,90
10	Informasi dan Komunikasi	285,82	5,31	303.51	6.19	312.82	3.07	327,62	4,73	350,73	7,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	315,28	-2,50	309.98	-1.68	320.41	3.37	331,61	3,49	339,70	2,44
12	Real Estat	185,13	2,43	185.47	0.19	191.17	3.07	187,75	-1,79	206,98	10,24
13	Jasa Perusahaan	47,25	4,57	46.77	-1.03	47.03	0.57	51,57	9,64	52,84	2,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	278,10	4,37	289.55	4.12	299.29	3.36	298,93	-0,12	319,18	6,77
15	Jasa Pendidikan	383,55	3,02	356.89	-6.95	372.88	4.48	383,88	2,95	396,17	3,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,95	4,92	130.55	31.93	165.96	27.13	177,16	6,75	203,80	15,04
17	Jasa Lainnya	124,05	6,43	116.39	-6.18	117.42	0.89	125,48	6,86	144,14	14,87
	PDRB	6,828,39	4,41	6657.05	-2.51	6977.77	4.82	7.324,63	4,97	7.694,92	5,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2024

Grafik 2.18.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2024

Ekonomi Kota Singkawang tahun 2023 tumbuh sebesar 5,06 persen, lebih cepat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,90 persen; diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,04 persen; Jasa lainnya sebesar 14,87 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,90 persen; dan Real Estate sebesar 10,24 persen. Lapangan Usaha Pengadaan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,51 persen. Sementara itu, kontraksi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sedalam 2,19 persen dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sedalam 1,53 persen.

2.3.1.3. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Indikator lain berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB perkapita adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Dengan demikian PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi. Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak.

Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Hal ini dapat juga digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna

dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Grafik 2.19.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2024

PDRB perkapita Kota Singkawang dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan, di tahun 2019 mencapai Rp 45.886 kemudian di tahun 2020 sempat mengalami penurunan mencapai 0,94% dan meningkat hingga mencapai Rp52.412 di tahun 2023.

Menurut tipologi klassen, wilayah dibagi menjadi empat klasifikasi yang pertama (Kuadran I) wilayah cepat maju dan cepat tumbuh yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Kedua (Kuadran II) wilayah maju tapi tertekan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Ketiga (Kuadran III) wilayah berkembang cepat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Keempat (Kuadran VI) wilayah relatif tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di provinsi.

Tipologi Klassen digunakan untuk mengukur pola dan struktur pertumbuhan

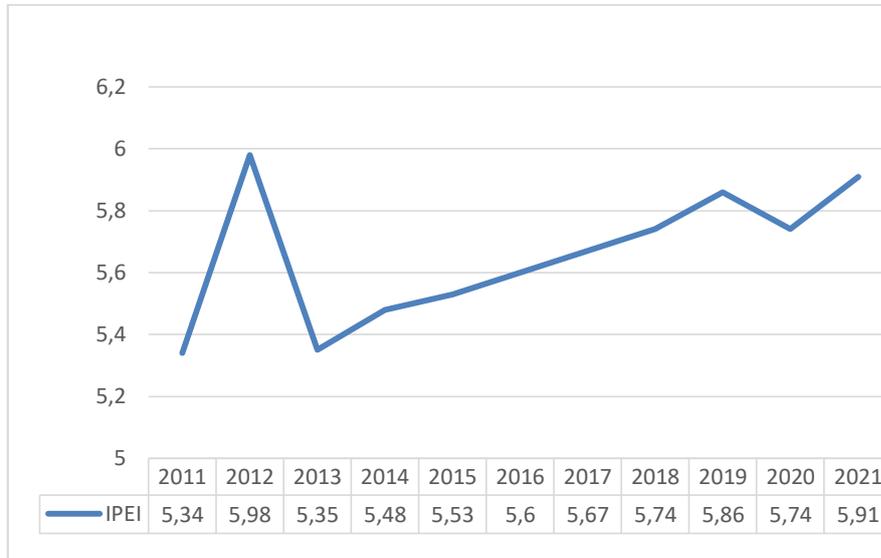
ekonomi Kota Singkawang. Berdasarkan klasifikasi tipologi klassen pada tahun 2022 terdapat enam kategori yang masuk ke dalam kriteria maju dan tumbuh cepat yaitu Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Kategori Real Estate; Kategori Konstruksi; dan Kategori Jasa Keuangan. Sementara itu, kategori yang masuk ke dalam kriteria berkembang cepat yaitu Kategori Pertambangan dan Penggalian serta Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Adapun kategori yang masuk sebagai kategori maju tapi tertekan yaitu Kategori Jasa Pendidikan; Kategori Jasa Lainnya; Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kategori Jasa Perusahaan; Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Kategori Pengadaan Listrik, Gas. Namun demikian, masih ada kategori yang masuk sebagai kategori yang relatif tertinggal yaitu Kategori Transportasi dan Pergudangan; Kategori Informasi dan Komunikasi; dan Kategori Industri Pengolahan

2.3.1.4. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif atau Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan tujuan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

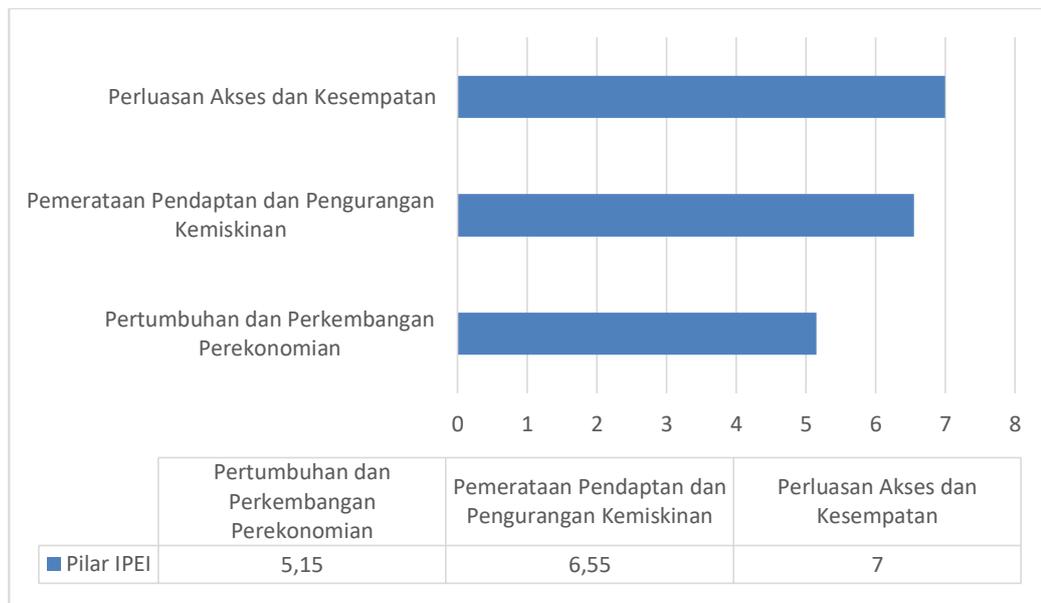
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan dengan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Kriteria capaian IPEI adalah IPEI 1-3 (tidak memuaskan), IPEI 4-7 (memuaskan), IPEI 10 (sangat memuaskan).

Grafik 2.20.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Singkawang
Tahun 2011-2021



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Grafik 2.21.
Nilai Pilar Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kota Singkawang Tahun 2021



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Singkawang pada tahun 2018 sebesar 5,74 meningkat di tahun 2019 sebesar 5,86 dan turun di tahun 2020 yang disebabkan covid-19.

2.3.2. Daya Saing SDM

2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan ini merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

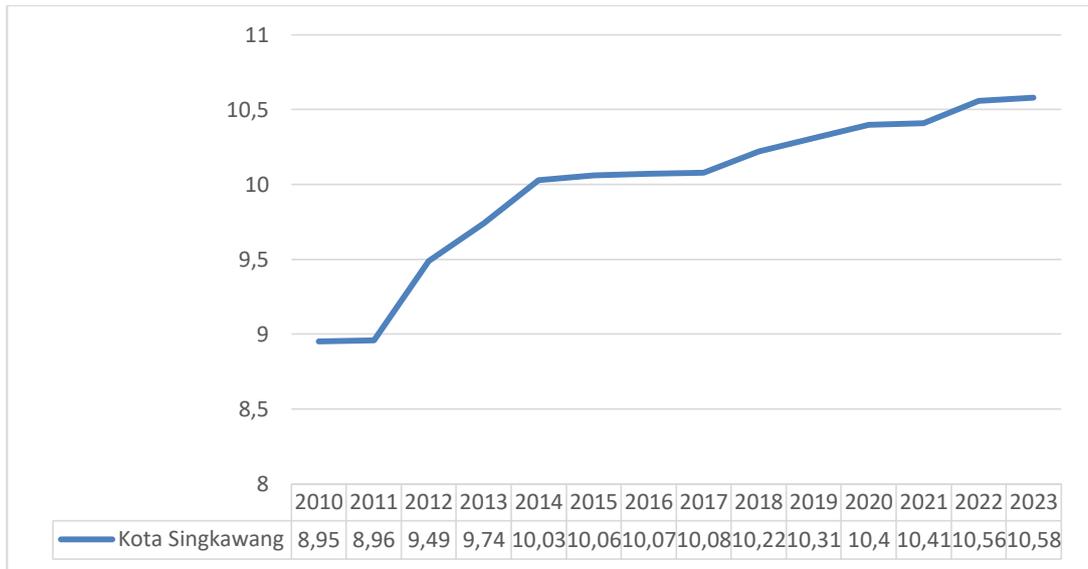
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Indeks Pendidikan Kota Singkawang dihitung menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Singkawang pada tahun 2010-2023 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Indeks Pendidikan Kota Singkawang sebesar 8,95. Dalam kurun waktu 13 tahun nilainya meningkat poin dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kota Singkawang semakin membaik dan terjadi peningkatan kualitas.

Grafik 2.22.

Indeks Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2010-2023

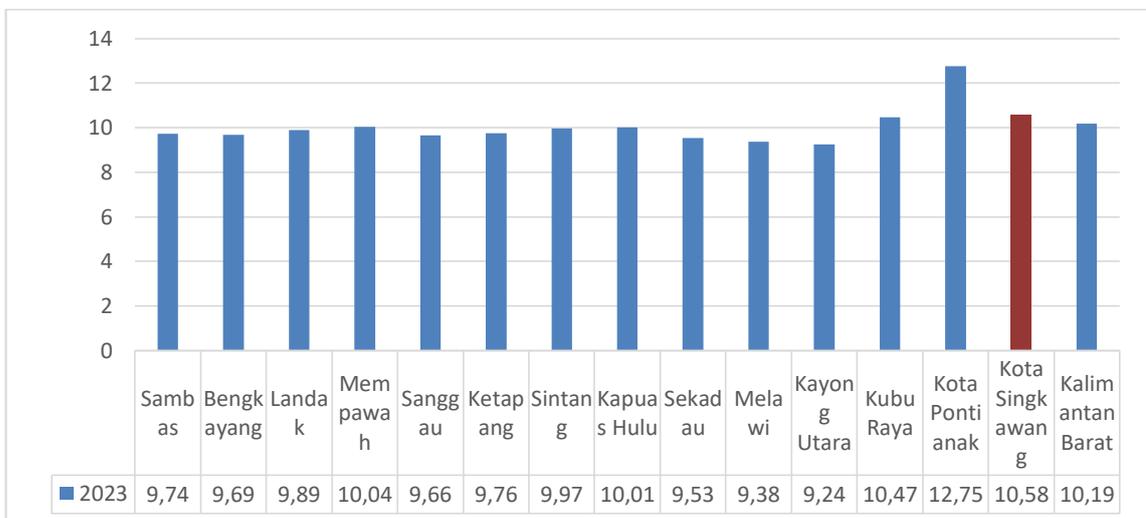


Sumber : BPS Kota Singkawang, 2010-2023

Apabila dibandingkan dengan indeks pendidikan kota di Provinsi Kalimantan Barat, indeks pendidikan Kota Singkawang cenderung tinggi. Pada tahun 2023 indeks pendidikan Kota Singkawang adalah 10,58 dan berada di peringkat ketiga. Pada peringkat kedua ada Kabupaten Kubu Raya dengan nilai indeks pendidikan sebesar 10,47 dan peringkat pertama Kota Pontianak dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 12,75.

Grafik 2.23.

Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2023

2.3.3. Angka Literasi / Numerasi

Literasi Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Menggunakan informasi yang ditampilkan dalam berbagai grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra.

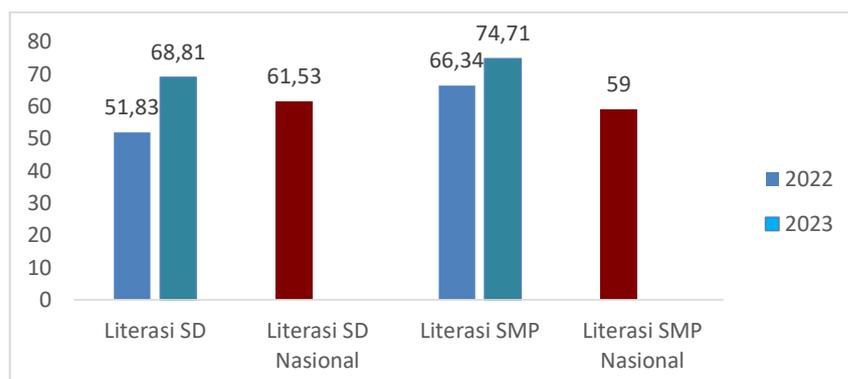
Kemampuan Literasi direfleksikan dengan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra.

Kemampuan Numerasi ialah Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi pada domain Bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan Ketidakpastian.

Angka literasi numerasi Kota Singkawang mengalami peningkatan cukup baik dari tahun 2022 penerapan pertama perhitungan literasi numerasi pada sistem pendidikan Kota Singkawang. Literasi Sekolah Dasar (SD) Umum dengan predikat sedang tahun 2023 mencapai 68,81, naik 16,98 dari 2022 (skor 51,83), sedangkan untuk literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Singkawang tahun 2023 memperoleh predikat baik dengan skor mencapai 74,71, naik 8,37 dari 2022 (skor 66,34).

Grafik 2.24.

Angka Literasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023

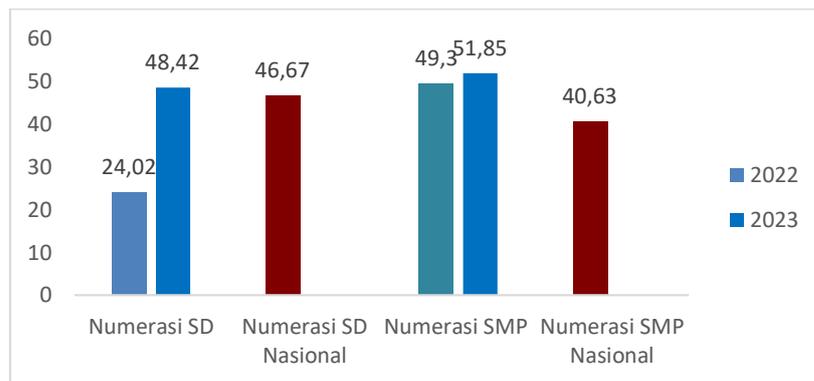


Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

Pada numerasi SD Kota Singkawang tahun 2023 memperoleh predikat Sedang dengan skor 48,42, naik 24,4 dari 2022 (skor 24,02) , sedangkan untuk SMP tahun 2023 dengan predikat Sedang dengan skor 51,85, naik 2,55 dari 2022 (skor 49,3). Dibandingkan daerah lain, Kota Singkawang termasuk Peringkat menengah atas (21 - 40%) secara Nasional.

Grafik 2.25.

Angka Numerasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023



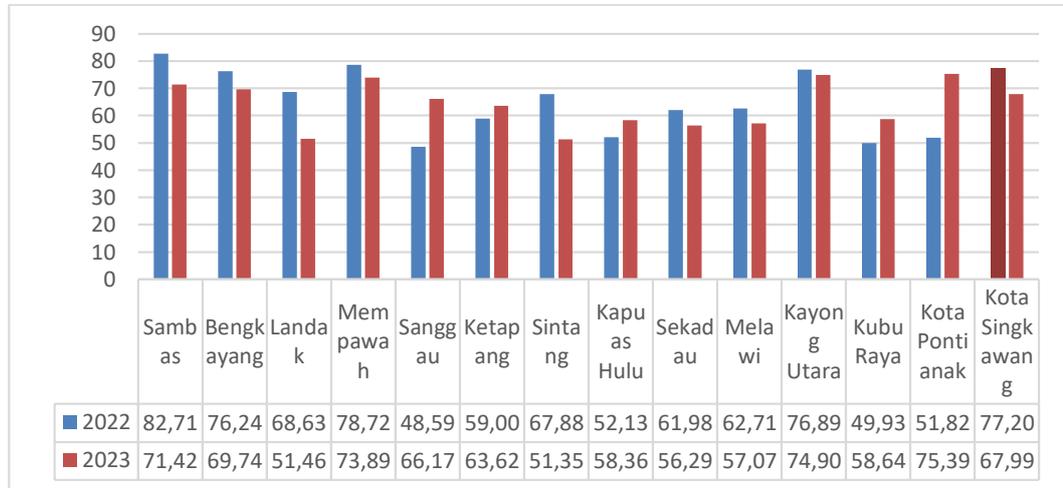
Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diukur dengan 7 unsur yang mencakup : Pemerataan Layanan Perpustakaan; Ketercukupan Koleksi Perpustakaan; Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari; Perpustakaan ber-SNP; Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi; dan Anggota Perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Singkawang tahun 2022 mencapai 77,2% berada di urutan ke-3 setelah Kabupaten Mempawah sebesar 78,72% dan Kabupaten Sambas sebesar 82,71%. Dan ditahun 2023 mengalami penurunan, dan berada pada urutan ke-6 dengan nilai 67,99%.

Grafik 2.26.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kalimantan Barat
Tahun 2022-2023



Sumber : Satu Data Indonesia, 2024

(https://katalog.data.go.id/dataset/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-2021/resource/9c4784c7-f410-4a3e-a627-886f65ac2999?inner_span=True)

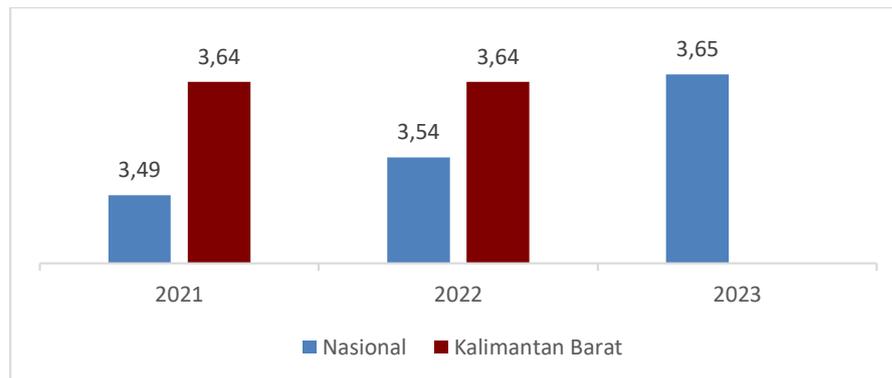
2.3.5. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah pengukuran untuk pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya. Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture.

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54, dan tahun 2023 sebesar 3,65. Dan Indeks Literasi Digital Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebesar 3,64 dan tahun 2023 belum dapat diketahui datanya.

Grafik 2.27.

Indeks Literasi Digital Nasional dan Kalimantan Barat Tahun 2021-2023



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024

2.3.6. Indeks Masyarakat Digital

Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

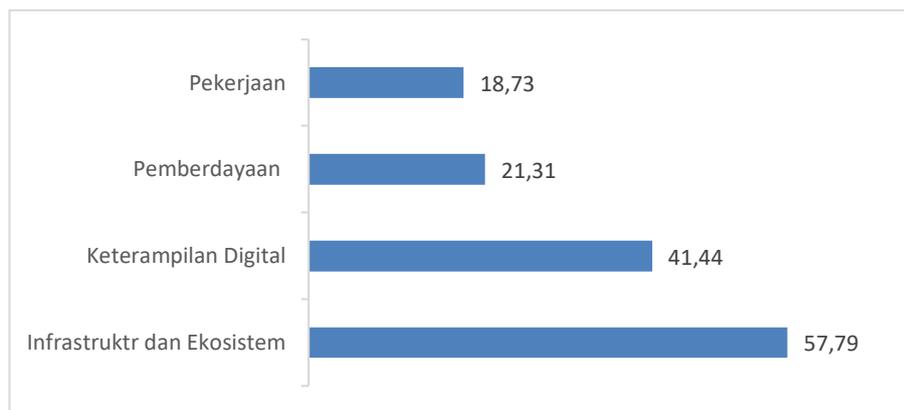
Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-seharinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar 35,47 yang berasal dari rata-rata skor 4 pilar yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem (57,80), pilar keterampilan digital (41,45), pilar pemberdayaan (21,31) dan pilar pekerjaan (18,739). Secara lebih rinci, pilar infrastruktur dan ekosistem memiliki poin paling tinggi yang merupakan pondasi utama dalam menentukan kualitas

ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital yang artinya sebagian besar dari masyarakat Kota Singkawang telah memiliki akses infrastruktur yang baik namun adopsi teknologi digital di sektor pendidikan dan bisnis masih belum merata. Sedangkan nilai terendah ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kota Singkawang memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari.

Grafik 2.28.

Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital Kota Singkawang Tahun 2023



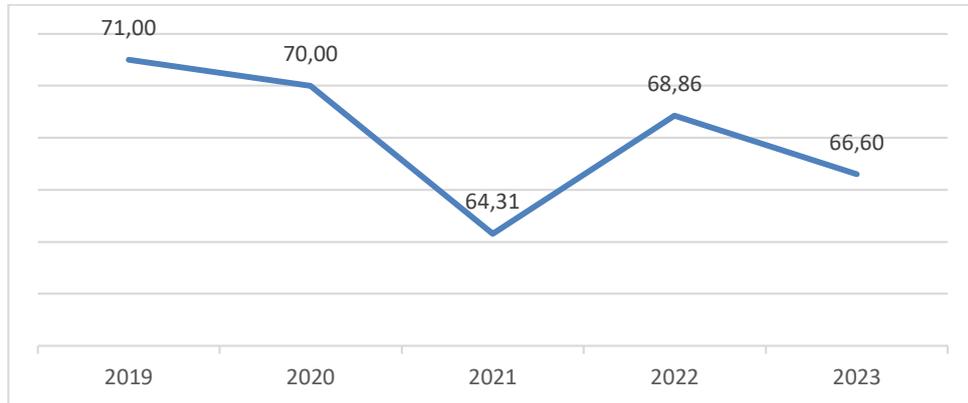
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024

2.3.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. BPS mengelompokkan nilai TPAK menjadi 3 yaitu tinggi (TPAK \geq 70), sedang ($50 < \text{TPAK} < 70$), rendah (TPAK \leq 50) yang mana Kota Singkawang tergolong pada klasifikasi sedang ($50 < \text{TPAK} < 70$).

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Singkawang tahun 2019-2023 mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung turun. Penurunan cukup drastis terjadi pada tahun 2021 yang menyentuh angka 64,31% dan naik turun hingga 2023 mencapai angka 66,60%.

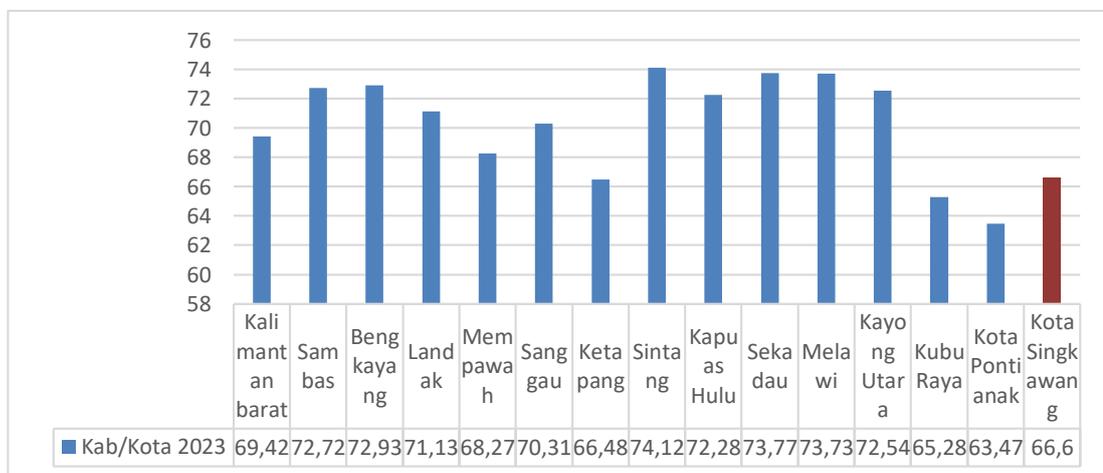
Grafik 2.29.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang (%)
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

Apabila dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, TPAK Kota Singkawang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2023, nilai TPAK Kota Singkawang sebesar 66,6 berada pada urutan ke 11 dari total 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Grafik 2.30.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023



Sumber : SAKERNAS, 2024

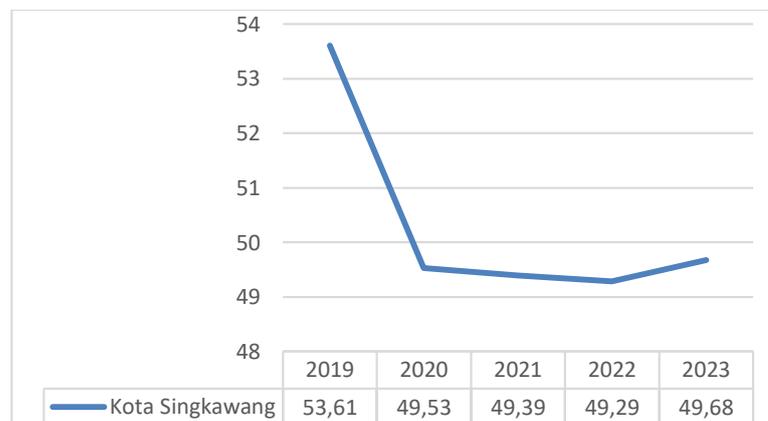
2.3.8.Rasio Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan Kota Singkawang pada tahun 2019-2023 menunjukkan penurunan terus menerus. Pada periode tahun 2019-2023, angka ketergantungan Kota Singkawang menurun dari tahun 2019 sebesar 53,61 menjadi 49,29 pada tahun 2022. Dan naik kembali di tahun 2023 sebesar 49,68.

Grafik 2.31.

Rasio Ketergantungan Kota Singkawang Tahun 2019-2023

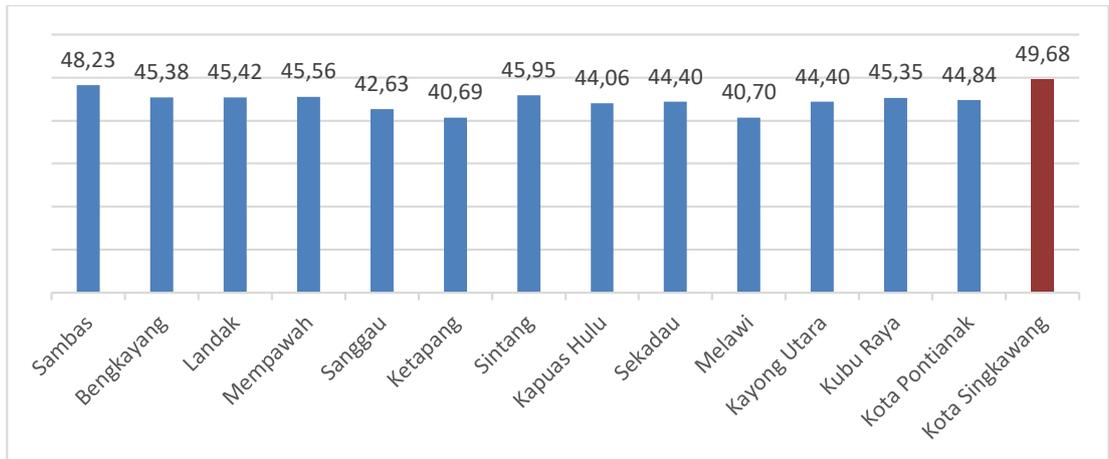


Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2022 angka ketergantungan Kota Singkawang berada di peringkat pertama, dengan angka ketergantungan sebesar 49,29. Pada peringkat kedua ada Kabupaten Sambas dengan angka ketergantungan sebesar 48,07 dan peringkat ketiga adalah kabupaten Sintang sebesar 46,03.

Grafik 2.32.

Rasio Ketergantungan se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Indeks Infrastruktur Daerah (IID)

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau City Development Index (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur Daerah adalah akses air bersih, jalan mantap, drainase dan akses sanitasi.

Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan di suatu kota semakin baik. Secara lebih lengkap data capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kota Singkawang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.

Indeks Infrastruktur Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Indikator IID	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk berakses air minum	38,11	39,74	39,17	40,9	49,08
Persentase Jalan Mantap	50,24	51,36	53,54	58,67	60,257
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	38,38	39,55	19,92	10,45	73,52
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,44	93,78	94,11	94,02	94,22

Sumber : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026

2.3.3.2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur yang tersedia. IKLI merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Indeks ini disusun berdasarkan indeks kepuasan layanan infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur IKLI, antara lain: ketersediaan fisik (*availability*); kualitas fisik (*quality*); kesesuaian (*appropriateness*); efektifitas pemanfaatan (*utility*); penyerapan tenaga kerja (*job creation*); dan kontribusi pada perekonomian. Secara lebih lengkap data indeks kualitas layanan infrastruktur untuk Kota Singkawang belum tersedia.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

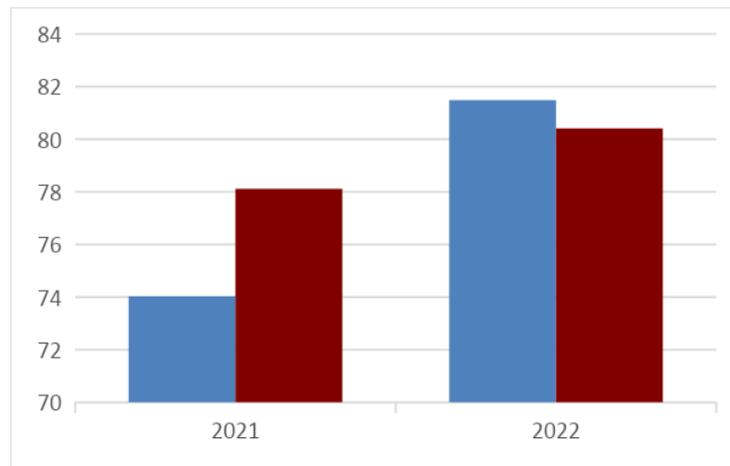
2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Pusat maupun di Daerah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Untuk saat ini pengukuran IDI baru dilaksanakan pada tingkat Nasional dan Provinsi, sehingga data IDI untuk Kota Singkawang belum tersedia. Analisis yang dilakukan akan menggunakan data IDI Nasional dan Kalimantan Barat.

Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021-2022 meningkat cukup signifikan. Dimana pada tahun 2021, IDI Provinsi Kalimantan Barat sebesar 74,03 kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,45 poin menjadi 80,48 pada tahun 2022. Kondisi serupa juga terjadi pada IDI Nasional. Pada tahun 2021 IDI Nasional sebesar 78,12 dan naik menjadi 80,41 pada tahun 2022.

Grafik 2.33.

Indeks Demokrasi Provinsi Terhadap Nasional Tahun 2021-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021-2022

2.3.4.2. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran) adalah indeks yang memperlihatkan bagaimana praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan serta disandingkan dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan. Toleransi adalah pikiran, perasaan dan tindakan yang berhilir pada kedamaian, menghormati yang berbeda, bijaksana dalam memandang nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu.

IKT ditujukan untuk memberikan *baseline* dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial. Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.

Tabel 2.7.
Kota dengan Skor Tertinggi Indeks Kota Toleran Tahun 2023

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
1	Singkawang	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,500
2	Bekasi	6,00	6,55	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,460
3	Salatiga	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,450
4	Manado	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,400
5	Semarang	6,00	6,90	6,50	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,230
6	Magelang	6,00	6,85	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,220
7	Kediri	5,83	6,70	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,073
8	Sukabumi	5,17	6,65	6,50	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	5,997
9	Kupang	5,33	6,85	7,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,953
10	Surakarta	5,50	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,800

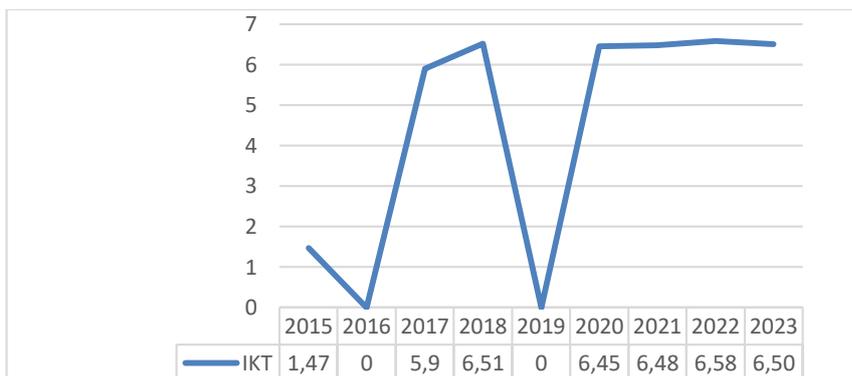
Sumber : Siaran Pers SETARA Institute, 2024

Kota Singkawang menempati posisi pertama Indeks Toleransi tahun 2023 dengan skor 6,500 diikuti Kota Bekasi pada peringkat kedua dengan skor 6,460 dan Kota Salatiga pada peringkat ke tiga dengan skor 6,450.

Indeks Toleransi Kota Singkawang pada tahun 2015-2023 menunjukkan kenaikan yang baik. Secara bertahap, kenaikan indeks toleransi tersebut mengantarkan Kota Singkawang sebagai kota tertoleran 4 tahun berturut- turut oleh Setara Institute sejak tahun 2020–2023 dengan skor akhir pada tahun 2023 mencapai 6,500. Dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.34.

Indeks Toleransi Kota Singkawang Tahun 2015-2023



Sumber : SETARA Institute, 2015-2022

2.3.5. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

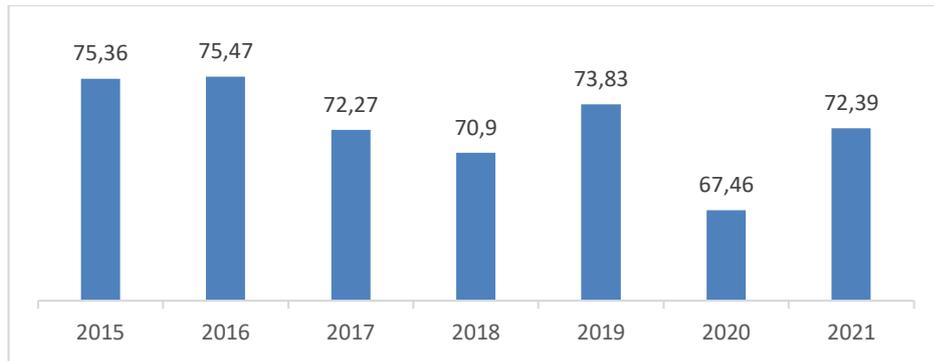
Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan suatu daerah. Dimana stabilitas keamanan tersebut berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban seperti demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketentraman masyarakat. Indeks ini digunakan sebagai salah satu parameter yang digunakan oleh investor ketika akan melakukan penanaman modal di suatu daerah. Secara lebih lengkap Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Singkawang belum tersedia.

2.3.6. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80-100). Data IKUB Kota Singkawang tidak tersedia. Sehingga yang dianalisis adalah IKUB Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

Grafik 2.35.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional Tahun 2015-2021

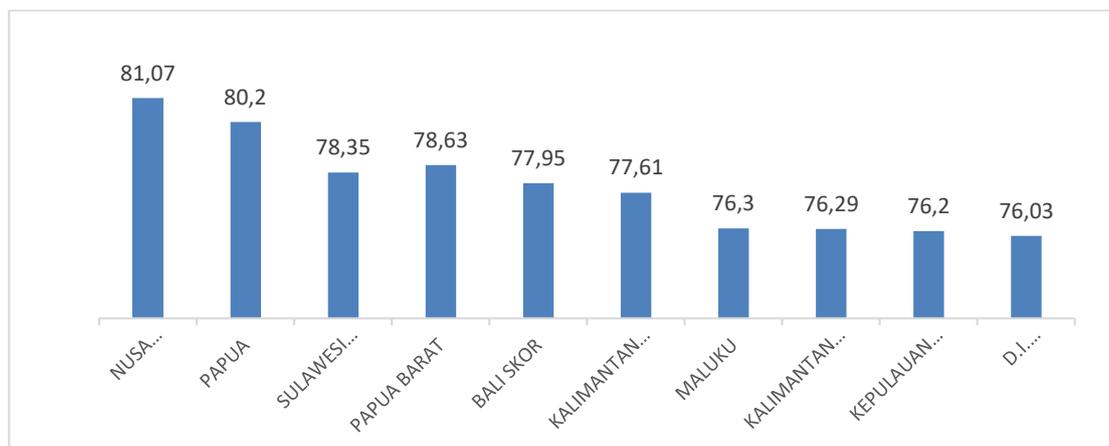


Sumber : Kementerian Agama, 2015-2021

Nilai IKUB Nasional pada tahun 2015-2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, IKUB Nasional sebesar 75,36 dan masuk kedalam kategori IKUB Tinggi. Kemudian nilainya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, dimana nilai IKUB Nasional turun menjadi 67,46. Kemudian pada tahun 2021 nilainya kembali naik cukup signifikan menjadi 72,39 namun kenaikan tersebut belum mampu menyamai kondisi IKUB pada tahun 2015. Secara keseluruhan nilai IKUB Nasional masuk dalam kategori IKUB Tinggi. Sedangkan untuk nilai IKUB Kalimantan Barat pada tahun 2021 sebesar 77,61 dan masuk dalam IKUB Tinggi.

Grafik 2.36.

10 Provinsi Terbaik dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021



Sumber : Kementerian Agama, 2021

2.3.7. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

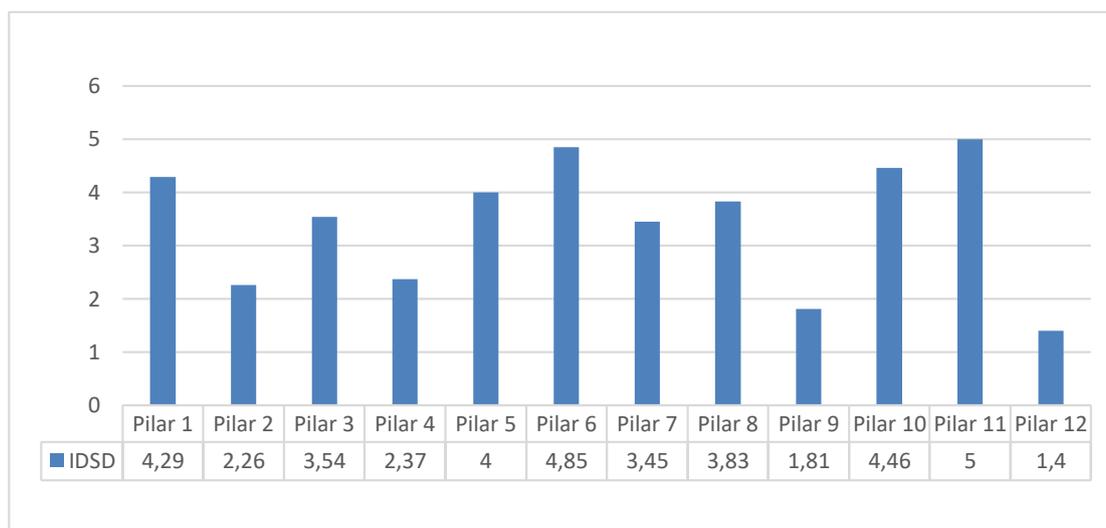
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing.

Komponen lingkungan pendukung ditopang oleh pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia ditopang oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar ditopang oleh pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen ekosistem inovasi ditopang oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Singkawang sebesar 2,94 sama dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Kalimantan Barat. Jika dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional yang berada pada 3,26 maka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Singkawang masih berada di bawah nasional.

Grafik 2.37.

Indeks Daya Saing Daerah Kota Singkawang Tahun 2022



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2022

Keterangan:

Pilar 1 : Instansi	Pilar 7 : Pasar Produk
Pilar 2 : Infrastruktur	Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3 : Adopsi TIK	Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 10 : Ukuran Pasar
Pilar 5 : Kesehatan	Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
Pilar 6 : Keterampilan	Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan dan penunjang urusan. Masing-masing layanan urusan tersebut dapat disampaikan melalui penjelasan berikut ini.

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Indeks Reformasi Birokrasi
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	54,22	55,65	60,16	63,37	76,49

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang, 2023

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Pada tahun 2019 dan 2020, Indeks RB Pemerintah Kota Singkawang masuk dalam kategori “Cukup (CC)” dengan perolehan nilai sebesar 54,22 dan 55,65. Pada tahun 2021 dan 2022, Indeks RB Pemerintah Kota Singkawang meningkat dan masuk dalam kategori “Cukup Baik (B)” dengan perolehan nilai sebesar 60,16 dan 63,37. Di tahun 2023, Kota Singkawang berhasil memperoleh nilai sebesar 76,49 dengan kategori “Baik (BB)”.

2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Indeks Pelayanan Publik
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,22	3,65	3,57	4,22	4,22

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang, 2024

IPP Kota Singkawang cenderung naik selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, IPP Kota Singkawang masuk dalam kategori “Baik (B-)” dengan perolehan nilai sebesar 3,22. Pada tahun 2020 dan 2021, IPP Kota Singkawang meningkat dan masuk dalam kategori “Baik (B)” dengan perolehan nilai sebesar 3,65 dan 3,57. Di tahun 2022 dan 2023 IPP Kota Singkawang kembali meningkat dengan nilai sebesar 4,22 dengan kategori “Sangat Baik (A-)”.

2.4.3. Indeks Inovasi daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Indeks Inovasi Daerah
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Inovasi Daerah (IID)	-	1.143	70,63	57,18	53,33

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, 2024

IID Kota Singkawang mengalami penurunan selama periode 2020-2023. Kota Singkawang melakukan pelaporan inovasi daerah mulai tahun 2020. Pada tahun 2020 dan 2021, IID Kota Singkawang masuk dalam kategori “Sangat Inovatif” dengan perolehan nilai sebesar 1.143 dan 70,63. Pada tahun 2022 dan 2023, IID Kota Singkawang menurun dengan nilai sebesar 57,18 dan 53,33 dengan kategori “Inovatif”.

2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,90	3,82	2,60	2,60	3,33

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2024

SPBE Kota Singkawang cenderung mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, SPBE Kota Singkawang masuk dalam kategori “Cukup” dengan perolehan nilai sebesar 1,74. Pada tahun 2020, SPBE Kota Singkawang mengalami peningkatan tertinggi dalam kategori “Baik” dengan perolehan nilai sebesar 3,82. Pada tahun 2021 dan 2022, SPBE Kota Singkawang mengalami penurunan namun masih dalam kategori “Baik” dengan perolehan nilai sebesar 2,60. Pada tahun 2023, SPBE Kota Singkawang kembali meningkat dan masih masuk dalam kategori “Baik” dengan perolehan nilai sebesar 3,33.

2.4.5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,52	83,74	84,94	86,71	85,62

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang, 2024

IKM Kota Singkawang selalu mengalami peningkatan selama periode 2019-2023 dengan kategori “Baik”. Dimulai tahun 2019, dengan perolehan nilai sebesar 82,52 hingga tahun 2023 dengan perolehan nilai mencapai 85,62”.

2.4.6. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik	83,30	84,09	85,47	86,33	87,05

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Publik Kota Singkawang selalu mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Dimulai pada tahun 2019, dengan perolehan nilai sebesar 83,30 hingga pada tahun 2023 dengan perolehan nilai mencapai 87,05”.

2.4.7. Survey Penilaian Integritas

Survey Penilaian Integritas (SPI) Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Survey Penilaian Integritas
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	n/a	n/a	71,30	73,91	74,33

Sumber: Inspektorat Kota Singkawang, 2024

SPI Kota Singkawang cenderung mengalami peningkatan selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, SPI Kota Singkawang masuk dalam kategori “Rentan” dengan perolehan nilai sebesar 71,30. Pada tahun 2022 dan 2023, SPI Kota Singkawang meningkat dan masuk dalam kategori “Waspada” dengan perolehan nilai sebesar 73,91 dan 74,33.

2.4.8. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Adanya peningkatan angka partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100\%$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	SD / MI	98,59	98,69	98,70	98,49	98,52
2.	SMP / MTs	72,85	72,64	73,39	73,92	74,17
3.	SMA / SMK / MA	59,21	59,56	58,84	59,54	63,18

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan tingkat SD / MI pada tahun 2019-2023 cukup stabil dengan angka rata-rata pada 98,60%. Dari tahun 2019-2021 terjadi peningkatan, dan sedikit menurun pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,52%. Artinya penduduk Kota Singkawang yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD / MI.

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan tingkat SMP / MTs pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Hanya pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan dari 72,85 pada tahun 2019 menjadi 72,64. Dan berangsur

meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 74,17%, yang artinya ada sekitar 74,17% penduduk Kota Singkawang yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMP MTs.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan tingkat SMA / SMK / MA pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Hanya pada tahun 2021 yang mengalami penurunan menjadi 58,84. Kemudian kembali meningkat sampai tahun 2023 menjadi 63,18%. Hal ini menandakan adanya sekitar 63,18% penduduk Kota Singkawang yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA / SMK / MA.

2.4.9. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Jika nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) mendekati atau lebih dari 100% menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	SD / MI	114,29	112,91	113,70	112,89	109,03
2.	SMP / MTs	84,73	88,79	87,66	85,68	83,08
3.	SMA / SMK / MA	77,54	79,75	76,93	77,58	82,97

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan tingkat SD / MI pada tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Paling tinggi pada tahun 2019, dan paling

rendah terjadi pada tahun 2023, namun telah mencapai angka diatas 100%. Artinya penduduk Kota Singkawang ada kemungkinan pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SD / MI dengan asumsi ada penduduk di luar Kota Singkawang.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan tingkat SMP / MTs pada tahun 2019-2023 cenderung menurun. Hanya pada tahun 2020 yang terjadi peningkatan menjadi 88,79%. Kemudian berangsur menurun sampai tahun 2023 menjadi 83,08%. Artinya pada tahun 2023 di jenjang SMP / MTs adanya kemungkinan pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat sekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SMP / MTs dengan asumsi ada penduduk di luar Kota Singkawang.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan tingkat SMA / SMK / MA pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Terjadinya penurunan pada tahun 2021 menjadi 76,93% yang mana sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 79,75%. Dan berangsur meningkat dari tahun 2021 sampai 2023 menjadi 82,97%. Artinya di tahun 2023 pada jenjang SMA / SMK / MA adanya kemungkinan pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat sekolah atau pengulangan kelas pada jenjang SMA / SMK / MA dengan asumsi ada penduduk di luar Kota Singkawang.

2.4.10. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah / sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Anak yang putus sekolah tentu memiliki alasan mengapa mereka harus berhenti sekolah. Faktor inteligensi, faktor ekonomi, faktor sosial, maupun faktor kesehatan merupakan sebagian faktor yang dapat menjadi penyebab anak putus sekolah. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin membaik.

Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Singkawang selama periode 2019-2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	SD / MI	1,02	1,00	1,00	0,97	0,97
2.	SMP / MTs	1,09	1,03	1,08	1,02	1,08
3.	SMA / SMK / MA	1,03	0,94	0,94	1,05	1,00

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2024

Angka Putus Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan tingkat SD / MI pada tahun 2019-2023 cenderung menurun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,02 dan pada tahun 2022-2023 angka terendah yaitu sebesar 0,97%. Yang artinya angka putus sekolah pada jenjang umur 7-12 tahun pada tahun 2022-2023 sebesar 0,97%.

Angka Putus Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan tingkat SMP / MTs pada tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2019 yang paling tinggi terjadi yaitu sebesar 1,09%, dan pada tahun 2022 terjadi paling rendah yaitu sebesar 1,02%. Kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 1,08%. Artinya angka putus sekolah pada jenjang umur 13-15 tahun sebesar 1,08% pada tahun 2023.

Sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan tingkat SMA / SMK / MA pada tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020-2021 terjadi angka putus sekolah terendah yaitu sebesar 0,94%, dan tahun 2022 terjadi angka putus sekolah tertinggi yaitu sebesar 1,05%. Kemudian menurun kembali di tahun 2023 yaitu sebesar 1,00%, yang berarti angka putus sekolah pada jenjang umur 16-18 tahun sebesar 1,00% pada penduduk Kota Singkawang.

2.4.11. Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status

kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas.

Tabel 2.51
Angka Kematian Ibu
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	96,34	98,93	159,36	111,60	56,51

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2024

AKI memiliki tren positif, cenderung turun dalam periode 2019-2023. Meskipun sempat melonjak di tahun 2021 (159,36), kembali turun di tahun 2022 (111,60) dan 2023 (56,51).

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas

perekonomian;

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping itu juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi keuangan Pemerintah Kota Singkawang selama 7 (tujuh) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Pemerintah Kota Singkawang selama 7 (tujuh) kali berturut-turut sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu Kota Singkawang penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk melihat capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Kota Singkawang. Capaian tersebut dapat membantu dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk satu periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan masa lalu Kota Singkawang.

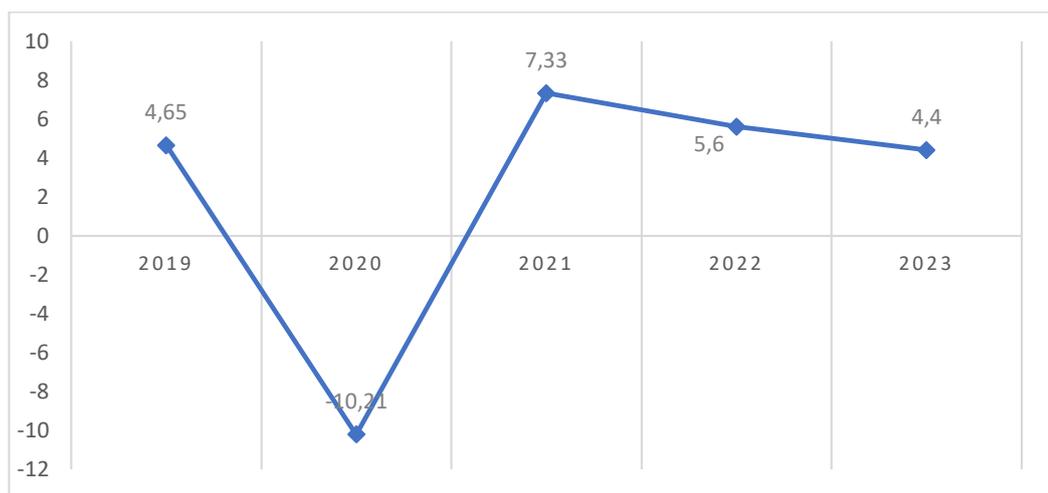
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD periode sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Singkawang tahun 2019-2023. Analisis dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan APBD periode yang akan datang. Berikut ini adalah uraian analisis kinerja pelaksanaan APBD Kota Singkawang.

3.1.2. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini adalah grafik pendapatan daerah Kota Singkawang tahun 2019-2023.

Grafik 3.1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2019-2023



*Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang
Tahun 2019-2023*

Dari tahun 2019 hingga 2023, pertumbuhan pendapatan daerah Kota

Singkawang mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu minus sebesar 10,21 persen dan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 7,33 persen kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 4,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum berjalan optimal. Persoalan ini terjadi disebabkan oleh adanya penurunan pertumbuhan terutama komponen pendapatan daerah, yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pajak daerah.

Analisis kinerja pendapatan daerah juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Berikut ini adalah uraian kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah di Kota Singkawang.

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019–2020

Uraian	Realisasi	Realisasi
	2019	2020
1	2	3
<u>PENDAPATAN</u>	920.008.487.061,04	826.117.163.781,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	166.200.436.090,04	163.388.781.107,02
Pendapatan Pajak Daerah	55.880.760.307,90	48.290.277.485,26
Pendapatan Retribusi Daerah	5.528.551.127,00	6.260.298.732,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.242.664.299,00	6.651.518.042,00
Lain-lain PAD Yang Sah	99.548.460.356,14	102.186.686.847,76
DANA PERIMBANGAN	664.546.815.255,00	575.518.153.068,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.234.429.877,00	19.553.583.383,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	518.961.237.000,00	465.326.232.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	131.351.148.378,00	90.638.337.685,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.261.235.716,00	87.210.229.606,78

Uraian	Realisasi	Realisasi
	2019	2020
Pendapatan Hibah	31.482.388.000,00	25.771.890.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.753.413.989,00	54.014.823.669,00
Dana Insentif Daerah		7.404.659.000,00
Pendapatan Lainnya	25.433.727,00	18.856.937,78
<u>BELANJA</u>	869.159.953.795,46	848.025.115.562,13
BELANJA TIDAK LANGSUNG	353.343.338.630,00	377.645.125.900,00
Belanja Pegawai	331.960.978.307,00	327.913.984.686,00
Belanja Hibah	15.748.740.000,00	14.978.203.436,00
Belanja Bantuan Sosial	4.834.094.000,00	1.615.096.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	799.526.323,00	907.417.740,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	32.230.424.038,00

Uraian	Realisasi	Realisasi
	2019	2020
BELANJA LANGSUNG	515.816.615.165,46	470.379.989.662,13
Belanja Pegawai	76.420.926.671,00	87.592.175.688,00
Belanja Barang dan Jasa	231.056.853.475,46	213.202.954.077,13
Belanja Modal	208.338.835.019,00	169.584.859.897,00
SURPLUS/(DEFISIT)	50.848.533.265,58	(21.907.951.780,33)
<u>PEMBIAYAAN</u>	36.507.732.637,59	79.356.265.903,17
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17
Penggunaan SiLPA	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	36.507.732.637,59	79.356.265.903,17
		57.448.314.122,84
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	87.356.265.903,17	57.448.314.122,84

Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021–2023

Uraian	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN	855.883.970.996,00	880.858.173.293,39	906.091.798.448,00	940.121.752.620,75	965.890.203.129,00	983.286.192.730,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH	168.881.218.902,00	175.462.109.825,36	189.000.000.000,00	213.790.179.584,91	248.064.107.514,00	247.530.975.815,63
Pendapatan Pajak Daerah	56.270.000.000,00	54.434.652.300,80	66.140.000.000,00	69.682.698.342,74	75.650.000.000,00	76.786.762.777,95
Pendapatan Retribusi Daerah	5.873.000.000,00	4.705.877.645,26	8.040.000.000,00	4.065.789.461,00	6.097.846.000,00	6.526.785.235,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.651.000.000,00	6.867.923.037,00	6.839.224.000,00	7.850.510.913,00	9.864.741.812,00	9.880.607.349,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.087.218.902,00	109.453.656.842,30	107.980.776.000,00	132.191.180.868,17	156.451.519.702,00	154.335.595.290,68
PENDAPATAN TRANSFER	661.330.552.094,00	675.488.406.974,03	717.091.798.448,00	721.054.344.405,84	717.826.095.615,00	738.969.293.798,06
<i>Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan</i>	<i>598.425.628.666,00</i>	<i>606.276.727.141,00</i>	<i>650.634.354.000,00</i>	<i>650.806.160.719,93</i>	<i>645.136.892.712,00</i>	<i>663.304.822.184,00</i>

Uraian	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Dana Bagi Hasil	23.261.424.000,00	44.820.822.529,00	27.879.700.000,00	47.245.209.191,00	28.435.361.839,00	34.681.472.183,00
Dana Alokasi Umum	457.023.658.000,00	457.023.658.000,00	457.023.658.000,00	455.807.507.643,00	478.163.909.000,00	477.781.333.178,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.220.966.666,00	55.195.698.038,00	47.827.159.000,00	42.016.880.064,00	44.867.922.000,00	43.304.250.229,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	55.919.580.000,00	49.236.548.574,00	93.114.033.000,00	80.946.759.821,93	93.669.699.873,00	92.727.237.594,00
Dana Insentif Daerah (DID)			24.789.804.000,00	24.789.804.000,00	0,00	14.810.529.000,00
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00			
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>62.904.923.428,00</i>	<i>69.211.679.833,03</i>	<i>66.457.444.448,00</i>	<i>70.248.183.685,91</i>	<i>72.689.202.903,00</i>	<i>75.650.765.123,67</i>
Pendapatan Bagi Hasil	60.804.923.428,00	67.111.679.833,03	66.057.444.448,00	69.848.183.685,91	72.689.202.903,00	75.650.765.123,67
Bantuan Keuangan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.672.200.000,00	29.907.656.494,00	0,00	5.277.228.630,00	0,00	13.706.490,39
<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>25.672.200.000,00</i>	<i>29.907.656.494,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.238.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.706.490,39</i>
<i>Pendapatan Lainnya</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.228.630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Uraian	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain - Lain Yang Sah					0,00	13.706.490,39
	1.150.501.148.309,00	1.053.654.023.067,98	939.731.374.421,00	852.775.725.005,96	1.064.150.252.736,00	1.012.357.695.173,21
BELANJA OPERASI	752.273.565.899,00	680.259.223.014,48	766.872.831.206,00	709.773.651.483,62	846.156.873.869,00	802.983.257.082,62
Belanja Pegawai	426.879.015.990,00	391.236.295.267,50	387.153.901.571,00	356.894.230.162,00	386.322.353.171,00	367.968.310.102,00
Belanja Barang	295.578.082.168,00	267.408.110.803,98	330.669.341.216,00	306.988.852.421,62	395.307.605.130,00	371.235.628.223,62
Belanja Bunga					-	-
Belanja Subsidi			915.366.000,00	-	-	-
Belanja Hibah	25.995.834.961,00	18.462.010.520,00	45.510.622.419,00	44.421.707.100,00	61.842.295.568,00	61.270.454.757,00
Belanja Bantuan Sosial	3.820.632.780,00	3.152.806.423,00	2.623.600.000,00	1.468.861.800,00	2.684.620.000,00	2.508.864.000,00
Jumlah Belanja Operasi					846.156.873.869,00	802.983.257.082,62
BELANJA MODAL	387.827.582.410,00	366.764.402.831,50	167.008.543.215,00	139.864.789.578,34	216.493.378.867,00	209.373.438.090,59
Belanja Tanah	2.145.000.000,00	44.773.000,00	16.012.803.449,00	4.887.776.200,00	12.332.554.637,00	10.588.976.550,00
Belanja Peralatan dan Mesin	52.062.755.457,00	50.882.542.056,50	35.539.605.960,00	28.556.467.532,00	37.445.187.599,00	36.398.050.683,70

Uraian	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Gedung dan Bangunan	86.408.726.018,00	78.483.345.284,00	28.697.535.028,00	26.578.905.592,74	53.482.412.225,00	51.253.962.105,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	243.985.315.784,00	234.222.824.631,00	81.348.382.656,00	75.303.305.731,60	89.627.774.742,00	88.044.974.216,89
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.225.785.151,00	3.130.917.860,00	5.410.216.122,00	4.538.334.522,00	23.605.449.664,00	23.087.474.535,00
Belanja Aset Lainnya					-	-
Jumlah Belanja Modal					216.493.378.867,00	209.373.438.090,59
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.400.000.000,00	6.630.397.222,00	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	1.500.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	10.400.000.000,00	6.630.397.222,00	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	1.500.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga					1.500.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah Belanja					1.064.150.252.736,00	1.012.357.695.173,21
TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-Bantuan Kepada Partai Politik		0,00		0,00		0,00

Uraian	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Surplus/ (Defisit)	(294.617.177.313,00)	(172.795.849.774,59)	(33.639.575.973,00)	87.346.027.614,79	(98.260.049.607,00)	(29.071.502.442,52)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	296.414.396.215,00	251.894.263.831,77	76.881.004.544,00	76.881.004.544,18	136.038.037.975,00	136.038.037.974,97
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	57.448.314.123,00	57.448.314.122,84	76.881.004.544,00	76.881.004.544,18	136.038.037.975,00	136.038.037.974,97
Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	238.966.082.092,00	194.445.949.708,93	0,00	0,00	0,00 -	0,00
Jumlah	296.414.396.215,00	251.894.263.831,77	76.881.004.544,00	76.881.004.544,18	136.038.037.975,00	136.038.037.974,97
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	43.241.428.571,00	28.188.994.184,00	37.777.988.368,00	37.777.988.368,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	14.300.000.000,00	14.300.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			28.941.428.571,00	13.888.994.184,00	27.777.988.368,00	27.777.988.368,00

Uraian	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Jumlah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	43.241.428.571,00	28.188.994.184,00	37.777.988.368,00	37.777.988.368,00
Pembiayaan Neto	288.414.396.215,00	243.894.263.831,77	33.639.575.973,00	48.692.010.360,18	98.260.049.607,00	98.260.049.606,97
	-6.202.781.098,00	71.098.414.057,18	0,00	136.038.037.974,97	0,00	69.188.547.164,45

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019–2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	920.008.487.061,04	826.117.163.781,80	886.640.763.780,39	940.121.752.620,75	983.286.192.730,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.200.436.090,04	154.272.914.307,02	175.464.901.487,36	213.790.179.584,91	247.530.975.815,63
Pendapatan Pajak Daerah	55.880.760.307,90	54.434.652.300,80	54.434.652.300,80	69.682.698.342,74	76.786.762.777,95
Hasil Retribusi Daerah	5.528.551.127,00	4.705.877.645,26	4.705.877.645,26	4.065.789.461,00	6.526.785.235,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.242.664.299,00	6.867.923.037,00	6.867.923.037,00	7.850.510.913,00	9.880.607.349,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.548.460.356,14	109.456.448.504,30	109.456.448.508,30	132.191.180.868,17	154.335.595.290,68
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	166.200.436.090,04	154.272.914.307,02	175.464.901.487,36	213.790.179.584,91	244.316.898.932,63
PENDAPATAN TRANSFER	722.300.229.244,00	629.532.976.737,00	675.488.406.974,03	721.054.344.405,84	738.969.293.798,06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	664.546.815.255,00	575.518.153.068,00	606.276.727.141,00	650.806.160.719,93	663.304.822.184,00
Dana Bagi Hasil	14.234.429.877,00	19.553.583.383,00	44.820.822.529,00	47.245.209.191,00	34.681.472.183,00

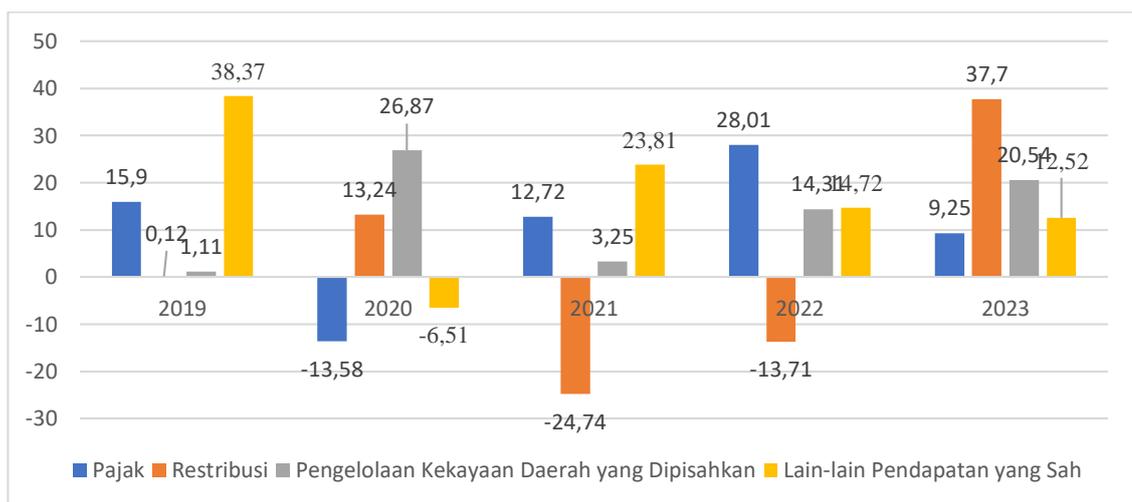
URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Dana Alokasi Umum	518.961.237.000,00	465.326.232.000,00	457.023.658.000,00	455.807.507.643,00	477.781.333.178,00
Dana Alokasi Khusus	90.794.007.988,00	53.307.954.685,00	104.432.246.612,00	122.963.639.885,93	136.031.487.823,00
Dana Penyesuaian	40.557.140.390,00	37.330.383.000,00	-	24.789.804.000,00	14.810.529.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.753.413.989,00	54.014.823.669,00	69.211.679.833,03	70.248.183.685,91	75.650.765.123,67
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.753.413.989,00	54.014.823.669,00	67.111.679.833,03	69.848.183.685,91	75.650.765.123,67
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya			2.100.000.000,00	400.000.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer	722.300.229.244,00	629.532.976.737,00	675.488.406.974,03	721.054.344.405,84	738.969.293.798,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.507.821.727,00	42.311.272.737,78	35.687.455.319,00	5.277.228.630,00	13.706.490,39
Pendapatan Hibah	31.482.388.000,00	34.887.756.800,00	29.907.656.494,00	5.238.000.000,00	13.706.490,39
Pendapatan Lainnya	25.433.727,00	7.423.515.937,78	5.779.798.825,00	39.228.630,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	31.507.821.727,00	42.311.272.737,78	35.687.455.319,00	5.277.228.630,00	13.706.490,39
JUMLAH PENDAPATAN	920.008.487.061,04	826.117.163.781,80	886.640.763.780,39	940.121.752.620,75	738.969.293.798,06

Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Singkawang sebesar 2,34 persen. Komponen pendapatan daerah yang pertumbuhannya paling tinggi, yaitu berasal dari PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Meskipun rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sangat rendah, namun memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah paling besar, Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer terutama transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusunan pendapatan daerah Kota Singkawang. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer tersebut berasal dari dana perimbangan dan transfer pemerintah daerah lainnya.

3.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari ketiga komponen pembentuk pendapatan daerah, PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sudah baik. Pertumbuhan PAD ini tentu saja didukung oleh kontribusi dari masing-masing komponen dalam PAD itu sendiri. Berikut ini adalah tabel persentase kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kota Singkawang.

Grafik 3. 2. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

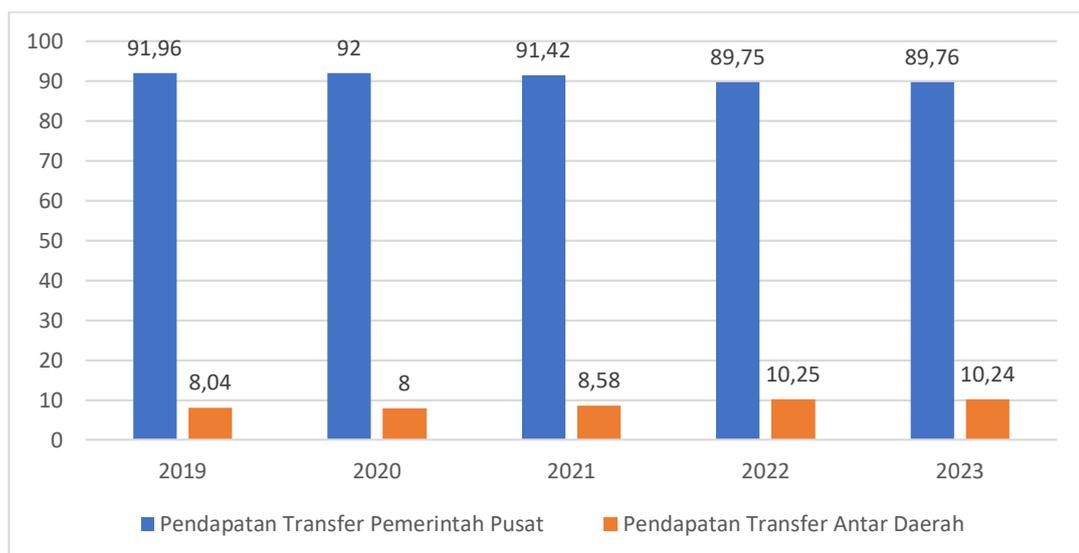
Rata-rata kontribusi komponen PAD terhadap total PAD paling tinggi berasal

dari lain-lain PAD yang sah, diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah dan kemudian retribusi daerah. Hal lain yang penting untuk diperhatikan dari kontribusi masing-masing komponen PAD adalah tingkat pertumbuhan seluruh komponen tersebut masih berjalan fluktuatif. Kondisi ini terjadi karena masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dan masih lemahnya data terkait sumber-sumber PAD, seperti pajak dan retribusi. Hal ini perlu diantisipasi karena bisa berdampak pada penurunan PAD yang selanjutnya berpengaruh pada pendapatan daerah itu sendiri.

3.1.4. Pendapatan Transfer

Kontribusi pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah Kota Singkawang. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan transfer terhadap kapasitas keuangan daerah masih signifikan. Berikut ini adalah gambaran kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer Kota Singkawang.

Grafik 3. 3. Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Singkawang Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang

Tahun 2019-2023

Persentase kontribusi komponen pendapatan transfer masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan sebagainya. Rata-rata pertumbuhan seluruh komponen pendapatan transfer mengalami *trend* fluktuatif dan cenderung menurun, seperti dana perimbangan, bagi hasil, dan lain-lain. Kondisi ini perlu diantisipasi karena alokasi dana dari pemerintah pusat sangat tergantung pada kondisi APBN.

3.1.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kota Singkawang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 99.548.460.356,14 menjadi Rp. 154.335.595.290,68 pada tahun 2023.

3.1.6. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut ini adalah tabel gambaran pertumbuhan belanja daerah Kota Singkawang tahun 2019-2023.

Tabel 3. 3.
Realisasi Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA	868.360.427.472,46	847.117.697.822,13	1.053.654.087.067,98	852.462.710.625,46	1.012.357.695.173,21
	BELANJA OPERASIONAL	660.021.592.453,46	645.302.413.887,13	680.259.287.014,48	709.460.637.103,12	802.983.257.082,62
	Belanja Pegawai	374.627.261.454,00	376.546.299.363,00	391.236.295.267,50	356.894.230.162,00	367.968.310.102,00
	Belanja Barang dan Jasa	241.837.708.596,46	218.699.777.341,13	267.408.174.803,98	306.675.838.041,12	371.235.628.223,62
	Belanja Hibah	38.722.528.403,00	48.441.241.183,00	18.462.010.520,00	44.421.707.100,00	61.270.454.757,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.834.094.000,00	1.615.096.000,00	3.152.806.423,00	1.468.861.800,00	2.508.864.000,00
	Jumlah Belanja Operasional	660.021.592.453,46	645.302.413.887,13	680.259.287.014,48	709.460.637.103,12	709.460.637.103,12
	BELANJA MODAL	208.338.835.019,00	169.584.859.897,00	366.764.402.831,50	139.864.789.578,34	209.373.438.090,59
	Belanja Modal Tanah	868.644.710,00	522.500.000,00	44.773.000,00	4.887.776.200,00	10.588.976.550,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.193.751.524,00	50.376.815.037,00	50.882.542.056,50	28.556.467.532,00	36.398.050.683,70

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.873.287.917,00	38.652.346.042,00	78.483.345.284,00	26.578.905.592,74	51.253.962.105,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.491.676.718,00	76.671.012.204,00	234.222.824.631,00	75.303.305.731,60	88.044.974.216,89
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.911.474.150,00	3.362.186.614,00	3.130.917.860,00	4.538.334.522,00	23.087.474.535,00
	Jumlah Belanja Modal	208.338.835.019,00	169.584.859.897,00	366.764.402.831,50	139.864.789.578,34	209.373.438.090,59
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	32.230.424.038,00	6.630.397.222,00	3.137.283.944,00	1.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	-	32.230.424.038,00	6.630.397.222,00	3.137.283.944,00	1.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	-	32.230.424.038,00	6.630.397.222,00	3.137.283.944,00	1.000.000,00
	Jumlah Belanja	868.360.427.472,46	847.117.697.822,13	1.053.654.087.067,98	852.462.710.625,46	852.462.710.625,46

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Dari tahun 2019 hingga 2023, belanja daerah Kota Singkawang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019 belanja pemerintah daerah sebesar Rp. 869.159.953.795,46 menjadi Rp. 1.012.357.695.173,21. dari total belanja pemerintah daerah, komponen yang cukup besar adalah belanja modal dan belanja barang dan jasa.

3.1.7. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD; dan
- c. Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Singkawang tahun 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.4. Sumber Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Diharapkan pada masa yang akan datang SiLPA akan semakin rasional dan tidak terlalu besar dengan semakin membaiknya perencanaan pendapatan dan belanja. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan Modal dilakukan kepada BUMD.

Tabel 3. 4. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBIAYAAN	36.507.732.637,59	79.356.265.903,17	243.894.263.831,77	48.692.010.360,18	98.260.049.606,97
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	251.894.263.831,77	76.881.004.544,18	136.038.037.974,97
	Penggunaan SiLPA	44.517.657.137,59	87.356.265.903,17	57.448.314.122,84	76.881.004.544,18	136.038.037.974,97
	Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	194.445.949.708,93	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	251.894.263.831,77	76.881.004.544,18	136.038.037.974,97
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	28.188.994.184,00	37.777.989.368,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	14.300.000.000,00	10.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	13.888.994.184,00	27.777.988.368,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	28.188.994.184,00	37.777.988.368,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.507.732.637,59	79.356.265.903,17	243.894.263.831,77	48.692.010.360,18	98.260.049.606,97

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

3.1.8. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari asset, kewajiban, dan dana ekuiditas. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan neraca daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023.

Tabel 3. 5.
Neraca Daerah Kota Singkawang Tahun 2019-2023

U R A I A N	TAHUN				
	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
A S E T	2.076.719.179.169,79	2.134.053.034.227,97	2.393.349.278.069,41	2.453.903.154.282,58	2.446.366.150.279,11
ASET LANCAR	181.187.138.149,79	118.198.568.357,72	161.354.778.087,14	237.674.626.644,09	156.931.312.694,92
Kas	87.356.265.903,17	57.448.314.122,84	76.881.004.544,18	136.038.037.934,97	69.188.547.164,45
Kas di Kas Daerah	77.306.310.217,22	54.298.444.832,20	59.598.965.524,35	108.264.874.567,27	57.613.124.302,42
Kas di Bendahara Penerimaan	-	5.908.000,00	-	-	2.590.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.457.850,00	-	53.587.852,00	-	193.446.678,00
Kas di BLUD	6.581.056.404,76	1.001.735.101,18	16.663.586.490,43	27.311.654.170,92	8.783.730.322,82
Kas di Bendahara FKTP	485.779.769,00	317.417.566,00	187.057.755,00	-	1.867.024.682,00
Kas di Bendahara BOS	2.974.661.662,19	1.824.808.623,46	377.806.922,40	461.509.236,78	728.531.179,21
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-

U R A I A N		TAHUN				
		Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023
1		2	3	4	5	6
	Piutang	48.492.120.223,62	44.079.579.525,08	48.287.530.390,27	53.300.638.556,49	47.878.620.810,13
	Piutang Pajak Daerah	33.107.949.304,80	29.152.457.969,90	31.929.388.916,37	34.852.731.687,31	38.527.925.448,47
	Piutang Retribusi Daerah	449.729.425,00	370.673.499,00	308.554.589,00	260.056.269,00	315.656.639,00
	Piutang Lainnya	29.449.725.722,49	31.604.085.132,64	35.221.578.215,00	31.064.300.405,32	29.333.870.075,42
	Piutang Transfer				9.093.517.433,67	4.524.348.536,00
	Penyisihan Piutang	-14.515.284.228,67	-17.047.637.076,46	-19.171.991.329,86	-21969.967.238,81	-24.823.179.888,76
	Beban Dibayar di Muka	-	-	58.666.666,67	-	-
	Persediaan	45.338.752.023,00	16.670.674.709,80	36.127.576.486,02	48.335.950.112,63	39.864.144.720,34
	INVESTASI JANGKA PANJANG	97.088.460.075,58	107.212.673.701,58	115.595.242.416,58	131.334.984.464.580,00	143.093.557.034.580,00
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-
	Investasi Non Permanen Modal Bergulir	2.590.604.086,57	2.538.770.808,57	2.532.994.421,57	2.527.110.472,57	2.523.175.292,57

U R A I A N	TAHUN					
	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023	
	2	3	4	5	6	
1						
	Penyisihan Investasi Non Permanen Modal Bergulir	-2.590.604.086,57	-2.538.770.808,57	-2.532.994.421,57	-2.527.110.472,57	-2.523.175.292,57
	Investasi Jangka Panjang Permanen	97.088.460.075,58	107.212.673.701,58	115.595.242.416,58	131.334.984.464.580,00	143.093.557.034.580,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	97.088.460.075,58	107.212.673.701,58	115.595.242.416,58	131.334.984.464.580,00	143.093.557.034,58
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
	ASET TETAP	1.748.801.369.465,11	1.873.298.581.786,95	2.080.471.466.993,51	2.048.074.763.877,86	2.103.822.524.875,88
	Tanah	453.575.188.804,20	542.297.584.901,99	544.750.013.847,09	549.553.874.194,18	565.180.123.591,96
	Peralatan dan Mesin	490.298.428.264,67	547.337.714.728,66	587.651.353.079,49	615.472.832.945,46	652.076.426.855,00
	Gedung dan Bangunan	651.861.658.983,44	678.705.176.252,03	725.571.486.371,03	779.102.919.472.,29	815.570.136.357,32
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.375.229.386.601,99	1.451.547.931.930,20	1.690.222.287.052,14	1.747.917.281.907,84	1.845.286.467.662,37
	Aset Tetap Lainnya	66.817.295.910,00	70.129.061.590,00	58.572.782.571,00	62.175.849.353,00	83.253.672.041,00

U R A I A N		TAHUN				
		Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023
1		2	3	4	5	6
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.235.845.554,89	18.055.158.012,98	60.954.046.541,05	32.507.158.616,28	38.113.035.137,34
	Akumulasi Penyusutan	-1.303.216.434.654,08	-1.434.774.045.628,91	-1.587.250.502.468,29	-1.738.655.152.611,19	-1.895.657.336.769,11
DANA CADANGAN		-	-	-	-	-
ASET LAINNYA		49.642.211.479,31	35.343.210.381,72	35.927.790.572,18	36.818.779.196,05	42.518.755.673,73
	Aset Tak Berwujud	7.750.725.684,61	8.561.121.585,61	12.058.666.265,61	13.112.559.596,61	14.020.554.027,61
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-3.234.997.484,57	-4.794.557.951,68	-6.954.550.004,81	-9.175.258.680,61	-11.171.673.215,74
	Aset lain-lain	86.349.545.420,07	83.867.412.596,02	92.238.578.401,40	89.764.272.499,96	89.854.256.445,96
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-41.223.062.140,80	-52.290.765.848,23	-61.414.904.090,02	-60.078.906.192,91	-61.211.110.584,10
TOTAL ASET		2.076.719.179.169,79	2.134.053.034.227,97	2.393.349.278.069,41	2.453.903.154.282,58	2.446.366.150.279,11
KEWAJIBAN		35.515.632.609,24	31.538.598.351,85	240.619.446.010,42	248.728.124.237,23	192.414.634.896,61
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		17.849.278.239,00	13.872.243.981,61	28.202.375.691,25	78.282.802.710,06	49.747.301.737,44
	Utang Perhitungan	-	-	-	-	-

U R A I A N	TAHUN				
	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
Pihak Ketiga (PFK)					
Pendapatan Diterima di Muka	162.442.413,00	253.388.294,11	271.079.741,58	332.268.916,16	41.893.200,00
Utang Belanja	17.686.835.826,00	13.618.855.687,50	27.931.295.949,67	50.172.545.425,90	21.927.420.169,44
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24	212.417.070.319,17	170.445.321.527,17	142.667.333.159,17
Utang Dalam Negeri	-	-	194.445.949.708,93	152.778.967.156,93	125.000.978.788,93
Utang Jangka Panjang Lainnya	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24	17.971.120.610,24	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24
TOTAL KEWAJIBAN	35.515.632.609,24	31.538.598.351,85	240.619.446.010,42	248.728.124.237,23	192.414.634.896,61
EKUITAS	2.020.760.465.232,01	2.130.182.513.189,32	2.152.729.832.058,99	2.205.175.030.045,35	2.253.951.515.382,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.056.276.097.841,25	2.161.721.111.541,17	2.393.349.278.069,41	2.453.903.154.282,58	2.446.366.150.279,11

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Dari tabel diatas, dapat dilihat peningkatan aset setiap tahunnya mulai tahun 2019 sebesar RP. 2.076.719.179.169,79 menjadi Rp. 2.446.366.150.279,11 pada tahun 2023. Komponen aset tetap yang meningkat signifikan adalah aset tanah, Peralatan dan mesin serta jalan, irigasi, dan jaringan. Kondisi ini disesuaikan dengan peningkatan yang tidak signifikan pada komponen konstruksi dalam pengerjaan.

Pertumbuhan kewajiban Kota Singkawang mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu sebesar 176,01 persen. Kenaikan ini disebabkan karena ada utang Dalam Negeri pada tahun 2021.

Dari hasil analisis terhadap neraca daerah di atas, selanjutnya dilakukan analisis rasio keuangan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan posisi keuangan Kota Singkawang dari satu periode ke periode berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini adalah uraian analisis terhadap masing-masing rasio di atas.

3.1.9. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar/*current ratio* dan rasio cepat/*ratio quick*. Berikut ini adalah ulasan terkait rasio lancar dan rasio cepat.

3.1.10. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar atau aset lancar. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan apakah Pemda memiliki aset yang cukup untuk melunasi hutangnya. Adapun rumus rasio lancar adalah membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar (Rasio Lancar = Aset Lancar/Hutang Lancar). Berikut ini adalah hasil analisis rasio lancara Pemerintah Kota Singkawang.

Tabel 3. 6.
Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)

No	Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek/ Hutang Lancar	Rasio
1	2019	181.187.138.149,7 9	17.849.278.239,00	10,15
2	2020	118.198.568.357,7 2	13.872.243.981,61	8,52
3	2021	161.354.778.087,1 4	28.202.375.691,25	5,72
4	2022	237.674.626.644,0 9	78.282.802.710,06	3,03
5	2023	156.931.312.694,9 2	49.747.301.737,44	3,15

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Rasio lancar Pemerintah Daerah mengalami penurunan yang cukup tajam karena terdapat utang belanja yang cukup besar. Rasio lancar sebesar 3,15 persen pada tahun 2023, dapat dikatakan kurang baik karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki beban yang cukup besar untuk membayar kewajiban jangka pendek.

3.1.11. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio *quick* adalah ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Rasio ini menunjukkan kekuatan atau kelemahan finansial Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak utang jangka pendek Pemerintah Daerah yang dapat dipenuhi dengan menjual semua aset likuid Pemerintah Daerah dalam waktu yang paling singkat. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin baik. Adapun

rumus rasio cepat adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar (Rasio Cepat = (Aktiva Lancar – Persediaan) / Kewajiban lancar). Berikut ini adalah hasil analisis rasio cepat Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 7.
Rasio Cepat Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)

No	Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Quick
1	2019	181.187.138.149,79	45.338.752.023,00	17.849.278.239,00	7,61
2	2020	118.198.568.357,72	16.670.674.709,80	13.872.243.981,61	7,32
3	2021	161.354.778.087,14	36.127.576.486,02	28.202.375.691,25	4,44
4	2022	237.674.626.644,09	48.335.950.112,63	78.282.802.710,06	2,42
5	2023	156.931.312.694,92	39.864.144.720,34	49.747.301.737,44	2,35

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Perkembangan rasio cepat Pemerintah Daerah mengalami penurunan mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena utang lancar/Kewajiban Jangka Pendek mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi rasio cepat Pemerintah dengan kondisi yang kurang baik harus lebih diperhatikan walaupun hal ini masih menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang masih mampu melunasi utang jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya.

3.1.12. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam rasio solvabilitas, yaitu rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

3.1.13. Rasio Total Kewajiban/Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini mengukur seberapa besar pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang di sini adalah utang Pemerintah Daerah, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan seberapa jauh utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik tingkat keamanannya. Adapun rumus rasio total hutang terhadap aset adalah total hutang dibagi dengan total aset (Rasio Hutang Terhadap Total Aset=Total Hutang/Total Aset). Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Singkawang.

Tabel 3. 8. Rasio Hutang Terhadap Total Aset Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Kewajiban	Total Aset	Rasio Hutang Terhadap Total Aset
1	2019	35.515.632.609,24	2.076.719.179.169,79	0,02
2	2020	31.538.598.351,85	2.134.053.034.227,97	0,01
3	2021	240.619.446.010,42	2.393.349.278.069,41	0,10
4	2022	248.728.124.237,23	2.453.903.154.282,58	0,10
5	2023	192.414.634.896,61	2.446.366.150.279,11	0,07

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Perkembangan rasio hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah mengalami perkembangan fluktuatif. Perkembangan rasio hutang yang paling tinggi berada pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 0,10 persen. Kondisi ini terjadi karena kenaikan total hutang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan total aset.

3.1.14. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas

Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rasio ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan keuangan daerah saat pemeriksaan. Semakin kecil nilainya, menunjukkan semakin mandiri keuangan daerah atau tidak tergantung pembiayaan dari hutang. Adapun rumus rasio hutang terhadap ekuitas adalah total hutang dibagi dengan ekuitas (Rasio Hutang Terhadap Ekuitas = Total Hutang/Ekuitas). Berikut ini hasil perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas Pemerintah Kota Singkawang.

**Tabel 3. 9. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2019-2023 (%)**

No	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	Rasio Hutang Terhadap Total Ekuitas
1	2019	35.515.632.609,24	2.020.760.465.232,01	0,02
2	2020	31.538.598.351,85	2.130.182.513.189,32	0,01
3	2021	240.619.446.010,42	2.152.729.832.058,32	0,11
4	2022	248.728.124.237,23	2.205.175.030.045,35	0,11
5	2023	192.414.634.896,61	2.253.951.515.382,50	0,08

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang

Tahun 2019-2023

Perkembangan rasio hutang terhadap ekuitas Pemerintah Kota Singkawang mengalami kenaikan khususnya pada tahun 2021 dan 2022 yakni 0,11% yang menunjukkan kemandirian keuangan kurang baik.

3.1.15. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio untuk melihat efektifitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa efektif Pemerintah Daerah menggunakan persediaan, piutang, dan aset tetapnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Rasio ini diukur melalui rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

3.1.16. Rasio Rata-Rata Umur Piutang

Rasio rata-rata umur piutang merupakan rasio yang digunakan untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi perputaran piutang. Perputaran piutang didapatkan dari perhitungan pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, di mana rata-rata piutang pendapatan daerah didapatkan dari saldo awal ditambah saldo akhir piutang dibagi 2 (dua).

Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur piutang Kota Singkawang.

Tabel 3. 10. Rasio Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (Hari)

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Umur Piutang	24,29	27,42	31,08	18,78	19,72

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Singkawang mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, namun

mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 walaupun kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu pelunasan semakin cepat.

3.1.17. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana yang tertanam dalam bentuk persediaan. Persediaan yang dimiliki digunakan untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur persediaan.

Tabel 3. 11. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Umur Persediaan	a/n	13,70	10,87	16,40	16,37

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Singkawang mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan persediaan oleh Pemerintah Kota Singkawang sudah berjalan efisien. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Singkawang dapat mengendalikan persediaannya untuk memberikan pelayanan publik secara efisien.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu Pemerintah Kota Singkawang. Instrumen yang digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah masa lalu adalah analisis kesehatan keuangan daerah, realisasi kebijakan belanja daerah dan

pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk pembangunan daerah ke depan.

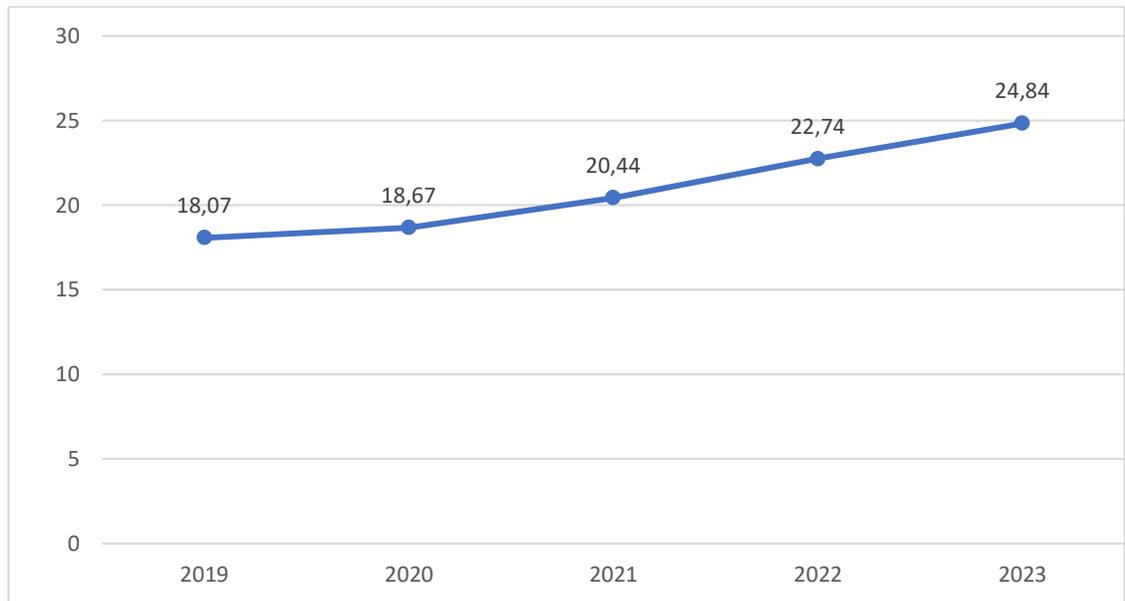
3.2.1. Analisis Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis Kesehatan keuangan daerah dapat diukur dari tingkat kemandirian keuangan daerah, ruang fiskal daerah, tax ratio, rasio belanja pegawai, dan rasio belanja modal. Adapun hasil analisis Kesehatan keuangan daerah dapat dilihat pada sub bab berikut ini.

3.2.2. Kemandirian Keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari realisasi PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin tingkat kemandirian daerah semakin baik, dan sebaliknya. Adapun realisasi PAD terhadap pendapatan Kota Singkawang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3. 4. Realisasi PAD Terhadap Pendapatan
Kota Singkawang Tahun 2019-2023



Dari tahun 2019 hingga 2023, persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Singkawang dalam meningkatkan PAD sudah berjalan baik. Meskipun demikian, kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah harus tetap dioptimalkan hingga diatas 25 persen.

3.2.3. Tax Ratio

Rasio merupakan indikator untuk melihat tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat di suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui perkiraan besaran porsi pajak dalam perekonomian daerah. Berikut ini adalah tax ratio Kota Singkawang tahun 2019-2023.

Tabel 3. 12. Tax Ratio Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak	PDRB	Tax Ratio
2019	55.880.760.307,90	10.228.390.000.000	0,55
2020	48.290.277.485,26	10.126.220.000.000	0,48
2021	54.434.652.300,80	10.877.850.000.000	0,50
2022	69.682.698.342,74	11.922.118.000.000	0,58
2022	76.786.762.777,95	12.899.269.000.000	0,59
2023			

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

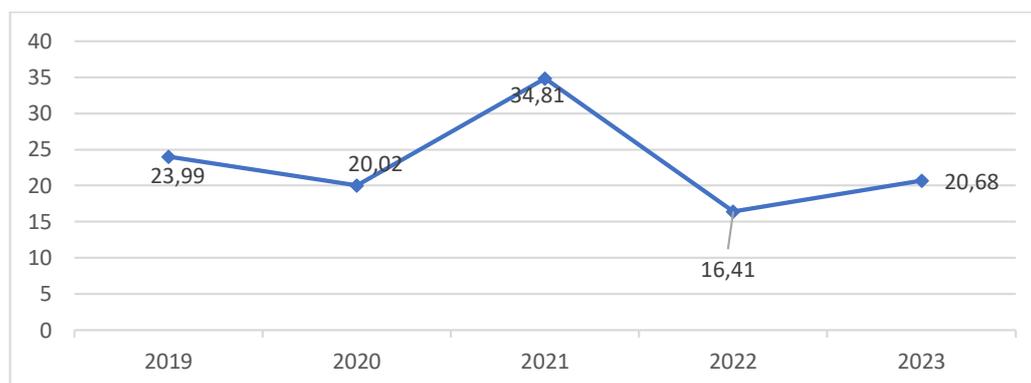
Tax Ratio Kota Singkawang mengalami perkembangan fluktuatif dengan penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019 sebesar 0,55 dan pada tahun 2020 menjadi 0,48 walaupun meningkat kembali mulai pada tahun 2021 hingga 2023. Angka 0,59 pada tahun 2023 merupakan angka yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pembayaran pajak belum berjalan maksimal, data objek pajak belum optimal.

3.2.4. Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja APBD

Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator yang mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah maka semakin baik. Berikut ini adalah grafik realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kota Singkawang.

Grafik 3. 5.

Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD
Kota Singkawang Tahun 2019-2023



Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

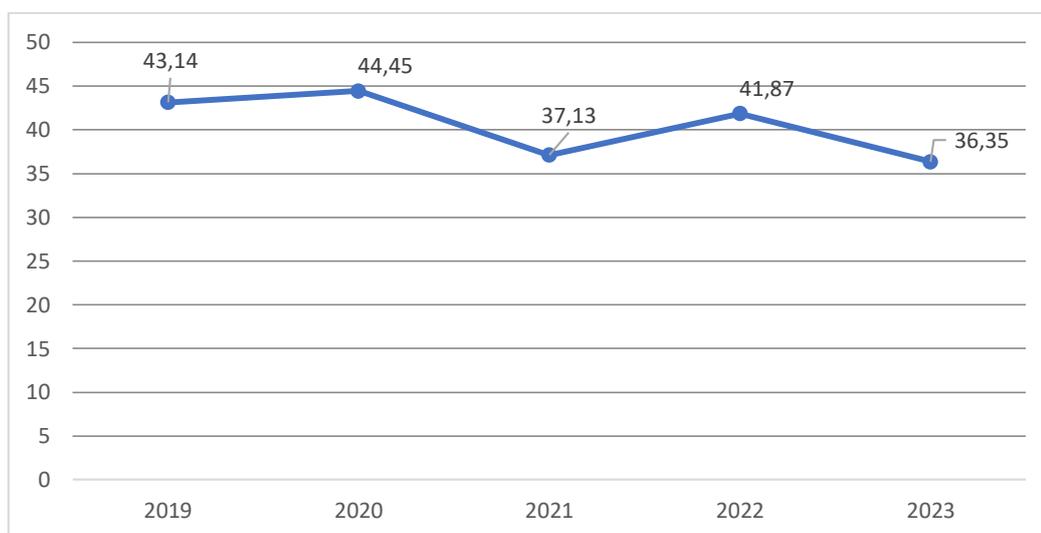
Pada tahun 2022, realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kota Singkawang mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 18,4 persen, dimana pada tahun 2021 realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja sebesar 34,81 menjadi 16,41 pada tahun 2022. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 34,81 persen, dikarenakan Pemerintah Kota Singkawang mendapatkan Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 200 Milyar yang dialokasikan untuk Infrastruktur Dasar serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

3.2.5. Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD

Realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar porsi belanja pegawai terhadap total belanja. Semakin tinggi porsi belanja pegawai maka kebijakan pengelolaan belanja daerah dinilai kurang proporsional. Hal ini terjadi karena belanja untuk kebutuhan masyarakat akan semakin berkurang. Berikut adalah realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD.

Grafik 3. 6.

Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD
Kota Singkawang Tahun 2019-2023



Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Laju pertumbuhan realisasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan Kondisi ini menunjukkan bahwa porsi belanja pemenuhan kebutuhan pegawai menurun karena terjadi kenaikan pada total belanja yang disebabkan dikarenakan Pemerintah Kota Singkawang mendapatkan Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 200 Milyar Sedangkan pada tahun 2022, realisasi belanja pegawai kembali meningkat hingga 41,87 persen, walaupun mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yakni sebesar 36,35.

3.2.6. Analisis Belanja Daerah

Analisis kinerja belanja daerah bertujuan untuk menyajikan data analisis

terkait proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, realisasi belanja pegawai dan analisis pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran pada periode ke depan.

3.2.7. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran (target), yang kemudian diperoleh tingkat realisasi belanja. Berikut ini adalah tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Daerah tahun 2019-2023.

Tabel 3. 13. Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja dan Proporsi Rata-rata Komponen Belanja Terhadap Total Belanja
Kota Singkawang Tahun 2019-2023 (%)

NO	URAIAN	2019			2020		
		APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
1	2	9	10	11	3	4	5
	BELANJA	992.572.830.275,99	868.360.427.472,46	87,49	949.313.862.360,17	847.117.697.822,13	89,23
	BELANJA OPERASIONAL	765.789.879.603,00	660.021.592.453,46	86,19	727.284.532.517,46	645.302.413.887,13	88,73
	Belanja Pegawai	444.835.433.086,00	374.627.261.454,00	84,22	429.292.604.995,07	376.546.299.363,00	87,71
	Belanja Barang dan Jasa	274.207.520.442,00	241.837.708.596,46	88,2	244.196.128.505,39	218.699.777.341,13	89,56
	Belanja Hibah	41.211.678.075,00	38.722.528.403,00	93,96	51.971.251.017,00	48.441.241.183,00	93,21
	Belanja Bantuan Sosial	5.535.248.000,00	4.834.094.000,00	87,33	1.824.548.000,00	1.615.096.000,00	88,52
	Jumlah Belanja Operasional	765.789.879.603,00	660.021.592.453,46	86,19	727.284.532.517,46	645.302.413.887,13	88,73
	BELANJA MODAL	225.782.950.672,99	208.338.835.019,00	92,27	182.452.616.815,00	169.584.859.897,00	92,95
	Belanja Modal Tanah	1.027.550.000,00	868.644.710,00	84,54	1.481.150.000,00	522.500.000,00	35,28

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.872.779.649,9 9	80.193.751.524,0 0	94,49	52.603.946.015,0 0	50.376.815.037,0 0	95,77
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.388.679.841,0 0	40.873.287.917,0 0	92,08	39.430.319.556,0 0	38.652.346.042,0 0	98,03
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.830.533.924,0 0	82.491.676.718,0 0	89,83	85.081.282.435,0 0	76.671.012.204,0 0	90,12
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.663.407.258,00	3.911.474.150,00	106,77	3.855.918.809,00	3.362.186.614,00	87,2
	Jumlah Belanja Modal	225.782.950.672,99	208.338.835.019,00	92,27	182.452.616.815,00	169.584.859.897,00	92,95
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	-	-	39.576.713.027,71	32.230.424.038,00	81,44
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	-	-	39.576.713.027,71	32.230.424.038,00	81,44
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	-	-	39.576.713.027,71	32.230.424.038,00	81,44
	Jumlah Belanja	992.572.830.275,99	868.360.427.472,46	87,49	949.313.862.360,17	847.117.697.822,13	89,23

NO	URAIAN	2021			2022			2023		
		APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA	1.150.501.148.309,00	1.053.654.087.067,98	91,58	939.731.374.421,00	852.462.710.625,46	90,71	1.064.150.252.736,00	1.012.357.695.173,21	95,13
	BELANJA OPERASIONAL	752.273.565.899,00	680.259.287.014,48	90,43	766.872.831.206,00	709.460.637.103,12	92,51	846.156.873.869,00	802.983.257.082,62	94,90
	Belanja Pegawai	426.879.015.990,00	391.236.295.267,50	91,65	387.153.901.571,00	356.894.230.162,00	92,18	386.322.353.171,00	367.968.310.102,00	95,25
	Belanja Barang dan Jasa	295.578.082.168,00	267.408.174.803,98	90,47	330.669.341.216,00	306.675.838.041,12	92,74	395.307.605.130,00	371.235.628.223,62	93,91
	Belanja Subsidi	-	-	-	915.366.000,00	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	25.995.834.961,00	18.462.010.520,00	71,02	45.510.622.419,00	44.421.707.100,00	97,61	61.842.295.568,00	61.270.454.757,00	99,08
	Belanja Batuan Sosial	3.820.632.780,00	3.152.806.423,00	82,52	2.623.600.000,00	1.468.861.800,00	55,99	2.684.620.000,00	2.508.864.000,00	93,45
	Jumlah Belanja Operasional	752.273.565.899,00	680.259.287.014,48	90,43	766.872.831.206,00	709.460.637.103,12	92,51	846.156.873.869,00	802.983.257.082,62	94,90
	BELANJA MODAL	387.827.582.410,00	366.764.402.831,50	94,57	167.008.543.215,00	139.864.789.578,34	83,75	216.493.378.867,00	209.373.438.090,59	96,71
	Belanja Modal Tanah	2.145.000.000,00	44.773.000,00	2,09	16.012.803.449,00	4.887.776.200,00	30,52	12.332.554.637,00	10.588.976.550,00	85,86

		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.062.755.457,00	50.882.542.056,50	97,73	35.539.605.960,00	28.556.467.532,00	80,35	37.445.187.599,00	36.398.050.683,70	97,20
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.408.726.018,00	78.483.345.284,00	90,83	28.697.535.028,00	26.578.905.592,74	92,62	53.482.412.225,00	51.253.962.105,00	95,83
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	243.985.315.784,00	234.222.824.631,00	96	81.348.382.656,00	75.303.305.731,60	92,57	89.627.774.742,00	88.044.974.216,89	98,23
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.225.785.151,00	3.130.917.860,00	97,06	5.410.216.122,00	4.538.334.522,00	83,88	23.605.449.664,00	23.087.474.535,00	97,81
		Jumlah Belanja Modal	387.827.582.410,00	366.764.402.831,50	94,57	167.008.543.215,00	139.864.789.578,34	83,75	216.493.378.867,00	209.373.438.090,59	96,71
		BELANJA TIDAK TERDUGA	10.400.000.000,00	6.630.397.222,00	63,75	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	53,63	1.500.000.000,00	1.000.000,00	0,07
		Belanja Tidak Terduga	10.400.000.000,00	6.630.397.222,00	63,75	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	53,63	1.500.000.000,00	1.000.000,00	0,07

		Jumlah Belanja Tidak Terduga	10.400.000.000,00	6.630.397.222,00	63,75	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	53,63	1.500.000.000,00	1.000.000,00	0,07
		Jumlah Belanja	1.150.501.148.309,00	1.053.654.087.067,98	91,58	939.731.374.421,00	852.462.710.625,46	90,71	1.064.150.252.736,00	1.012.357.695.173,21	95,13

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga terjadi pada komponen belanja Operasional, belanja Modal dan belanja tidak terduga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran belanja masih belum optimal karena secara umum penyerapan belanja maupun komponen belanja masih dibawah 90%.

Selain proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, penting juga melihat proporsi realisasi masing-masing komponen belanja terhadap total belanja. Hal ini diperlukan karena dapat menggambarkan komponen apa saja yang memiliki proporsi paling besar terhadap total belanja. Berikut ini adalah tabel proporsi realisasi komponen belanja terhadap total belanja.

3.2.8. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis terhadap belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Singkawang sangat penting untuk dilakukan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran riil alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan alokasi anggaran ke depan. Berikut ini adalah proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Singkawang Tahun 2019-2023

A. Tahun 2019

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang

Tahun 2019-2023

No	No Rek	Uraian	Jumlah
1	2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	273.129.040.127,00
2	2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.221.598.222,00
3	2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.427.400.000,00
4	2.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	248.265.500,00

5	2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.273.964.408,0 0
6	2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	133.411.500,00
7	2.1.1.07.	Uang Lembur	1.612.786.500,0 0
8	2.1.1.08.	Belanja Pegawai BLUD	36.550.876.647, 00
9	2.1.1.09.	Tambahan Penghasilan PNS	17.527.298.550, 00
10	2.1.1.10.	Belanja Pegawai BOS	4.502.620.000,0 0
11	2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	7.342.146.000,0 0
12	2.1.2.11.	Belanja makanan dan minuman	11.385.250.968, 00
13	2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	818.427.000,00
14	2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	669.963.600,00
15	2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.553.143.600,0 0
16	2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.786.803.639, 00
17	2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	407.150.000,00
18	2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.645.739.292,0 0
19	2.1.2.25.	Honorarium PNS	5.856.273.500,0 0
20	2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	22.018.711.000, 00
21	2.1.2.28.	Honorarium Pelayanan Kesehatan	5.879.659.024,0 0
TOTAL			458.990.529.07 7,00

B. Tahun 2020

No	No Rek	Uraian	Jumlah
1	2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	263.805.840.221, 00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
2	2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	39.838.431.713,0 0
3	2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.581.600.000,00
4	2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.196.942.431,00
5	2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	209.386.500,00
6	2.1.1.07.	Uang Lembur	1.925.720.500,00
7	2.1.1.08.	Belanja Pegawai BLUD	41.037.488.377,0 0
8	2.1.1.09.	Tambahan Penghasilan PNS	17.281.783.821,0 0
9	2.1.1.10.	Belanja Pegawai BOS	5.687.003.300,00
10	2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.999.668.998,00
11	2.1.2.11.	Belanja makanan dan minuman	8.454.719.000,00
12	2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	763.312.000,00
13	2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	634.821.700,00
14	2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	863.986.000,00
15	2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.019.224.381,0 0
16	2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	314.901.770,00
17	2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.618.815.976,00
18	2.1.2.25.	Honorarium PNS	8.021.012.000,00
19	2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	25.248.949.499,0 0

No	No Rek	Uraian	Jumlah
20	2.1.2.28.	Honorarium Pelayanan Kesehatan	5.672.002.012,00
TOTAL			449.175.610.199,00

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

C. Tahun 2021

No	No Rek	Uraian	Jumlah
1	5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	215.399.978.903,50
2	5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	64.886.063.172,00
3	5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.547.897.840,00
4	5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.951.349.024,00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
5	5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	652.759.228,00
6	5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00
7	5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	6.635.056.497,00
8	5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	41.361.590.603,0 0
9	5.1.02.01.01. 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.736.581.403,00
10	5.1.02.01.01. 0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	21.158.720,00
11	5.1.02.01.01. 0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	39.300.000,00
12	5.1.02.01.01. 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	202.065.600,00
13	5.1.02.01.01. 0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.370.000,00
14	5.1.02.01.01. 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	323.303.269,00
15	5.1.02.01.01. 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	296.281.774,00
16	5.1.02.01.01. 0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	59.884.000,00
17	5.1.02.01.01. 0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-
18	5.1.02.01.01. 0069	Belanja Pakaian Teknik	105.781.020,00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
19	5.1.02.01.01. 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	9.240.000,00
20	5.1.02.01.01. 0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	-
21	5.1.02.01.01. 0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	690.000,00
22	5.1.02.01.01. 0073	Belanja Pakaian KORPRI	98.860.000,00
23	5.1.02.01.01. 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	502.263.000,00
24	5.1.02.01.01. 0076	Belanja Pakaian Olahraga	226.416.400,00
25	5.1.02.02.01. 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.447.078.900,00
26	5.1.02.02.01. 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.316.563.750,00
27	5.1.02.02.01. 0071	Belanja Lembur	3.575.860.400,00
28	5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.997.604.564,0 0
29	5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	169.160.000,00
30	5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.438.581.937,00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
31	5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	269.771.515,00
32	5.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.909.292,00
33	5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	20.049.338.764,0 0
TOTAL			444.163.359.575, 50

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

D. Tahun 2022

No	No Rek	Uraian	Jumlah
1	5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	219.280.388.134, 00
2	5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73.278.284.461,0 0
3	5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.675.602.903,0 0
4	5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.828.938.484,0 0
5	5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	694.031.013,00
6	5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	776.600.000,00
7	5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	0

No	No Rek	Uraian	Jumlah
8	5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	6.360.340.167,00
9	5.1.02.01.01. 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.520.697.525,00
10	5.1.02.01.01. 0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.617.000,00
11	5.1.02.01.01. 0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	218.504.610,00
12	5.1.02.01.01. 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	105.496.000,00
13	5.1.02.01.01. 0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0
14	5.1.02.01.01. 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	322.175.324,00
15	5.1.02.01.01. 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.278.450,00
16	5.1.02.01.01. 0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60.741.000,00
17	5.1.02.01.01. 0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	20.608.000,00
18	5.1.02.01.01. 0069	Belanja Pakaian Teknik	0
19	5.1.02.01.01. 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0
20	5.1.02.01.01. 0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0
21	5.1.02.01.01. 0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	0

No	No Rek	Uraian	Jumlah
22	5.1.02.01.01. 0073	Belanja Pakaian KORPRI	270.405.240,00
23	5.1.02.01.01. 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36.284.000,00
24	5.1.02.01.01. 0076	Belanja Pakaian Olahraga	398.584.580,00
25	5.1.02.02.01. 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.567.270.000,00
26	5.1.02.02.01. 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.027.014.974,00
27	5.1.02.02.01. 0071	Belanja Lembur	3.501.495.700,00
28	5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.084.452.363,0 0
29	5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	177.294.000,00
30	5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.474.062.918,00
31	5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	375.787.779,00
32	5.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	43.128.189,00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
33	5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	24.962.782.726,0 0
TOTAL			412.236.865.540,00

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

E. Tahun 2023

No	No Rek	Uraian	Jumlah
1	5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	243.894.263.831, 77
2	5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	75.149.324.613,0 0
3	5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.640.751.277,0 0
4	5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.730.507.400,0 0
5	5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	361.077.750,00
6	5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	549.000.000,00
7	5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	0
8	5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	7.033.878.689,00
9	5.1.02.01.01. 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.251.142.817,00
10	5.1.02.01.01. 0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	49.075.000,00
11	5.1.02.01.01. 0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	105.000.000,00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
12	5.1.02.01.01. 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	104.100.000,00
13	5.1.02.01.01. 0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.400.000,00
14	5.1.02.01.01. 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	679.912.230,00
15	5.1.02.01.01. 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	206.365.750,00
16	5.1.02.01.01. 0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60.900.000,00
17	5.1.02.01.01. 0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	31.868.000,00
18	5.1.02.01.01. 0069	Belanja Pakaian Teknik	0
19	5.1.02.01.01. 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	9.240.000,00
20	5.1.02.01.01. 0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0
21	5.1.02.01.01. 0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	0
22	5.1.02.01.01. 0073	Belanja Pakaian KORPRI	21.390.000,00
23	5.1.02.01.01. 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	47.725.000,00
24	5.1.02.01.01. 0076	Belanja Pakaian Olahraga	443.960.741,00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
25	5.1.02.02.01. 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.265.530.000,00
26	5.1.02.02.01. 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.163.475.000,00
27	5.1.02.02.01. 0071	Belanja Lembur	4.872.526.000,00
28	5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.171.128.245,0 0
29	5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	147.850.000,00
30	5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.073.202.377,00
31	5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	408.404.590,00
32	5.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	51.673.788,00
33	5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	33.958.975.621,0 0
TOTAL			459.490.648.719, 77

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Singkawang menunjukkan *trend* fluktuatif dan cenderung menurun. Selain

analisis terhadap realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis terhadap proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur juga penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengeluaran daerah untuk membiayai kebutuhan aparatur. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dihitung melalui perbandingan total belanja pemenuhan aparatur dengan total pengeluaran daerah. Berikut ini adalah tabel proporsi belanja pemenuhan aparatur.

Tabel 3. 15.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Singkawang
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2019	458.990.529.077,00	836.252.420.909,10	54,89
2	2020	449.175.610.199,00	820.804.806.906,34	54,72
3	2021	444.163.359.575,50	863.350.040.755,31	51,45
4	2022	412.236.865.540,00		
4	2023	459.490.648.719,77		

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang

Tahun 2017-2021

Proporsi belanja pemenuhan aparatur daerah mengalami Penurunan dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2021 proporsi belanja untuk aparatur mengalami

penurunan yang signifikan, Hal ini menunjukkan bahwa porsi belanja untuk pembangunan dan masyarakat di daerah mengalami peningkatan.

3.2.9. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun sebelumnya atau periode sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa akan datang dan untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis realisasi SiLPA, analisis defisit, analisis sumber penutup defisit riil, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

3.2.10. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan APBD ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis sumber penutup defisit riil.

Tabel 3. 16.

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan Daerah	920.008.487.061,04	826.117.163.781,80	886.643.880.118,39	940.121.752.620,75	983.286.192.730,69
	Dikurangi realisasi :					
2.	Belanja Daerah	868.360.427.472,46	847.117.697.822,13	1.053.654.087.067,98	852.462.710.625,46	1.012.357.695.173,21
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	28.188.994.184,00	37.777.988.368,00
A.	Defisit Riil	43.648.059.588,58	-29.000.534.040,33	-175.010.206.949,59	59.470.047.811,29	-66.849.490.810,52
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	57.448.314.122,84	76.881.004.544,18	136.038.037.974,97
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			194.445.949.708,93		
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					

B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	251.894.263.831,77		
A+ B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	88.155.792.226,17	58.355.731.862,84	76.884.056.882,18	136.351.052.355,47	69.188.547.164,45

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Hasil perhitungan analisis penutup defisit di atas, menunjukkan bahwa sumber penutup defisit keuangan daerah Kota Singkawang masih berasal dari SiLPA. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah mengetahui sumber penutup defisit utama, kemudian hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menghitung komposisi penutup defisit riil Kota Singkawang. Berikut ini adalah tabel komposisi penutup defisit riil Kota Singkawang.

Tabel 3.17

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Singkawang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	5	6	7	8	
A	Defisit Riil	43.648.059.5 88,58	- 29.000.534.0 40,33	- 175.010.206.9 49,59	59.470.047.811, 29	-66.849.490.810,52
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	44.507.732.6 37,59	87.356.265.9 03,17	57.448.314.12 2,84	76.881.004.544, 18	136.038.037.974,9 7
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	194.445.949.7 08,93	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	88.155.792.2 26,17	58.355.731.8 62,84	76.884.056.88 2,18	136.351.052.35 5,47	69.188.547.164,45

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2023

Dari tahun 2019 hingga 2023, defisit riil Kota Singkawang berada pada tahun 2020 dan 2021. Defisit riil ini ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Singkawang.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama beberapa tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, teknik yang digunakan dalam memproyeksi APBD Kota Singkawang adalah teknik peramalan (*Forecasting*). Teknis peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diminimalisir. Teknik ini tidak memberikan informasi secara pasti, namun berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik.

3.3.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang

Proyeksi APBD Kota Singkawang untuk beberapa tahun ke depan mempertimbangkan beberapa kondisi, sebagai berikut; *pertama*, *trend* rata-rata pertumbuhan, proporsi, dan tingkat realisasi masing-masing komponen APBD pada periode sebelumnya dan APBD murni tahun 2024; *kedua*, melihat potensi perkembangan perekonomian mikro dan makro (tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada APBD.

Proyeksi APBD Kota Singkawang menggunakan *baseline* APBD murni tahun 2024.

Berikut ini adalah proyeksi APBD Kota Singkawang tahun 2025-2029.

Tabel 3.18 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2029

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		Baseline Realisasi APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENDAPATAN	983.272.486.240,30	966.298.648.122,00	1.052.092.007.943,00	1.125.792.017.214,19	1.230.780.589.106,24	1.350.758.383.799,16	1.488.422.821.274,25	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	247.530.975.815,63	219.904.503.378,00	270.549.839.063,00	324.659.806.875,60	389.591.768.250,72	467.510.121.900,86	561.012.146.281,04	20
	Pendapatan Pajak Daerah	76.787.987.940,95	81.270.000.000	130.249.817.538	156.299.781.046	187.559.737.255	225.071.684.706	270.086.021.647	20%
	Hasil Retribusi Daerah	6.526.785.235,00	6.389.857.780	6.389.857.780	7.667.829.336	9.201.395.203	11.041.674.244	13.250.009.093	20%

NO	URAIAN		PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
			Baseline Realisasi APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.880.607.349,00	9.159.453.083	10.824.971.230	12.989.965.476	15.587.958.571	18.705.550.285	22.446.660.343	20%
		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	154.335.595.290,68	123.085.192.515	123.085.192.515	147.702.231.018	177.242.677.222	212.691.212.666	255.229.455.199	20%
	PENDAPATAN TRANSFER		735.741.510.424,67	746.394.144.744,00	781.542.168.880,00	801.132.210.338,59	841.188.820.856	883.248.261.898	927.410.674.993	5%

NO	URAIAN			PROYEKSI (Rp.)						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
				Baseline Realisasi APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	660.090.745.301,00	674.988.675.000,00	722.659.213.150,00	723.344.804.946,38	759.512.045.194	797.487.647.453	837.362.029.826	5%
			Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.650.765.123,67	71.405.469.744,00	58.882.955.730,00	77.787.405.392,21	81.676.775.662	85.760.614.445	90.048.645.167	5%
								-			
	BELANJA			1.012.357.695.173,21	989.228.309.865,00	1.009.204.019.575,00	1.078.916.856.104,04	1.159.857.069.188	1.248.808.874.379	1.347.596.870.043	
			BELANJA OPERASIONAL	802.983.257.083	836.734.172.011	847.804.872.231	894.542.442.565	958.094.556.702	1.026.360.833.111	1.099.703.373.220	
			Belanja Pegawai	367.968.310.102,00	440.830.518.067,00	451.669.248.067,00	528.888.013.738,28	572.944.385.283	620.670.652.577	672.372.517.936	8,33%

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		Baseline Realisasi APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Barang dan Jasa	371.235.628.223,62	338.117.426.004,00	338.399.396.224,00	336.270.997.077,01	354.194.241.221	373.072.794.278	392.957.574.213	5,33%
	Belanja Hibah	61.270.454.757,00	55.819.407.940,00	55.769.407.940,00	27.316.894.530,05	28.682.739.257	30.116.876.219	31.622.720.030	5%
	Belanja Batuan Sosial	2.508.864.000,00	1.966.820.000,00	1.966.820.000,00	2.066.537.220,00	2.273.190.942	2.500.510.036	2.750.561.040	10%
	BELANJA MODAL	209.373.438.091	149.310.108.010	158.399.147.344	179.427.113.539	193.603.920.055	208.993.706.492	225.705.953.344	
	Belanja Modal Tanah	10.588.976.550,00	1.219.114.000,00	1.000.000.000,00	530.018.296,50	574.168.821	621.997.083	673.809.440	8,33%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.398.050.683,70	29.054.859.813,00	29.067.748.751,00	26.390.265.474,38	27.709.778.748	29.095.267.686	30.550.031.070	5%

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		Baseline Realisasi APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.253.962.105,00	29.490.468.278,00	34.626.106.050,00	41.851.130.236,12	43.943.686.748	46.140.871.085	48.447.914.640	5%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.044.974.216,89	77.834.291.725,00	82.083.918.349,00	104.540.529.173,70	114.649.598.345	125.736.214.505	137.894.906.447	9,67%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.087.474.535,00	11.711.374.194,00	11.621.374.194,00	6.115.170.358,00	6.726.687.394	7.399.356.133	8.139.291.746	10%
						-			

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		Baseline Realisasi APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000,00	3.184.029.844,00	3.000.000.000,00	4.947.300.000,00	8.158.592.430,00	13.454.334.776,31	22.187.543.479,62	64,91
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	3.184.029.844	3.000.000.000	4.947.300.000	8.158.592.430	13.454.334.776	22.187.543.480	64,91%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-29.085.208.933	-22.929.661.743	42.887.988.368	46.875.161.110	70.923.519.919	101.949.509.420	140.825.951.231	
	PEMBIAYAAN	-17.777.988.368,00	22.929.661.743,00	-42.777.988.368,00	37.777.988.368,00	37.777.988.368,00	27.777.988.368,00	0,00	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	55.707.650.111,00	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN		PROYEKSI (Rp.)						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
			Baseline Realisasi APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	20.000.000.000,00	55.707.650.111,00	0	0	0	0	0	0
		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.777.988.368,00	32.777.988.368,00	42.777.988.368,00	37.777.988.368,00	37.777.988.368,00	27.777.988.368,00	0,00	
		Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	27.777.988.368,00	27.777.988.368,00	27.777.988.368,00	27.777.988.368,00	27.777.988.368,00	27.777.988.368,00	0,00	

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		Baseline Realisasi APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun Berkenaan	-	-						

Sumber : BKD Kota Singkawang, 2023

Proyeksi pendapatan daerah Kota Singkawang mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,46 persen dari tahun 2023 hingga 2026. Komponen pendapatan daerah yang memiliki kontribusi yang paling tinggi adalah seluruh komponen pendapatan asli daerah. Asumsi peningkatan ini adalah dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang diproyeksikan meningkat pada tahun 2023 hingga 2026. Sementara untuk pendapatan transfer diproyeksikan meningkat sekitar 5 persen pada setiap tahunnya.

Untuk mencapai target-target pendapatan daerah tahun 2023-2026, terutama PAD yang notabene kewenangan daerah, maka upaya atau kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Upaya intensifikasi melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Penguatan data objek pajak;
3. Peningkatan *punishment* dan *reward* terhadap subjek pajak;
4. Optimalisasi objek retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil;
6. Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital;

Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui strategi:

1. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;
2. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah;

Belanja daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan daerah, permasalahan pembangunan daerah, dan memperkirakan situasi dan kondisi di masa mendatang. Berangkat dari hal tersebut, maka proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 7,41 persen atau masih lebih rendah dari proyeksi pendapatan daerah di atas. Hal ini terjadi karena kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah lebih bersifat ekspansi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah ke depan dan

kondisi yang dihadapi saat ini. Komponen belanja daerah yang meningkat paling tinggi adalah belanja tidak terduga diikuti belanja modal dan belanja operasional.

Berangkat dari hal tersebut maka kebijakan belanja daerah tahun 2023-2026 diarahkan untuk:

1. Program-program yang langsung mendukung permasalahan daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas SDM, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
2. Memenuhi program-program prioritas dan isu strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
3. Memenuhi belanja wajib terutama yang berkaitan dengan pemenuhan capaian pada standar pelayanan minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoptimalkan alokasi belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemilihan kepala daerah serentak dan sebagainya.

Proyeksi pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 11,95 persen. Untuk penerimaan daerah tidak mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2023 hingga 2026, sumber penerimaan pembiayaan hanya berasal dari SiLPA.

Sementara pembiayaan daerah hanya dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal BUMD.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pembahasan sub bab ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah dan rencana penggunaannya dalam beberapa tahun ke depan. Dalam menghitung kapasitas riil kemampuan daerah, sebelumnya harus diuraikan terlebih dahulu mengenai proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat. Adapun proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat daerah adalah sebagai berikut.

3.3.3. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi terhadap pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib penting untuk dilakukan sebagai bahan untuk menghitung kerangka pendanaan dalam membiayai pembangunan daerah beberapa tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sementara belanja yang bersifat wajib adalah alokasi anggaran atau belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemilihan kepala daerah, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah proyeksi belanja yang bersifat mengikat dan wajib daerah.

Tabel 3.19. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Kota Singkawang Tahun 2023-2029

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PENDAPATAN	922.493.952.280,00	1.017.888.806.555,00	1.049.313.331.352,11	1.107.106.766.560,68	1.193.059.560.511	1.287.899.612.502	1.392.759.728.187	7,46	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	211.421.219.810,00	232.961.578.881,40	270.379.005.390,43	305.974.556.222,09	351.870.739.655	404.651.350.604	465.349.053.194	15	
		Pendapatan Pajak Daerah	73.500.000.000,00	80.850.000.000,00	88.935.000.000,00	97.828.500.000,00	112.502.775.000	129.378.191.250	148.784.919.938	15%
		Hasil Retribusi Daerah	8.504.958.296,00	9.355.454.125,60	10.290.999.538,16	11.320.099.491,98	13.018.114.416	14.970.831.578	17.216.456.315	15%
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.964.741.812,00	9.159.453.083,80	10.533.371.046,37	12.113.376.703,33	13.930.383.209	16.019.940.690	18.422.931.794	15%

NO	URAIAN		PROYEKSI (Rp.)						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
			Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.451.519.702,00	133.596.671.672,00	160.619.634.805,90	184.712.580.026,78	212.419.467.031	244.282.387.085	280.924.745.148	15%
		PENDAPATAN TRANSFER	711.072.732.470,00	784.927.227.673,60	778.934.325.961,68	801.132.210.338,59	841.188.820.856	883.248.261.898	927.410.674.993	5%
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.877.047.000,00	714.371.757.930,00	704.851.082.731,00	723.344.804.946,38	759.512.045.194	797.487.647.453	837.362.029.826	5%
		Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.195.685.470,00	70.555.469.743,60	74.083.243.230,68	77.787.405.392,21	81.676.775.662	85.760.614.445	90.048.645.167	5%
							-			
		BELANJA	908.552.523.709,00	998.947.377.984,00	1.030.371.902.780,93	1.088.165.337.990,12	1.175.108.740.666	1.273.960.405.814	1.389.074.260.532	7,41

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA OPERASIONAL	761.328.025.879,00	834.827.367.819,00	878.089.265.542,47	894.542.442.565,34	958.094.556.702	1.026.360.833.111	1.099.703.373.220	6,98
	Belanja Pegawai	416.139.246.336,00	447.705.577.512,00	480.807.285.216,61	528.888.013.738,28	572.944.385.283	620.670.652.577	672.372.517.936	8,33%
	Belanja Barang dan Jasa	306.588.250.258,00	322.270.852.678,00	336.209.360.950,15	336.270.997.077,01	354.194.241.221	373.072.794.278	392.957.574.213	5,33%
	Belanja Hibah	37.047.909.285,00	63.143.055.629,00	59.193.949.175,71	27.316.894.530,05	28.682.739.257	30.116.876.219	31.622.720.030	5%
	Belanja Batuan Sosial	1.552.620.000,00	1.707.882.000,00	1.878.670.200,00	2.066.537.220,00	2.273.190.942	2.500.510.036	2.750.561.040	10%
	BELANJA MODAL	143.224.497.830,00	153.785.980.557,00	166.069.730.736,94	179.427.113.538,70	193.603.920.055	208.993.706.492	225.705.953.344	7,8
	Belanja Modal Tanah	417.173.000,00	438.031.650,00	481.834.815,00	530.018.296,50	574.168.821	621.997.083	673.809.440	8,33%

NO	URAIAN		PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
			Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.796.903.552,00	23.936.748.729,00	25.133.586.166,08	26.390.265.474,38	27.709.778.748	29.095.267.686	30.550.031.070	5%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.152.579.839,00	37.960.208.830,00	39.858.219.272,50	41.851.130.236,12	43.943.686.748	46.140.871.085	48.447.914.640	5%
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.263.423.439,00	86.397.131.548,00	95.036.844.703,36	104.540.529.173,70	114.649.598.345	125.736.214.505	137.894.906.447	9,67%
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.594.418.000,00	5.053.859.800,00	5.559.245.780,00	6.115.170.358,00	6.726.687.394	7.399.356.133	8.139.291.746	10%
							-			
		BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	10.334.029.608,00	13.787.093.498,48	14.195.781.886,08	23.410.263.908	38.605.866.211	63.664.933.969	64,91

NO	URAIAN		PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
			Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	10.334.029.608,00	13.787.093.498,48	14.195.781.886,08	23.410.263.908	38.605.866.211	63.664.933.969	64,91%
	SURPLUS / (DEFISIT)		13.941.428.571,00	18.941.428.571,00	18.941.428.571,18	18.941.428.570,56	17.950.819.845	13.939.206.688	3.685.467.655	11,95
	PEMBIAYAAN		13.941.428.571,00	18.941.428.571,00	18.941.428.571,00	18.941.428.571,00	(18.941.428.571)	(18.941.428.571)	(18.941.428.571)	11,95
		PENERIMAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.941.428.571,00	38.941.428.571,00	4,91						
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,33%
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun Berkenaan	-	-	0	0					

Proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan, yaitu sebesar 3,28 persen. Sementara untuk belanja wajib dasar mengalami peningkatan sebesar 5,39 persen. Prioritas pada urusan Kesehatan dan Pendidikan dipergunakan untuk menangani kasus Covid-19.

3.3.4. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan riil keuangan daerah yang akan dimiliki untuk membiayai pembangunan Daerah untuk 1 (satu) periode ke depan. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan mengurangkan penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Penggunaan komponen pengeluaran wajib dan mengikat dalam perhitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini adalah proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah ke depan.

Tabel 3.20.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2029

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	869.438.000.395,00	885.360.539.772,84	906.873.775.441,77	929.912.473.705,97	959.757.419.770,91
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	76.884.056.882,18	76.884.056.882,18	76.884.056.882,18	76.884.056.882,18	76.884.056.882,18
	Total Penerimaan	946.322.057.277,18	962.244.596.655,02	983.757.832.323,95	1.006.796.530.588,15	1.036.641.476.653,09
	Dikurangi					
4	Pengeluaran Wajib yang Mengikat	670.168.500.393,00	709.413.567.269,12	727.646.402.200,35	743.495.767.940,77	762.604.467.393,98
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	276.153.556.884,18	252.831.029.385,90	256.111.430.123,60	263.300.762.647,38	274.037.009.259,11

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam 1 (satu) periode ke depan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah mengalami berjalan fluktuatif dan cenderung menurun.

3.3.5. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan rencana penggunaan kapasitas riil kapasitas Keuangan Daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) prioritas penggunaan anggaran. Berikut ini adalah tabel rencana penggunaan kapasitas riil Keuangan Daerah.

Tabel 3.21. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2029

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	946.322.057.277,18	962.244.596.655,02	983.757.832.323,95	1.006.796.530.588,15	1.036.641.476.653,09
2	Prioritas I	670.168.500.393,00	709.413.567.269,12	727.646.402.200,35	743.495.767.940,77	762.604.467.393,98
3	Prioritas II	276.153.556.884,18	252.831.029.385,90	256.111.430.123,60	263.300.762.647,38	274.037.009.259,11

Rencana penggunaan kapasitas riil Keuangan Daerah ke depan di bagi ke dalam 2 (dua) prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas I, yaitu dialokasikan untuk membiayai pengeluaran wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
2. Prioritas II, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Alokasi anggaran untuk prioritas II tidak termasuk dalam membiayai anggaran pada komponen prioritas I yang terkait dengan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang alokasinya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan dalam kebijakan alokasi anggaran Daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dalam penyusunan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024. Isu strategis Pembangunan Kota Singkawang merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, hasil telaahan terhadap dokumen RPJPD Kota Singkawang 2025-2045, hasil telaahan terhadap dokumen RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 serta telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional.

4.1. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Singkawang dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi perangkat daerah. Rumusan Permasalahan Pembangunan secara detil disajikan dalam tabel di bawah ini.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan, berikut merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Singkawang sebagai berikut :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Urusan pemerintahan wajib untuk pendidikan merupakan tanggung jawab mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah cukup menonjol dan perlu mendapat perhatian adalah:

1. Masih terdapat anak usia sekolah menengah yang belum mendapatkan layanan.
2. Masih terdapat Anak Putus Sekolah / *Drop Out* pada usia sekolah.
3. Pendidikan inklusif yang belum tersebar merata di setiap sekolah.
4. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
6. Terdapat kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan.
7. Belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan.
8. Masih terdapat sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah yang belum sesuai standar.
9. Masih terdapat sarana dan prasarana lembaga PAUD yang kurang optimal.
10. Masih belum meratanya keberadaan sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kota Singkawang.
11. Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi dan memiliki sertifikasi.

B. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kota Singkawang :

1. Masih terdapat Kematian Bayi, balita dan ibu melahirkan.
2. Belum optimalnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk.
3. Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum sesuai standar.
4. Rendahnya kesadaran ibu hamil untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan konsumsi gizi seimbang.
5. Masih adanya balita gizi buruk dan kasus stunting.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan masyarakat hidup sehat (GERMAS).
7. Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan posyandu.
8. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas belum tercapai secara optimal.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib untuk penataan ruang kota merupakan tanggung jawab esensial yang harus dilaksanakan untuk memastikan lingkungan perkotaan yang teratur, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, sistem drainase, dan fasilitas publik harus direncanakan dengan cermat untuk mendukung mobilitas dan kenyamanan warga. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Singkawang :

1. Belum optimalnya pembangunan jalan.
2. Masih rendahnya jalan dalam kondisi baik.
3. Belum optimalnya pembangunan drainase.
4. Belum maksimalnya drainase dalam kondisi baik.
5. Masih terdapat drainase yang belum terkoneksi.
6. Belum terpenuhinya air bersih bagi masyarakat.
7. Belum terpenuhinya akses air minum layak.
8. Masih terjadinya pelanggaran tata ruang.
9. Belum taatnya terhadap RTRW.
10. Masih terjadinya banjir di beberapa titik lokasi permukiman.
11. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak

sesuai dengan IMB.

12. Terjadi pendangkalan dan penyempitan sungai.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

1. Masih belum terpenuhinya rumah layak huni.
2. Masih terdapatnya permukiman kumuh yang belum ditangani.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana permukiman.

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusifitas wilayah di Kota Singkawang, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama serta penanggulangan bencana. Pada aspek persentase penegakan produk hukum di Kota Singkawang, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Upaya peningkatan penegakan produk hukum selama ini terkendala pada belum optimalnya sinergi kewenangan dan koordinasi antar instansi terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Ketentraman Ketertiban Umum di Kota Singkawang.

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan.
2. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4. Mitigasi bencana yang tidak didasarkan pada analisis risiko yang komprehensif.
5. Belum optimalnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan.
6. Lamanya waktu genangan air/banjir.
7. Kurangnya sistem peringatan dini yang efektif.
8. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.
9. Belum optimalnya edukasi mengenai langkah-langkah mitigasi bencana.
10. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana.

11. Minimnya latihan dan simulasi bencana.
12. Kekurangan tenaga ahli dan relawan terlatih dalam penanganan bencana.
13. Tidak adanya tenaga ahli dalam bidang mitigasi bencana.

F. Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Urusan kesejahteraan sosial dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Kota Singkawang sudah melaksanakan fungsi pelayanan sosial, namun upaya tersebut masih perlu untuk ditingkatkan.

Jenis PPKS paling banyak di Daerah diantaranya keluarga miskin, wanita korban kekerasan, tuna tubuh, lanjut usia terlantar, anak terlantar, balita terlantar dan sebagainya. Artinya masih perlu upaya peningkatan cakupan pelayanan PPKS untuk periode selanjutnya.

1. Belum optimalnya pengelolaan data PPKS.
2. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dan linjamsos dasar secara menyeluruh terhadap PPKS.
3. Belum optimalnya pemberdayaan sosial PPKS/PPKS.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan sosial.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Urusan pemerintahan tentang tenaga kerja melibatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, dan implementasi yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi tenaga kerja serta mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan stabilitas pasar kerja. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka.
2. Masih adanya kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pencari kerja dengan

lapangan kerja yang tersedia.

3. Masih adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
4. Kurangnya Inovasi dan Dukungan Kewirausahaan.
5. Belum tersedianya regulasi perlindungan tenaga kerja.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan daerah yang memperhatikan isu gender adalah Partisipasi angkatan kerja perempuan, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Selain fokus pemberdayaan perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak juga masih perlu ditingkatkan.

1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.
2. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
3. Belum optimalnya program responsif gender.

C. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kota Singkawang masih perlu untuk dioptimalkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya daerah rawan pangan meskipun dari sisi cadangan pangan tercukupi. Hal lain adalah keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata, belum optimalnya penganekaragaman pangan lokal yang disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan pangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya data pangan.

2. Belum optimalnya ketahanan pangan masyarakat.
3. Masih rendahnya skor pola pangan harapan.
4. Masih terdapat daerah rawan pangan.

D. Pertanahan

Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan dan penguasaan tanah. Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah aset tanah pemerintah yang belum dilakukan sertifikasi dan pemasangan patok batas tanah.
2. Masih tingginya persentase luas lahan/tanah yang belum bersertifikat.
3. Masih terdapat kebijakan tentang pengelolaan pertanahan yang belum disusun.

E. Lingkungan Hidup

Terciptanya kemajuan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu cita-cita pembangunan. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

1. Masih belum optimalnya upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R.
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4. Masih banyaknya kegiatan/usaha yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan.
5. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan.
6. Masih terjadinya pencemaran air.
7. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat erat kaitannya dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Secara umum, kualitas data kependudukan di Kota Singkawang masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian. Selain itu, adanya pemekaran kecamatan di Kota Singkawang juga menjadi tantangan tersendiri.

1. Masih adanya penduduk lahir yang belum melaporkan pencatatan kelahiran.
2. Masih adanya penduduk meninggal yang belum melaporkan pencatatan kematian.
3. Belum semua warga yang wajib ber-KTP melakukan perekaman KTP elektronik.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan lain yang perlu menjadi fokus pembangunan adalah terkait pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, kelahiran anak dan menekan angka kematian ibu. Beberapa permasalahan terkait pengendalian penduduk dan KB di Kota Singkawang adalah terkait partisipasi penduduk dalam program KB yang masih belum optimal walaupun laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang sudah semakin menurun sejak sepuluh tahun sebelumnya. Berikut adalah rumusan masalah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB.
2. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk.
3. Belum optimalnya edukasi tentang program keluarga berencana.

H. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya daerah rawan kecelakaan.
2. Belum optimalnya PAD dari sektor perparkiran.
3. Masih terdapat angkutan umum yang belum melakukan uji KIR secara berkala.
4. Masih rendahnya panjang jalan kota dan jalan lingkungan yang mendapatkan penerangan.
5. Masih kurangnya sarana pendukung dalam penanganan layanan PJU.
6. Masih belum optimalnya pelayanan angkutan umum.
7. Menurunnya tingkat kelancaran lalu lintas di beberapa ruas jalan kota.

I. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Sarana pengelolaan Jaringan komunikasi belum optimal.
2. Masih banyaknya aplikasi, infrastruktur dan keamanan sistem yang belum memenuhi standar TIK.
3. Masih rendahnya tingkat literasi digital.
4. Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi daerah.
5. Belum optimalnya prosedur penanganan kedaruratan.
6. Belum tersedianya ekosistem TIK.

J. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal menjadi prioritas pembangunan Kota Singkawang pada beberapa tahun ke depan, karena merupakan salah satu faktor untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Singkawang, yaitu:

1. Masih terdapatnya masalah dalam proses perizinan.
2. Masih kurangnya regulasi yang mendukung perizinan dan investasi.
3. Masih kurang optimalnya data investasi serta data potensi investasi serta data potensi investasi Kota Singkawang yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di kota Singkawang.
4. Masih banyaknya pengusaha yang tidak tertib melaporkan laporan kegiatan penanaman modal.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi capaian kinerja dalam urusan koperasi dan UKM belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kelembagaan koperasi yang masih memerlukan penataan serta pengembangan UKM. Tantangan atau permasalahan kedepan yang dihadapi untuk memperbaiki sektor Koperasi dan UKM di Kota Singkawang antara lain:

1. Masih kurang akuratnya data UKM yang memiliki perizinan.
2. Masih belum optimalnya pengelolaan produk unggulan sebagai cinderamata khas daerah.
3. Masih rendahnya pengawasan produk UKM yang memiliki sertifikasi merek, sertifikasi halal dan izin edar Badan POM.
4. Masih rendahnya koperasi aktif.
5. Kompetensi SDM pengurus koperasi masih rendah.
6. Belum optimalnya kompetensi SDM pelaku UKM.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Singkawang. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real.

Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kota Singkawang secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di samping itu, pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya event-event olahraga reguler sebagai sarana pembibitan.

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi dan cabang olahraga.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga.
3. Belum optimalnya pembinaan di bidang kepemudaan.
4. Belum sinerginya program pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

M. Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kota Singkawang masih belum optimal. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan statistik adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
2. Belum maksimalnya peran dan fungsi produsen data dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

N. Persandian

Di Kota Singkawang, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progress yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang masih minim.

1. Belum optimalnya pelaksanaan keamanan informasi daerah.

O. Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, minimnya upaya menjadikan budaya lokal sebagai katalisator pembangunan daerah menjadi masalah pokok. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai bahan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini belum tercapai karena situs-situs kebudayaan belum dijadikan sebagai objek pembangunan pariwisata.

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik.
2. Belum memadainya regulasi yang mendukung kemajuan kebudayaan.
3. Belum memadainya mekanisme pendampingan dan pengembangan lembaga dan pranata kebudayaan.
4. Belum tersedianya SDM kebudayaan dalam mendukung kemajuan kebudayaan.

P. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Secara umum, kinerja layanan perpustakaan di Kota Singkawang sudah cukup baik.

Namun, layanan tersebut perlu ditingkatkan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusif yakni perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca tetapi memiliki fungsi lain seperti sebagai tempat diskusi, tempat pelatihan, mini studi dan sebagainya, sehingga semakin memperluas sarana proses belajar masyarakat. Dalam mewujudkan perpustakaan inklusif diperlukan berbagai upaya diantaranya pembangunan sarana prasarana, perluasan layanan, peningkatan

kapasitas SDM pengelola dan sebagainya. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Perpustakaan di Kota Singkawang.

1. Masih kurangnya SDM dalam pengembangan perpustakaan.
2. Masih kurang optimalnya pengelolaan perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat.

Q. Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti terkait terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Secara umum, kedua indikator tersebut masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut dikarenakan belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sarana prasarana kearsipan pada level daerah dan satuan kerja masih terbatas, serta SDM pengelola arsip masih kurang. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kearsipan di Kota Singkawang.

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan.
2. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor peternakan dan perikanan. Dukungan serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang peternakan dan perikanan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil ternak dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan.

2. Belum optimalnya produksi perikanan.
3. Belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan.

B. Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kota Singkawang. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kompetensi pelaku IKM.
2. Masih lemahnya daya saing produk.
3. Keterbatasan modal kerja dan/atau modal investasi.

C. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kota Singkawang terutama di wilayah utara Kalimantan Barat. Tingginya potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM.

1. Belum tersedianya asosiasi pengelola paket pariwisata.
2. Belum optimalnya pembinaan dan sinergitas antar pelaku pariwisata.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana wisata.
4. Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata.
5. Belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata.
6. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata.
7. Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif.

D. Pertanian

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan peternakan. Beberapa keunggulan sektor pertanian dan peternakan adalah pada komoditas ayam potong dan telur. Optimalisasi serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang pertanian dan peternakan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah:

1. Belum optimalnya produktivitas hasil pertanian.
2. Belum optimalnya kapasitas SDM petani.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian.
4. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
5. Belum optimalnya lahan pertanian yang dilindungi.

E. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan perbaikan layanan urusan perdagangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah:

1. Belum optimalnya operasi pasar rakyat yang dibangun.
2. Belum optimalnya pembinaan dan penataan usaha perdagangan.
3. Belum optimalnya pendataan potensi perdagangan.
4. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perdagangan.
5. Masih terbatasnya sarana promosi usaha perdagangan.
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana pasar rakyat.

Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

A. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kota Singkawang. Orientasi pembangunan berbasis kinerja outcome/impact perlu ditingkatkan, serta belum terbangunnya manajemen kinerja yang baik berupa pembagian indikator kinerja yang saling mendukung dan terkait antara Wali Kota dengan kepala Perangkat Daerah dan struktur di bawahnya. Beberapa kinerja

perencanaan masih berorientasi output berupa ketersediaan dokumen perencanaan. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja.
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja.
3. Belum optimalnya implementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis.

B. Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Unsur penunjang pemerintahan keuangan juga memiliki isu atau permasalahan urgen berupa upaya mempertahankan capaian akuntabilitas keuangan yang telah mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1. Masih terdapat potensi pendapatan yang belum dioptimalkan.
2. Belum optimalnya database perpajakan.
3. Belum optimalnya pajak daerah.

C. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Di Kota Singkawang, masalah pokok dari urusan kepegawaian, yaitu belum optimalnya kualitas kepegawaian yang disebabkan oleh manajemen kepegawaian yang belum maksimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah:

1. Masih belum terpenuhinya kebutuhan SDM pada perangkat daerah.
2. Masih lemahnya reward dan punishment.

D. Pendidikan dan Pelatihan

Belum optimalnya manajemen ASN, juga terkait belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur. Hal ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih terpusat, serta skala prioritas pelaksanaan diklat yang berubah. Pemetaan masalah terkait pendidikan dan pelatihan di Kota

Singkawang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen karir.
2. Belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM.

E. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas untuk melakukan riset oleh Perangkat Daerah yang mampu urusan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama penelitian juga dilaksanakan secara terbagi-bagi/ terpecah-pecah di tingkat Perangkat Daerah dengan koordinasi yang lemah.

1. Belum dijadikannya hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan.
2. Belum optimalnya inovasi daerah.

F. Pengawasan

Urusan pemerintahan tentang pengawasan mencakup berbagai tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan merupakan fungsi penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan efisiensi dalam berbagai sektor kehidupan.

1. Masih rendahnya budaya sadar risiko.
2. Masih rendahnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
3. Masih adanya temuan pemeriksaan yang berulang.

G. Sekretariat DPRD

Secara umum, kinerja capaian Sekretariat DPRD Kota Singkawang cukup baik yakni sudah mencapai target yang ditentukan. Namun, dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan serta koordinasi dengan Perangkat

Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kota Singkawang.

1. Belum optimalnya pelayanan kepada anggota DPRD.
2. Belum terpenuhinya SDM pada Sekretariat DPRD.

H. Sekretariat Daerah

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan Wali Kota. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Adapun koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah menghasilkan nilai IKM yang meningkat setiap tahun. Tantangan yang masih dihadapi fungsi Sekretariat Daerah, yaitu:

1. Belum optimalnya rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat.
2. Belum optimalnya produk hukum dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan daerah.
3. Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Pelaksanaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilakukan secara elektronik.
5. Belum optimalnya pemenuhan SDM pengelola PBJ di Kota Singkawang.
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.
7. Belum terpenuhinya SPM Kota Singkawang.

I. Kewilayahan

Fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan, salah satunya dalam rangka menopang kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik.
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan.

J. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum terkait pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik, sehingga terkait upaya membangun kohesivitas sosial dan peningkatan demokrasi dan kehidupan politik yang kondusif di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kota Singkawang memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan dini gangguan stabilitas wilayah.

4.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis Kota Singkawang dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Singkawang tahun 2025-2029.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

A. Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGS, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim,

perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan

ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Kesadaran Aksi Global terkait *Climate Action* (Aksi Iklim)

Konferensi Tingkat Tinggi *climate action* (Aksi Iklim) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2019 telah berhasil menyepakati roadmap untuk pijakan aksi bersama. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan *stakeholders* lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak *roadmap* disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (foundation.org, 2020).

Sesuai roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat

diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara-negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Terkait hal tersebut maka Kota Singkawang harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kota Singkawang dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan kedepan.

C. Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia sedang berada dalam permulaan era revolusi industri ke 4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (*smart*) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi *Internet of Things* (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan

otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Istilah Revolusi Industri Keempat pertama kali dikenalkan oleh Klaus Schwab (2015), ketua eksekutif World Economic Forum, dalam artikel yang diterbitkan oleh Foreign Affairs dengan judul "Menguasai Revolusi Industri Keempat". Topik tersebut kemudian menjadi tema pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia tahun 2016, di Davos-Klosters, Swiss. Di mana selanjutnya pada 10 Oktober 2016, Forum Ekonomi Dunia mengumumkan pembukaan pusat revolusi industri ke-4 di San Francisco.

Menurut Schwab (2015) dalam revolusi industri ke-4 ini ditandai dengan penggabungan antara; perangkat keras, perangkat lunak, dan biologi (sistem fisik siber). Selain itu terjadi kemajuan yang signifikan dalam komunikasi dan konektivitas. Secara umum era ini ditandai dengan terobosan dalam teknologi baru di bidang-bidang seperti robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, internet of things, industri internet of things, desentralisasi konsensus, teknologi nirkabel generasi kelima, percetakan 3 dimensi (3D) , dan kendaraan otonom penuh (*fully autonomous vehicles*).

Terdapat empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama, “interkoneksi” yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT), atau Internet of People (IoP). Kedua, “transparansi informasi” dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk menginformasikan keputusan. Inter-konektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah “asistensi teknis” yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah “keputusan terdesentralisasi” yang merupakan kemampuan sistem

fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin (Gronau et al, 2016).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “*disruption*” industri di setiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial.

Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *cyber security*, *application designer*, *gene designer*, dan lain lain.

Pada bidang organisasi dan institusi publik, disruption ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan.

Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini

berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “*me-centered emergency*” (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

D. Konflik Regional: Sengketa Wilayah di Laut China Selatan

Sengketa Laut China Selatan melibatkan klaim terhadap wilayah maritim dan kepulauan di antara beberapa negara berdaulat di kawasan tersebut. Pada awalnya yang terlibat dalam konflik ini adalah; Brunei Darussalam, Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Akan tetapi sejak Maret 2016 Indonesia mulai terlibat dalam konflik ini dengan tidak diakuinya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh China dan berkembang ke arah konflik terhadap kepulauan Natuna Utara. China menganggap wilayah kepulauan Natuna utara bukan wilayah Indonesia dan oleh karena itu menganggap setiap upaya petugas keamanan laut Indonesia mengusir nelayan dan kapal penangkap ikan China tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya Indonesia menganggap setiap upaya nelayan dan kapal penangkap ikan China memasuki wilayah kepulauan Natuna adalah pelanggaran batas wilayah dan oleh karenanya harus diproses secara hukum Indonesia.

Secara ekonomi Laut China Selatan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian regional dan dunia. Sepertiga dari perdagangan maritim dunia

melewati Laut Cina Selatan setiap tahunnya dengan nilai US \$ 3,37 Triliun. Bagi China peran laut ini sangat penting karena sekitar 80% impor energi China melewati wilayah laut ini. Selain itu 39,5 persen dari total perdagangan Tiongkok melewati Laut Cina selatan (UNCTAD, 2018).

Selain sebagai jalur pelayaran yang sangat strategis dan penting, potensi sumber daya alam di wilayah Laut Cina Selatan juga sangat besar. Selain potensi ikan laut yang sangat besar, wilayah ini juga teridentifikasi memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Kementerian Sumber Daya Geologi dan Pertambangan Republik Rakyat China memperkirakan bahwa Laut Cina Selatan berpotensi mengandung 17,7 miliar ton minyak mentah. Sebagai perbandingan, Kuwait, negara kaya minyak memiliki memiliki cadangan minyak bumi sebesar 13 miliar ton (Valencia, 2006). Sedangkan untuk cadangan gas bumi, menurut laporan *Energy Information Administration (EIA)* (2016) , estimasi sumber daya gas alam di wilayah tersebut antara 190 triliun kaki kubik hingga 500 triliun kaki kubik.

Terkait perselisihan wilayah ini, Pemerintah Indonesia secara aktif, baik melalui jalur diplomasi maupun keamanan, berusaha mempertahankan aplikasi zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Hal ini dipertegas dengan kunjungan kepulauan Natuna oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dengan kapal perang untuk menunjukkan otoritas Indonesia. Beliau memimpin delegasi tingkat tinggi, termasuk Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menteri negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan hal itu dimaksudkan untuk mengirimkan "pesan yang jelas" bahwa Indonesia "sangat serius dalam upayanya untuk melindungi kedaulatannya".

Terkait dengan keseriusan Pemerintah Indonesia melindungi kedaulatannya, saat ini Indonesia mengerahkan lebih banyak pasukan dan kapal patroli, dan untuk memperkuat pangkalan angkatan laut di wilayah tersebut. Sejak awal tahun 2020 disiagakan 600 pasukan marinir dan delapan kapal perang angkatan laut dari TNI AL termasuk fregat kelas Ahmad Yani, korvet kelas Bung Tomo, dan korvet ASW kelas Kapitan Pattimura dikirim ke daerah tersebut dengan dukungan TNI AL. Naval Aviation CN-235 MPA, TNI AU juga mengirimkan empat buah F-16 dan satu Boeing 737-2x9 Surveillance, serta memasang pesawat BAE Hawk.

Perkembangan kondisi di wilayah laut China Selatan perlu mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kedepan. Hal ini karena sepertiga dari jalur perdagangan dunia melewati wilayah tersebut. Selain itu Indonesia juga berbatasan langsung dengan wilayah tersebut, dan bahkan juga terlibat konflik teritorial dengan China di wilayah kepulauan Natuna bagian utara. Oleh karena itu perkembangan kondisi di wilayah tersebut perlu dicermati dengan serius karena terkait secara langsung dengan perekonomian Indonesia dari sisi distribusi perdagangan internasional dan juga terkait secara langsung dari sisi pertahanan keamanan karena keterlibatan langsung pemerintah Indonesia pada konflik teritorial di wilayah kepulauan Natuna bagian utara.

E. Perang Dagang Antara China Dengan Amerika

4.2.2. Isu Kebijakan Nasional

A. Rantek RPJMN Tahun 2025-2029

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rantek RPJMN 2025 - 2029 diarahkan untuk mencapai Visi Indonesia Emas Menuju 2045 yaitu “NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”. Isu strategis pembangunan nasional berdasarkan Rantek RPJMN Tahun 2025 - 2029 meliputi :

1. Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA
2. Masih rentannya ketahanan air, energi dan pangan
3. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah
5. Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
6. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar
7. Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal dan terluar

4.2.3. Isu Strategis Kalimantan Barat

A. Rantek RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Rantek Prov Kalbar masih dalam proses penyusunan

4.2.4 Isu Strategis Kota Singkawang

Isu-isu Strategis pembangunan Kota Singkawang merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Kalimantan Barat. Isu Strategis merupakan jangkar (*anchor*) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (*compass*) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Singkawang pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kota Singkawang dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

merupakan salah satu prioritas utama bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. SDM yang berkualitas dan kompeten tidak hanya menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Untuk memastikan semua upaya ini berjalan efektif, pengawasan dan evaluasi terus dilakukan. Pemerintah secara rutin memantau dan mengevaluasi program-program peningkatan kualitas SDM untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, juga sangat dihargai untuk memperbaiki dan meningkatkan program yang ada.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan SDM Indonesia dapat menjadi lebih kompeten, adaptif, dan siap bersaing di tingkat global. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan SDM yang unggul dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

2. Pengembangan Potensi Daerah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan potensi daerah merupakan salah satu strategi utama yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Singkawang keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, budaya, hingga keunggulan geografis yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Dengan memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui berbagai upaya pengembangan potensi daerah, diharapkan perekonomian daerah Kota Singkawang dapat tumbuh secara signifikan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi daerah yang dikelola dengan baik akan menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan nasional, membawa Kota Singkawang menuju masa depan yang lebih makmur dan sejahtera.

3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Pemenuhan infrastruktur dasar merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar yang mencakup jalan, jembatan, listrik, air bersih, sanitasi dan telekomunikasi adalah fondasi penting yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan keseharian masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar ini.

Untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar berjalan lancar, kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan sangat diperlukan. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga donor dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Kolaborasi yang baik antara semua pihak akan mempercepat proses pembangunan dan memastikan hasil yang lebih optimal.

Pengawasan dan evaluasi juga menjadi bagian integral dalam pemenuhan infrastruktur dasar. Pemerintah melakukan monitoring secara berkala terhadap proyek-proyek infrastruktur untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang efektif, serta memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan adalah dua konsep yang saling terkait dan menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan yang holistik. Lingkungan hidup yang sehat dan lestari adalah dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung perlindungan lingkungan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan ekosistem bagi generasi mendatang.

Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, kita dapat mewujudkan Kota Singkawang yang lebih hijau, bersih dan berkelanjutan.

BAB V

REKOMENDASI

5.1. VISI DAN MISI DAERAH

Visi dan misi pembangunan Kota Singkawang merupakan harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan, melalui upaya dan tindakan yang harus dicapai dalam jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan yakni tahun 2025-2045.

Visi dan misi Pembangunan Kota Singkawang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menentukan arah pembangunan, dan dapat dijadikan landasan atau sebagai dasar untuk menjadi acuan untuk merancang inovasi mendukung perkembangan dan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2025 - 2045

Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2025 – 2045 sebagai berikut :

5.1.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Singkawang yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka panjang serta sejalan dengan visi RPJPD Kalimantan Barat “ Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dan mengacu visi Indonesia Emas 2045. Selain itu Visi pembangunan jangka panjang daerah juga mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis.

Berdasarkan permasalahan utama dan isu strategis pembangunan Kota Singkawang yaitu : (1) belum optimalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang dan daya saing SDM; (2) Pembangunan Infrastruktur dasar antar wilayah belum merata; (3) Penyelenggaraan Penataan ruang dan Pengendalian Lingkungan Hidup Belum Optimal; (4) Daya saing ekonomi dan ketahanan sektor pariwisata belum optimal; (5) Tata Kelola Pemerintahan belum Optimal.

Tabel 5.1
Perumusan Visi

No	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Belum optimalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing sumber daya manusia	Creavite dan berdaya saing	Singkawang Cemerlang 2045 atau Singkawang Creative, Maju Merata, Berkelanjutan, Atraktif dan Berdaya Saing
2.	Pembangunan Infrastruktur dasar belum merata.	Maju dan Merata	
3.	Penyelenggaraan Penataan ruang dan Pengendalian Lingkungan Hidup belum optimal	Berkelanjutan	
4.	Daya saing ekonomi dan ketahanan sektor pariwisata belum optimal	Atraktif	
5.	Tata Kelola Pemerintahan belum optimal	Berdaya saing	

Berdasarkan permasalahan utama pembangunan di Kota Singkawang, maka dirumuskan Visi dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045 adalah :

Singkawang Cemerlang 2045;
Creative, Maju Merata, Atraktif, Berkelanjutan dan
Berdaya Saing

Penjelasan Visi Singkawang Cemerlang 2045 adalah sebagai berikut :

- **Creative (Kreatif)**

Kreatif berdasarkan KKBI adalah 1) memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; 2) bersifat (mengandung) daya cipta: pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi

Konteks Visi kreatif adalah bahwa menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi, maka diharapkan sumber daya manusia Kota Singkawang memiliki daya kreatif, inovatif sehingga kualitas kerjanya lebih produktif dan memiliki daya saing yang tinggi.

- **Maju Merata**

Singkawang sebagai kota dengan luas wilayah terkecil kedua di Kalimantan Barat, maka kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang social dan ekonomi akan berjalan baik, jika didukung dengan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara merata diseluruh wilayah Kota Singkawang, yang meliputi jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi sehingga mendukung kemajuan ekonomi di Kota Singkawang akan semakin berkembang.

- **Atraktif**

Atraktif mengacu pada Kota Singkawang yang merupakan daerah tujuan wisata, baik wisata budaya, wisata alam maupun wisata kuliner, sehingga diharapkan Pengembangan pariwisata dapat lebih atraktif, agar wisatawan yang berkunjung di Kota Singkawang dapat lebih lama, sehingga dampaknya dapat menggerakkan perekonomian di Kota Singkawang.

- **Berkelanjutan**

Konteks berkelanjutan adalah Pembangunan kota Singkawang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

- **Berdaya Saing**

Berdaya saing memiliki makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar bahkan lebih tinggi dari daerah lain.

Untuk mewujudkan daya saing Kota Singkawang melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, manajemen SDM yang berkualitas, pelayanan publik yang prima serta, serta tatakelola pemerintahan yang responsif dan adaptif.

Sasaran Visi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045

Visi Kota Singkawang yakni Singkawang Cemerlang 2045; Kota Singkawang Creative, Maju merata, Berkelanjutan, Atraktif dan Berdaya Saing tercermin melalui 5 (lima) sasaran visi yaitu:

- Peningkatan pendapatan per kapita dengan indikatornya adalah PDRB per kapita dan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan;
- Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikatornya adalah Tingkat Kemiskinan, Rasio gini, Kontribusi PDRB Kab/Kota;
- Kepemimpinan Daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan indikatornya adalah Indeks Daya Saing Daerah;
- Peningkatan daya saing Sumber daya manusia dengan indikatornya adalah IPM;
- Penurunan emisi GRK menuju net zero emission dengan indikatornya adalah Penurunan intensitas emisi GRK.

5.1.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Telaah Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Penyusunan misi daerah untuk mencapai visi dan sasaran visi harus memperhatikan misi pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan untuk mendukung Indonesia Emas. Penjabaran 8 (delapan) misi tersebut dapat dicermati sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
2. Transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas dengan akselerasi pengembangan iptek, ekonomi produktif dan sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, umkm dan koperasi dan penerapan kota untuk mendukung pertumbuhan.
3. Transformasi tata kelola pemerintahan untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah dengan tujuan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, pemerintahan yang efektif dan responsif serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
5. Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan meningkatkan ketangguhan multi-dimensi meliputi ketangguhan sosial-budaya, pembangunan karakter dan keseimbangan hubungan timbal-balik antara komponen sosial-budaya dan ekologi serta optimalisasi modal sosial dan modal budaya masyarakat khususnya dalam menghadapi risiko bencana dan iklim dan pelestarian sumberdaya alam.
6. Pembangunan kewilayahan yang diwujudkan untuk peningkatan pemerataan dan keadilan pembangunan dan diperkuat melalui transformasi supremasi hukum, stabilitas, ketangguhan diplomasi dan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang sesuai dengan konteks dan karakter masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan yang menjadi kunci

pengembangan wilayah dan mendukung agenda transformasi.

8. Kesenambungan pembangunan yang terwujud dalam pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan.

Delapan misi di atas termasuk ke dalam upaya strategis untuk mencapai visi dan sasaran visi Provinsi Kalimantan Barat.

Misi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025-2045

Misi merupakan Langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi pembangunan jangka panjang mengacu pada perumusan visi, masalah pokok pembangunan dan berdasarkan faktor lingkungan strategis.

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 dengan memperhatikan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045. Maka untuk mewujudkan visi Singkawang Cemerlang 2045 Kota Singkawang Kompetitif, Maju, Merata dan Berkelanjutan, ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial yang inklusif
2. Ekonomi Inklusif dan berdaya saing
3. Transformasi Tata Kelola yang adaptif
4. Penataan Kota yang Berkualitas, Maju dan Merata
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Adapun perumusan dan penjelasan Misi RPJPD Kota Singkawang adalah sebagai:

Misi 1 : Transformasi Sosial yang Inklusif

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang yang memiliki daya kreatif, inovatif sehingga kualitas kerjanya lebih produktif dan memiliki daya saing yang tinggi, maka upaya yang dilakukan adalah melalui Transformasi sosial yang inklusif. Sehingga diharapkan akan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota

Singkawang, menurunkan kemiskinan ekstrem menuju nol, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang

Misi 2: Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing

Misi Ekonomi Yang Inklusif dan Atraktif adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang.

Kota Singkawang sebagai Kota tujuan wisata di Kalimantan Barat memiliki berbagai potensi wisata, baik alam, budaya dan kuliner. *Branding* Singkawang sebagai Kota Tertoleran di Indonesia merupakan kekuatan yang dimiliki Kota Singkawang untuk menarik wisatawan baik lokal maupun manca negara untuk dapat mengunjungi destinasi wisata di Kota Singkawang. Peluang ini menjadi kekuatan untuk menciptakan Pariwisata yang atraktif, sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Misi 3: Transformasi Tata Kelola yang Adaptif

Untuk mewujudkan Kota Singkawang yang kreatif, inovatif, produktif dan mempunyai daya saing tinggi, maka upaya yang dilakukan adalah melalui transformasi tata Kelola yang adaptif.

Akselerasi reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, melalui sistem birokrasi yang adaptif, *agile*, fokus pada pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai bentuk akselerasi perubahan perlu dilakukan transformasi organisasi meliputi perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut tentunya akan berjalan optimal dengan didukung dengan kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi.

Misi 4: Infrastruktur Perkotaan dan Pemukiman yang berkualitas

Untuk mewujudkan Penataan Kota yang berkualitas, Maju dan Merata upaya yang akan dilaksanakan adalah dengan penataan infrastruktu perkotaan dan pemukiman yang

berkualitas.

Infrastruktur memegang peranan penting untuk kemajuan Kota Singkawang, Pembangunan infrastruktur menjadi landasan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan Pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyediaan air bersih, sanitasi dan pemukiman yang layak merupakan bagian dari infrastruktur perkotaan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Singkawang.

Infrastruktur transportasi jalan, jembatan akan membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

MISI 5: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berkelanjutan

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Misi ini berkaitan dengan Kota Singkawang yang memiliki tantangan terkait masalah lingkungan hidup berupa kerusakan lahan akibat pertambangan ilegal, dan pencemaran air dari aktivitas domestik dan industri. Selain itu kerusakan lingkungan juga diakibatkan masalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai dan kerusakan lingkungan lainnya.

Selain itu Kota Singkawang termasuk kota yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, hal ini ditunjukkan dengan Indek Risiko Bencana tahun 2021 dan tahun 2022 tidak mengalami perubahan sebesar 155,47.

5.2.RANGKAIAN KINERJA

Rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga Tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, yang dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan visi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2

Rekomendasi Rangkaian Kinerja

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang				
					2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4		7	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,42	75,12	75,35053	75,58105	75,81158	76,04211
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
			a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	56,51	55	52,94737	50,89474	48,84211	46,78947
			b)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,1	18,06	17,43579	16,81158	16,18737	15,56316
			3	Penanganan Tuberkulosis:						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang				
					2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4		7	9	10	11	12	13
			a)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91,4	90	90,52632	91,05263	91,57895	92,10526
			b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)		90	90,52632	91,05263	91,57895	92,10526
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99.83	100	100	100	100	100
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:						
			a)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang					
					2023	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4		7	9	10	11	12	13	
					pada asesmen tingkat nasional untuk:						
					i) Literasi Membaca		11,09	14,27789	17,46579	20,65368	23,84158
					ii) Numerasi		2	5,236842	8,473684	11,71053	14,94737
					b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
					i) Literasi Membaca	53,23	60,28	62,37053	64,46105	66,55158	68,64211
					ii) Numerasi	12,94	49,65	52,3	54,95	57,6	60,25
					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,21	8,5	8,684211	8,868421	9,052632	9,236842
					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,94	13,5	13,58421	13,66842	13,75263	13,83684

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13
			6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		3,41	3,662632	3,915263	4,167895	4,420526
			7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		59	59,84211	60,68421	61,52632	62,36842
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	4,7	4,3	4,194737	4,089474	3,984211	3,878947
			9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	16,8	25	28,42105	31,84211	35,26316	38,68421
			10 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		25	26,05263	27,10526	28,15789	50

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang				
					2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4		7	9	10	11	12	13
2	Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Atraktif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	13,25	16,6	18,32263	20,04526	21,76789	23,49053
			12	Pengembangan Pariwisata						
				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,92	4,64	4,914737	5,189474	5,464211	5,738947
				b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	7267	33,33	34,32632	35,32263	36,31895	37,31526
			13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)						
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%)		96,51	96,55158	96,59316	96,63474	96,67632
			b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)		1,99	2,095789	2,201579	2,307368	2,413158
			c) Rasio Kewirausahaan Daerah		19,4	19,51053	19,62105	19,73158	19,84211
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		2,58	2,602105	2,624211	2,646316	2,668421
			e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)		4,47	4,515789	4,561579	4,607368	4,653158
			15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	7,5	7,289474	7,078947	6,868421	6,657895
			16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,41	58	58,89474	59,78947	60,68421	61,57895

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang					
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	
			17	Tingkat Penguasaan IPTEK:						
				Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama						
		Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
			a)	Indeks Ekonomi Hijau Daerah		69,47	70,53368	71,59737	72,66105	73,72474
			b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		38	40,99789	43,99579	46,99368	49,99158
		Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		6	6,078947	6,157895	6,236842	6,315789
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		10,46	10,20947	9,958947	9,708421	9,457895

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang					
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,02	36	35,05789	34,11579	33,17368	32,23158
			22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	32,1	33,82	33,88474	33,94947	34,01421	34,07895
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
			a)	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)						
			b)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	99,2	99,32	99,35579	99,39158	99,42737	99,46316

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang				
					2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4		7	9	10	11	12	13
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum		56,75	58,06579	59,38158	60,69737	62,01316
			25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,34	3,427368	3,514737	3,602105	3,689474
			26	Indeks Pelayanan Publik	4,22	4,25	4,289474	4,328947	4,368421	4,407895
			27	Indeks Integritas Nasional	74,31	79,99	80,85158	81,71316	82,57474	83,43632
		Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Indeks Pembangunan Hukum						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang					
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	
			29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		73,07	73,98474	74,89947	75,81421	76,72895
			30	Indeks Demokrasi Indonesia		Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Stabilitas ekonomi makro daerah	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		2,9	2,931579	2,963158	2,994737	3,026316
			32	Tingkat Inflasi (%)	1,74	3,8	3,763158	3,726316	3,689474	3,652632
			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
			a)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		27,43	29,50211	31,57421	33,64632	35,71842
			b)	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		0,26	0,266842	0,273684	0,280526	0,287368

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang					
					2023	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4		7	9	10	11	12	13	
				c)	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan		5,62	1598,501	3191,381	4784,262	6377,142
				d)	Total Kredit/PDRB (%)		26,6	28,47895	30,35789	32,23684	34,11579
			34		Inklusi Keuangan (%)		90,4	90,84526	91,29053	91,73579	92,18105
5	Ketahanan Sosial dan Budaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	-	53,38	54,03263	54,68526	55,33789	55,99053
			38		Indeks Toleransi / Indeks Kerukunan Umat Beragama		79,78	80,18158	80,58316	80,98474	81,38632
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		65,96	66,20947	66,45895	66,70842	66,95789
			40		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,372	0,3	0,294737	0,289474	0,284211	0,278947

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang				
					2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4		7	9	10	11	12	13
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		0,46	0,468789	0,477579	0,486368	0,495158
			42	Kualitas Lingkungan Hidup						
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,69	73,83	73,92737	74,02474	74,12211	74,21947
				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		5	7,368421	9,736842	12,10526	14,47368
				c) Pengelolaan Sampah						
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	77,44	77,4	78,58947	79,77895	80,96842	82,15789
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	85,3	85,3	86,07368	86,84737	87,62105	88,39474

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang					
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	
7	Penataan Kota Yang Berkualitas, Maju Dan Merata	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
				a) Ketahanan Energi						
				Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)		1041	1081,421	1121,842	1162,263	1202,684
				Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)						
				b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,29	9,27-7,74	9,676842	10,08368	10,49053	10,89737
				c) Ketahanan Air						
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)		0,33	0,375789	0,421579	0,467368	0,513158

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		BASELINE	Target RPJPD Kota Singkawang				
					2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4		7	9	10	11	12	13
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		34,8	37,96842	41,13684	44,30526	47,47368
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)		144	142,4211	140,8421	139,2632	137,6842
			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
				a) Kumulatif		30	31,57	33,14	34,71	36,28
				b) Tahunan		30	33,68421	37,36842	41,05263	44,73684

5.3. RANGKAIAN KERJA DAN PROGRAM PRIORITAS

Rangkaian kerja yang seyogyanya dikerjakan selama 5 (lima) tahun sebagai upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan. Dalam penyusunan rangkaian kerja dimaksud, salah satu hal yang harus diperhatikan antara lain Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Rangkaian kerja tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan misi sampai dengan program prioritas/unggulan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024.

Rekomendasi Rangkaian Kerja dan Program dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rekomendasi Rangkaian Kerja

	Rekomendasi Kinerja	Rekomendasi Kerja
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	<p>Kesehatan Untuk Semua :</p> <p>a Peningkatan cakupan dan kualitas Pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui pelayanan kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, kesehatan pada usia produktif, kesehatan pada usia lanjut, kesehatan ODGJ berat.</p> <p>b Pemerataan kapasitas dan responsif sistem kesehatan untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular :</p> <p>a.Penyakit Tidak Menular, melalui peningkatan deteksi dini faktor resiko PTM dan skrining, promosi gaya hidup sehat dengan program aktivitas fisik serta pola makan sehat dan intervensi klinis.</p> <p>b.Penyakit Menular, melalui pencegahan dengan vaksinasi dan edukasi kesehatan, deteksi dini dengan program</p>

			skrining untuk penyakit TB, HIV, Hepatitis dan Malaria, pengendalian dan penanganan kasus dengan penyediaan obat dan fasilitas untuk isolasi pasien dengan penyakit menular untuk mencegah penyebaran.
		c	Penguatan Jaminan Kesehatan melalui peningkatan cakupan kepesertaan termasuk kepesertaan aktif JKN yang didukung pemerataan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang melayani skema JKN.
		d	Penurunan stunting melalui penanggulangan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil, penyediaan PMT bagi balita dengan BB tidak bertambah sesuai usia dan suplementasi gizi mikro pada balita.
		Pendidikan Berkualitas yang Merata :	
		a	Mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD, 6 tahun pendidikan sekolah dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas)
		b	peningkatan fasilitas/infrastruktur pendidikan
		c	Pemerataan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas
		d	Penguatan sistem tata kelola pendidikan
		e	Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan guru, penggunaan teknologi, metode pengajaran inovatif, peningkatan keterampilan sosial dan emosional
		f	Penguatan Pendidikan karakter siswa
		Perlindungan Sosial yang adaptif :	

		a	Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial masyarakat
		b	Peningkatan Perlindungan Sosial yang Adaptif yang ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif
		c	Inklusi Sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan
		d	Pengembangan ekonomi perawatan (care ekonomi) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan
2	Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Atraktif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi :	
		a	Pengembangan produk wisata melalui diversifikasi produk (wisata alam, sejarah, budaya, kuliner dan petualangan), peningkatan fasilitas serta menciptakan inovasi atraksi seperti taman temati, atraksi interaktif dan pengalaman budaya yang otentik
		b	Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro
		c	Mengembangkan nilai tambah (<i>value added</i>) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan
		d	Penguatan promosi dan pemasaran sektor strategis agar lebih dikenal di pasar domestik dan internasional
		e	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja
		f	Penguatan destinasi wisata

		g	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (pengembangan permintaan, pasokan, dan pengampu ekonomi kreatif)
		h	Pengembangan dan Pemanfaatan Penelitian, Inovasi, serta Peningkatan Kualitas SDM
		i.	Peningkatan kualitas peran BUMD sebagai agen perubahan
		Penerapan Ekonomi Hijau :	
		a	Pengembangan Infrastruktur hijau melalui pengembangan sistem transportasi yang mengurangi emisi seperti transportasi umum, kendaraan listrik dan jalur sepeda
		b	Mendesain kota hijau dengan ruang terbuka hijau, sistem pengelolaan air hujan, dan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan
		c	Pengembangan korporasi petani/nelayan, regenerasi petani, dan modernisasi pertanian
		Transformasi Digital	
		a	Peningkatan cakupan layanan dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas infrastruktur transportasi, konektivitas digital, dan infrastruktur konektivitas regional
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
		a	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk
		b	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar global dan industri domestik.

		c	Mempromosikan merek dan produk domestik di pasar internasional untuk meningkatkan daya tarik dan nilai tambah
		Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
		a	Mendukung pengembangan UKM baik di perkotaan maupun perdesaan dengan memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pasar. UKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
		b	Mengembangkan kluster agrobisnis dan ekowisata untuk memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal sebagai daya tarik ekonomi.
		c	Perbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, pelabuhan dan bandara yang diperlukan untuk mendukung aktivitas investasi
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
		a	Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
		b	Peningkatan transparansi dengan publikasi data dan informasi melalui portal dan situs web resmi
		c	Penataan proses bisnis dan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan shared outcome (manajemen kinerja, manajemen anggaran, Manajemen resiko, dan sistem insentif atas pencapaian target);
		d	Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan

			penerapan sistem GRC/ Governance, Risk and Compliance);
		e	Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi.
		f	Peningkatan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam proses pembangunan
			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		a	Penegakan Hukum
4	Stabilitas ekonomi makro daerah		Stabilitas Ekonomi Makro
		a	Optimalisasi PAD
		b	Pengendalian Inflasi
5	Ketahanan Sosial dan Budaya		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		a	Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
		b	Pengembangan budaya literasi
		c	Penguatan moderasi beragama
		d	Transformasi penjaminan produk halal
		e	Pengembangan dana sosial keagamaan produktif
		f	Pembinaan lembaga keagamaan
			Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		a	Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
		b	Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda

		c	Penguatan Institusi keluarga untuk penanaman nilai nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak
		d	Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
		e	Pengembangan masyarakat inklusif
		f	Penguatan penyelenggaraan PUG
		g	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	
		a	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengimplementasikan praktik manajemen berkelanjutan untuk pemanfaatn SDA, peningkatan pengawasan serta melakukan program rehabilitasi dan restorasi untuk area yang telah terdegradasi atau terdampak negatif dari kegiatan eksploitasi SDA
		b	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan kebijakan lingkungan dan regulasi yang mendukung perlindungan dan pemulihan ekosistem, serta pengurangan polusi dan dampak negatif lainnya
		c	Peningkatan pegelolaan sampah berbahaya dengan membangun sistem pengumpulan khusus serta edukasi tentang sampah berbahaya.
		d	Penguatan pegelolaan pengurangan dan penanganan sampah melalui pengolahan dan daur ulang dengan

			menggunakan inovasi teknologi serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program yang bersifat kemitraan komunitas.
7	Penataan Kota Yang Berkualitas, Maju Dan Merata		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		a	Meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan energi, air, dan pangan
		b	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, hewani, buah, sayur, serta biofortifikasi dan fortifikasi pangan
		c	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan membangun dan memperbaiki sistem penyediaan air bersih, termasuk infrastruktur dari sumber air baku, distribusi hingga pengolahan air.
		d	Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan pertanian dan perikanan
		e	Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana
		f	Pengembangan perumahan terjangkau dan layak huni serta memberikan solusi bagi kepemilikan tanah yang legal dan aman bagi masyarakat
			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		a	Restorasi lahan gambut
		b	Pencegahan penyakit menular akibat iklim

		c	Pertanian ramah iklim
		d	Peningkatan sistem sanitasi yang efektif pada saluran pembuangan, instalasi pengolahan limbah domestik, fasilitas toilet untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
		e	Konservasi lahan
		f	Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu.
		g	Penguatan tata Kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana
		h	Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
		i	Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah
		j	Pemenuhan infrastruktur pengendalian banjir

5.3 PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS/UNGGULAN

Berdasarkan rangkaian kinerja dan rangkaian kerja diatas, maka di dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025 2029 dirumuskan prioritas daerah yang merujuk pada misi di dalam rancangan RPJPD Kota Singkawang 2025-2045 sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial yang inklusif

- 1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 2) Integrasi Layanan Primer (ILP)
- 3) Antenatal Berkualitas dan Teratur
- 4) Penanganan Stunting
- 5) Penanggulangan TBC

- 6) Jaminan Sosial Kesehatan
- 7) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 8) Wajib belajar 13 tahun
- 9) Pendidikan karakter dan akhlak mulia
- 10) Penanggulan kemiskinan
- 11) Peningkatan kapasitas / keterampilan masyarakat
- 12) Peningkatan Olah raga daerah
- 13) Kota layak anak

2. Ekonomi Inklusif dan berdaya saing

- 1) Budidaya ikan
- 2) Gapoktan Aktif dan Produktif
- 3) Kawasan kuliner Halal

- 4) Pengembangan Wisata Urban
- 5) Pengembangan Kewirausahaan
- 6) Koperasi Sehat
- 7) Pendampingan BUMD Sehat
- 8) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja (E-Bussiness dan E Commerce)
- 9) Inovasi Daerah
- 10) Rumah Layak Huni
- 11) Perluasan Basis Pajak dan Retribusi Daerah
- 12) Layanan Pajak Payment Gateway
- 13) Penguatan Kapasitas Petugas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 14) pengendalian inflasi daerah

3. Transformasi Tata Kelola yang adaptif

- 1) Digitalisasi Pemerintahan
- 2) Pelayanan Prima
- 3) Pengembangan kapasitas ASN
- 4) Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik
- 5) Pendidikan Anti Korupsi
- 6) ASN Ber-AKHLAK
- 7) Partipasi masyarakat dalam proses perencanaan

4. Penataan Kota yang Berkualitas, Maju dan Merata

- 1) Perluasan dan pemerataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang multifungsi
- 2) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT)
- 3) Sungai bersih
- 4) Subsidi Akses Air Perpipaan

5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

- 1) Perluasan dan pemerataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang multifungsi
- 2) Perilaku Konsumsi Tanpa Kantong Plastik
- 3) Bank Sampah Kelurahan
- 4) pengendalian banjir

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 merupakan rancangan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahunan dengan menggunakan pendekatan teknokratik dan kerangka berpikir ilmiah untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas agar sesuai dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang sesuai dengan kondisi empiris daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kondisi daerah, hingga rekomendasi kepada Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Singkawang sehingga dapat terjaga konsistensi dan terjamin integrasi, sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.

Untuk kesempurnaan dokumen rancangan teknokratik ini, kami sangat mengharapkan kritik saran dan masukan dari semua pihak guna memperbaiki dokumen ini sebelum penetapan wali kota dan wakil wali kota Singkawang terpilih dan sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Singkawang tahun 2025-2029 yang memuat visi misi tujuan sasaran serta program prioritas.

Demikian dokumen ini disusun dengan dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang

Siti Kodam Mariana, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670717 198803 2 010